



LAPORAN AKHIR

KAJIAN AKADEMIK PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL-KEAGAMAAN MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA

Irfan Abubakar

(Penanggungjawab)

Chaider S. Bamualim

(Ketua Tim Perencana)

Idris Hemay

(Ketua Tim Pelaksana)

Sholehudin A. Aziz

(Peneliti)

Muchtadlirin

(Peneliti)

Moh. Nabil

Peneliti

Ahmad Gaus AF

(Ketua Tim Pengawas)

Efrida Yasni

(Keuangan)

KATA PENGANTAR

Laporan dihadapan pembaca ini merupakan hasil Kajian Akademik tentang "Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila". Kajian Akademik ini dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atas dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan dan memetakan akar-akar konflik sosial keagamaan akibat merosotnya kesadaran dan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat. Dan untuk mengetahui strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

Hasil kajian akademik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana idealnya strategi dan peran MPR RI dalam mencegah konflik sosial keagamaan di masa yang akan datang. Hasil kajian berhasil menemukan bagaimana Strategi Pendidikan Pancasila yang efektif Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan, Organisasi Masyarakat Kepemudaan dan Masyarakat Awam di Perkotaan dan Pedesaan. Disamping

itu, kajian ini berhasil mencermati korelasi antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran-ajaran luhur Pancasila. Hasil kajian menunjukkan korelasi positif antara merosotnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila dengan merenggangnya ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat.

Penting untuk diketahui oleh pembaca, bahwa kajian ini terlaksana merupakan hasil kerja keras banyak pihak, terutama tim yang bergabung dalam proyek kajian ini. Kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan bagi sejumlah nama yang tergabung dalam tim yang telah memperlihatkan kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab terhadap kesuksesan kajian, terutama kepada Idris Hemay sebagai ketua tim pelaksana kajian, Chaider S. Bamualim sebagai tim perencana, para peneliti; Sholehudin A. Aziz, Muchtadlirin, dan Mohammad Nabil yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kajian ini. Ahmad Gaus AF. sebagai ketua tim pengawas yang melakukan editing terhadap naskah hasil kajian akademik ini, Haula Sofiana sebagai sekretaris, Efrida Yasni Nasution sebagai keuangan dan Hidayat Alfananie yang membantu dalam melakukan layout dan desain buku ini.

Disamping itu, kami ucapkan terima kasih kepada para nara sumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktu bisa diwawancara dan telah memberikan pikiran dan sumbangan

sarannya untuk menghasilkan kajian akademik yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah konflik sosial keagamaan di Indonesia. Mereka adalah: Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Prof. Dr. Atho Mudzhar, Dr. Yudi Latif, Dr. Ihsan Malik, Dr. Ubaidillah, MA., dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Para peserta FGD yang telah datang dari jauh di sana. Mereka adalah: Dr. Mukhlis Abali, MA (IAIN Mataram), Dr. Nurman Achmad, M.Si (FISIP USU), Zet. A. Sandia, MA (ARMC IAIN Ambon), Budiman Maliki, M.Si (LPMS Poso), Mohammad Hosnan, M.Pd (Wakil Rektor INSTIKA AN-Nuqayah Madura), Atang Setiawan (ELKAHAM Tasikmalaya), Hendrikus Adam (Aktivis Peace Building Kalbar), Iskandar Gumay (Ahmadiyah DKI Jakarta), dan Yudi Munadi, M.Pd (FITK UIN Jakarta). Dalam FGD mereka telah berkontribusi dalam memberikan informasi situasi terkini dan akar-akar konflik sosial keagamaan di wilayah konflik dan potensi konflik. Dan mereka berhasil mengkaji dan mendiskusikan strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

Beberapa nama lain yang perlu kami berikan apresiasi dan sanjungan khusus adalah Prof. Dr. Komarudin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menaruh perhatian besar atas suksesnya kajian akademik ini. Kami ucapkan terima kasih

atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Bapak Ma'ruf Cahyono, SH, MH. (Kepala Pusat Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI) kepada kami untuk melaksanakan Kajian Akademik ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas bantuan banyak pihak yang namanya tidak dapat kami urut satu persatu di sini.

Kami telah berusaha melakukan yang terbaik yang kami mampu lakukan, namun hasil kajian ini mungkin tak luput dari pelbagai kelemahan dan kekurangan. Maka sumbang saran dan masukan yang kritis-konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini akan kami terima dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Desember 2014

Irfan Abubakar, MA.
Direktur CSRC UIN
Jakarta

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang __ 1
- B. Tujuan Kajian __ 15
- C. Definisi Operasional __ 15
 - a. Pencegahan Konflik __ 15
 - b. Konflik Sosial-Keagamaan __ 13
 - c. Konflik Etnik __ 18
 - d. Konflik antar Kampung __ 19
 - e. Nilai-Nilai Pancasila __ 20
 - f. Nilai-Nilai Kebangsaan __ 21
 - g. Nilai-Nilai Kewargaan __ 22
 - h. Pendidikan Pancasila __ 23
- D. Ruang Lingkup Kegiatan __ 24
- E. Metodologi __ 25
- F. Jadwal Kajian __ 29
- G. Lokasi Kegiatan __ 30
- H. Penyelenggara Kajian __ 30

BAB II

KERANGKA TEORI

- A. Pancasila di Tengah Krisis Kebangsaan dan Kewargaan __ 31
 - a. Pancasila dalam Sorotan Kritis __ 35
 - b. Pancasila dan Krisis Kebangsaan __ 39
 - c. Pancasila dan Penguatan Masyarakat Warga __ 45
- B. Konflik sosial keagamaan di Indonesia __ 47
- C. Pancasila dan Pembangunan Nilai-Nilai Toleransi dan Perdamaian __ 57

BAB III

AKAR KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DAN TERGESERNYA NILAI-NILAI PANCASILA

- A. Pendahuluan __ 63
- B. Konflik Antar Kampung __ 69
- C. Konflik Etnik __ 76
- D. Konflik Bernuansa Agama __ 83
- E. Akar-akar Konflik Sosial-Keagamaan dan Tergesernya
Nilai-nilai Pancasila __ 98

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SYARAT BERINDONESIA

- A. Pendahuluan __ 107
- B. Orde Baru dan Kebekuan Pancasila __ 110
- C. Pancasila dan Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan __
114
- D. Membatinkan Pancasila dan Rekayasa Sosial __ 117
- E. Dari Inklusi Sosial Hingga Musyawarah dan Gotong
Royong __ 130
- F. Ketuhanan YME dan Ruang Toleransi __ 141
- G. Ketuhanan Tidak Mengancam Kemanusiaan __ 143

BAB V

STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA YANG EFEKTIF DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

- A. Pendahuluan __ 147
- B. *Review* strategi pendidikan pancasila oleh MPR RI __ 154
- C. Strategi Pendidikan Pancasila Kepada Organisasi
Masyarakat Keagamaan __ 168

- D. Strategi Pendidikan Pancasila Kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan __ 176
- E. Strategi Pendidikan Pancasila Kepada Masyarakat Awam di Perkotaan dan Pedesaan __ 181

BAB VI

KESIMPULAN: APAKAH PANCASILA MASIH BISA

MENYATUKAN?

- A. Pendahuluan __ 187
- B. Pancasila dan Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan __ 189
- C. Menjaga Pancasila dari Distorsi Sejarah __ 196
- D. Pancasila sebagai Sumber Moral dan Spiritual __ 201
- E. Rekomendasi __ 205

DAFTAR PUSTAKA __ 212

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada alinea keempat Pembukaan UUD itu dinyatakan bahwa negara Indonesia "...berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹ Semua poin inti ini merupakan lima sila dari Pancasila.

¹ Kalimat lengkapnya berbunyi, *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada*

Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketata-negaraan. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Dengan begitu, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, yakni mengikat dan memaksa setiap warga negara agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan Pancasila sebagai landasannya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dan fundamental dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya harus bersandar dan mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dijadikan pijakan perilaku atau tindakan setiap warga negara. Sehingga, lebih tepat jika Pancasila juga dinyatakan sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia) atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, saat pertama kali Pancasila dirumuskan, Soekarno menegaskan:

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—"*philosofische grondslag*" dari Indonesia Merdeka. *Philosofische grondslag* itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi... Paduka Tuan yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki? Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *philosofische grondslag*, atau—jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk—Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu "*Weltanschauung*" di atas mana kita mendirikan negara Indonesia.²

Dengan peristilahan yang sama, TAP MPR RI No.II/MPR/1978 juga menyatakan Pancasila sebagai jiwa seluruh bangsa, pandangan hidup, dan keperibadian bangsa Indonesia. Bahkan dengan tegas TAP itu menyebut Pancasila telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.³ Keunggulan Pancasila juga telah diakui para pakar di dunia, antara lain, oleh guru besar ilmu agama Amerika, Mark

² Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, h. 13-14 & 25.

³ Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA), h.4.

Juergenmeyer, yang menyebut Pancasila sebagai *religiously, friendly, ideology* yang tidak akan pernah tergantikan ideologi lain.⁴

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila makin hari tampaknya makin memudar. Nilai-nilai Pancasila terasa makin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi 1998. Secara kasat mata hal ini bisa dilihat dari -- salah satu contohnya yang sepele -- masih banyak masyarakat yang tidak hafal Pancasila.⁵ Fenomena ini sebenarnya kurang lumrah terjadi pada masa Orde Baru di mana Pancasila cukup familiar di telinga masyarakat, disosialisasikan melalui berbagai cara seperti, yang paling populer, penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Terkikisnya nilai-nilai Pancasila pada tataran tertentu telah membuka ruang bagi tumbuhnya pemahaman atau pandangan yang bertentangan dengan dasar negara. Bahkan praktik atau tindakan yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) — seperti konflik sosial-keagamaan, dll — mudah terjadi. Apalagi faktanya Indonesia memang merupakan negara yang terdiri dari bermacam agama, suku,

⁴ Lihat Azyumardi Azra, "Revisitasi Pancasila" dalam M.Karim (ed.) *Rindu Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2010).

⁵ Lihat Kliping Brita Kementerian Agama, "Masih Banyak yang Tidak Hafal Pancasila" Suara Karya, 08 April 2014.

ras, bahasa, dan budaya sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1 dan 2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Dalam kondisi keragaman semacam itu, potensi konflik sangat mudah tersulut dan pecah.

Bukti nyata dari keadaan tersebut bisa ditelusuri dari beberapa laporan konflik sosial-keagamaan yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Pada bulan Mei 2012, pemerintah Indonesia menyampaikan laporan terkait pemenuhan hak asasi manusia di depan forum Dewan HAM PBB, di Jenewa. Dalam forum empat tahunan yang dikenal dengan *Universal Periodic Review* (UPR) itu, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat sorotan tajam dari perwakilan negara lain. Catatan khususnya diberikan pada kasus tak berkesudahan dan terus berulang, seperti kasus Ahmadiyah dan persoalan rumah ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor.⁶

Sontak saja catatan tersebut mendapat tanggapan dari dalam negeri. Diskursus yang kemudian berkembang adalah seputar intoleransi agama. Meski di forum itu diketahui banyak negara mengapresiasi kinerja pemerintah dalam bidang HAM secara umum, tetapi catatan itu tetap menjadi tamparan keras yang tak bisa ditampik oleh siapa pun.

⁶ Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS), Yogyakarta, "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012," h. 7. Lihat di www.crcs.ugm.ac.id

Bahwa, negara dianggap 'gagal' menjamin kehidupan umat beragama.

Anggapan tersebut seolah benar dengan sendirinya menyusul laporan data akhir tahun SETARA Institute pada Desember 2012. Dilansir bahwa sepanjang tahun 2012, tercatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan disertai 371 bentuk tindakan. Peristiwa dan tindakan itu menyebar di 28 provinsi. Sedangkan provinsi yang tingkat pelanggarannya paling tinggi adalah Jawa Barat (76 peristiwa/kasus), Jawa Timur (42 peristiwa/kasus), Aceh (36 peristiwa/kasus), Jawa Tengah (30 peristiwa/kasus), dan Sulawesi Selatan (17 peristiwa/kasus).⁷

Pada tahun 2013, The Wahid Institute dalam laporan tahunannya menyatakan bahwa sepanjang bulan Januari-Desember 2013 telah terjadi pelanggaran sebanyak 245 kasus dengan 278 tindakan. Dari jumlah itu, 106 peristiwa (43%) melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Jika dilihat dari sebaran wilayah pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara, maka diketahui ada 17 wilayah di mana Jawa Barat masih menempati posisi paling tinggi sebagai wilayah yang paling

⁷ Setara Institute, "Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012, h. 3-4.

banyak kasus yakni 40 kasus, diikuti Jawa Timur 19 kasus, Jawa Tengah 10 kasus dan Jakarta 8 kasus.⁸

Yang dapat digarisbawahi dari fenomena tersebut ialah ternyata gejala komunalisme dan primordialisme yang disandarkan atas sentimen keagamaan semakin menguat dalam kehidupan warga negara. Tiap kelompok agama atau kepercayaan lebih mengedepankan kepentingan masing-masing, saling mengibarkan bendera, mengumbar perbedaan serta memaksakan kehendaknya dengan jalan kekerasan. Sementara pada saat yang sama, fenomena tersebut justru menunjukkan gejala terkikisnya jiwa bernegara yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila seperti telah luntur kesaktiannya, tak lagi hidup dengan kokoh dan kuat dalam jiwa warga negara.

Padahal, jika dicermati secara mendalam makna lima sila dalam Pancasila, semuanya mengarah pada perekatan persatuan dan kesatuan nasional sebagai prasyarat perwujudan cita-cita kebangsaan. Masing-masing sila itu memberi daya dorong dan daya ikat yang sangat dahsyat bagi terciptanya solidaritas dan integrasi nasional. Antara sila yang satu dengan sila yang lain secara hirarkis saling menguatkan dan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan.

⁸ The Wahid Institute, "Laporan Tahunan: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013," h. 23.

Sebab, jika salah satunya dihapus atau diabaikan maka akan berpengaruh terhadap kekuatan daya tersebut.

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Meski berbeda sebutan satu sama lain, tetapi inti dari semuanya ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi. Sebab, Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahannya masing-masing memang hanya satu, tunggal, tak dapat dibagi.

Karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa, baik dalam kontek kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan.⁹ Semua perilaku atau tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara pertama-tama disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Tuhan diyakini sebagai awal dan akhir segala yang ada, sebagai Titik Alpha dan Omega. Dialah kebenaran mutlak di mana semua kebenaran di dunia ini bersumber. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan atau bahkan menyangkal keberadaan Tuhan haruslah ditolak.

⁹ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 90.

Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan (Inggris: *mankind*) adalah pengertian abstrak manusia dalam arti hakikat atau esensinya. Sehubungan dengan ini dikenal juga istilah perikemanusiaan (Inggris: *humanity*), menunjuk pada pengertian jiwa yang merasakan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain di atas harkat dan martabat yang sama yang lebih tinggi daripada makhluk lain.

Adil berarti sama, seimbang, tidak membedakan. Keadilan sifatnya intuitif, bisa ketahui dan dirasakan melalui hati nurani manusia. Meski tidak belajar khusus tentang keadilan, hati nurani dapat membedakan perilaku mana yang adil atau tidak adil. Sedangkan beradab berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral kemanusiaan (kebalikannya biadab). Dengan demikian, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kewajiban atau tuntutan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Sebaliknya, semua pandangan, sikap atau kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan haruslah ditolak. Sila kedua ini oleh Soekarno disebut juga internasionalisme karena memuat prinsip kemanusiaan universal.¹⁰

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata "satu" yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah.

¹⁰ *Ibid*, h. 108 & 109.

Kata "Indonesia" mengacu pada bangsa sekaligus negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, Persatuan Indonesia menunjuk pada komitmen dan kehendak segenap tumpah darah Indonesia untuk hidup satu bangsa, satu nusa atau tanah air serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa yang terpencar di berbagai pulau, tetapi komitmen dan kehendak itu telah menyebabkan Indonesia menjadi satu kesatuan. Komitmen dan kehendak itu secara mendalam tergambar dalam prinsip persatuan dan kesatuan *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu, hal apa pun yang berpotensi menyebabkan keretakan dan perpecahan bangsa Indonesia harus dihindari.

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kerakyatan berasal dari "rakyat" yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering juga disebut kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah satu-satunya yang berdaulat. Hikmah kebijaksanaan artinya arif dan bijaksana (bahasa Arab *hikmah*: kebijaksanaan). Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasional dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta

kepentingan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.

Sedangkan permusyawaratan/perwakilan dapat diartikan sebagai pelaksanaan demokrasi. Permusyawaratan (bahasa Arab *musyâwarah*: musyawarah) adalah pengambilan keputusan berdasarkan jalan musyawarah, kebulatan pendapat untuk suatu mufakat. Adapun perwakilan adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan.¹¹ Sila keempat ini merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keadilan sosial memiliki banyak aspek, mulai dari aspek urusan perumahan tangga, aspek agama, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan aspek ekonomi. Negara punya kewajiban mengupayakan keadilan semua aspek itu demi terciptanya kesejahteraan, material maupun spiritual. Ini adalah konsekuensi dari tiga sila sebelumnya yang didasarkan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, apalah arti sila keempat tanpa sila ketiga, dan apalah arti sila ketiga tanpa adanya pemahaman sila kedua, dan apalah arti sila kedua jika tidak ada sila pertama?

¹¹ *Ibid*, h. 169-171.

Menaruh kepercayaan pada Tuhan berarti bersedia menjalankan perintah-Nya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan antar-sesama. Jadi, memahami sila kelima sebagai sebuah tujuan juga terkait dengan motif penyusunan Pancasila secara hirarkis piramidal.

Kelima sila tersebut memuat nilai-nilai prinsip yang disepakati sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari perdebatan sengit yang mengitari perumusan Pancasila, pada akhirnya segenap *founding fathers* satu suara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Egoisme primordial-keagamaan ditenggelamkan di bawah kebijaksanaan yang mengatasi sekat-sekat ideologis dan kepentingan. Bukan karena sekadar didorong oleh keinginan memiliki sebuah bangsa, melainkan karena alasan lebih fundamental, yakni nilai-nilai itu secara substansial memang selaras dengan semua ajaran agama dan kepercayaan. Dengan demikian, Pancasila betul-betul menjadi perekat dan pengikat yang menyatukan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Rajutan nilai-nilai persatuan dan kesatuan nasional dalam falsafah dasar Pancasila memiliki akar panjang dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tidak muncul dengan sendirinya. Justru nilai itu telah hidup lebih

awal dan lebih lama sebelum Pancasila dirumuskan. Spirit kesatuan dan persatuan itu secara ekstensif dinyatakan dalam dua frase yang mengandung nilai historis dan filosofis. *Pertama*, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah yang berisi pengakuan akan “bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia” dan “berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia” menjadi awal mula munculnya nasionalisme. Dari sini benih-benih persatuan nasional ditanamkan dan diekspresikan untuk pertama kalinya.

Kedua, semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Semboyan yang diambil dari Kitab Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular abad ke-14 ini diabadikan dalam lambang Garuda Pancasila sejak tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.¹² Dengan posisi dicengkram Burung Garuda, ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut menjadi simbol integrasi nasional yang sarat makna. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah perekat solidaritas nasional. Semboyan itu mengafirmasi dua hal sekaligus: keberagaman dan kesatuan. Keberagaman dipahami sebagai anugerah, sunnatullah (*given*) yang tak bisa ditolak. Ia bersifat niscaya. Ia harus diakui dalam keadaan apa pun. Sementara kesatuan merupakan cita-cita yang mesti diperjuangkan demi terwujudnya keadaan harmonis.

¹² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012), h. 170.

Dua *spirite* persatuan dan kesatuan itu oleh Pancasila dibingkai lebih tegas dengan substansi dan cakupan yang lebih luas. Pancasila juga mengakomodasi dan mengafirmasi nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pertentangan satu sama lain. Justru dengan Pancasila, perbedaan nilai-nilai ajaran agama, budaya, dll, bisa hidup berdampingan tanpa harus saling merugikan apalagi menghancurkan. Di bawah Pancasila, masyarakat Indonesia bisa merajut hidup harmoni yaitu: persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*).

Oleh karena itu, perlu upaya sungguh-sungguh untuk membumikan dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam segenap jiwa bangsa. Penanaman nilai-nilai Pancasila akan mampu mencegah potensi konflik sosial-keagamaan yang selama ini masih marak terjadi. Potensi konflik, khususnya konflik sosial-keagamaan, dapat dicegah dan dihindari jika warga negara memahami jati dirinya sebagai bangsa yang bersatu dengan pandangan hidup berdasarkan Pancasila yang mengayomi keragaman. Pengamalan Pancasila akan memberi jalan keluar yang efektif bagi kemungkinan terjadinya konflik sosial-keagamaan yang mengancam keutuhan negara.

B. TUJUAN KAJIAN

1. Merumuskan dan memetakan akar-akar konflik sosial keagamaan akibat merosotnya kesadaran dan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
2. Sejauhmana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat.
3. Untuk mengetahui strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

C. DEFINISI OPERASIONAL

a. Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik adalah serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (pemerintah/non-pemerintah) maupun melalui sistem peringatan dini.¹³

Pencegahan konflik merupakan tindakan pra-konflik agar potensi konflik tidak menguap dan eskalasinya terus meluas dan membesar. Pencegahan konflik berangkat

¹³ Definisi ini lebih mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun demikian, di sini lebih ditekankan pada kapasitas kelembagaan yang tidak hanya dipahami sebagai lembaga pemerintah saja, melainkan juga swasta, bahkan kelembagaan masyarakat.

dari asumsi tentang adanya kondisi di masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya konflik dan cenderung mengarah pada kekerasan sosial. Tugas dan fungsi pencegahan adalah bagaimana mendeteksi dan menganalisis potensi itu sejak dini serta bagaimana mengatasinya agar tidak mencuat menjadi konflik.

Dua kegiatan besar pencegahan konflik, yaitu: penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*). Penguatan kapasitas kelembagaan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membuat kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif terhadap terjadinya konflik, kebijakan yang menciptakan suasana kondusif bagi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan sistem peringatan dini bisa dilakukan mulai sejak awal seperti mendeteksi potensi atau gejala konflik, memantau lokasi-lokasi rawan konflik, termasuk mengintensifkan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk kemudian memanfaatkan modal sosial di masyarakat menjadi agen/komponen yang mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan konflik.

b. Konflik Sosial-Keagamaan

Konflik sosial-keagamaan adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antar-kelompok

masyarakat seagama atau beda agama, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, yang disebabkan atau dipicu oleh permasalahan keagamaan.¹⁴

Konflik sosial-keagamaan seringkali terjadi antar-kelompok masyarakat seagama karena perbedaan pemahaman/aliran atau karena faktor lainnya, atau di antara kelompok masyarakat beda agama. Namun demikian, konflik antar-kelompok seagama atau beda agama belum bisa dikatakan konflik sosial-keagamaan jika penyebab dan pemicunya bukan karena masalah keagamaan. Sebab, seseorang atau kelompok masyarakat dengan agama tertentu bisa saja berkonflik dengan kelompok lain tapi bukan karena faktor agama (bernuansa agama), melainkan karena faktor etnis (bernuansa etnis), politik, dan lain-lain.

Esensi konflik sosial-keagamaan tidak hanya terletak pada identitas pelakunya, tetapi juga penyebab dan/atau pemicunya. Tidak jarang suatu konflik disebut konflik sosial-keagamaan padahal sebenarnya tidak ada unsur agamanya sama sekali. Agama dalam hal ini hanya dijadikan alat untuk melegitimasi atau mendelegitimasi

¹⁴ Definisi ini diadaptasi dari definisi konflik sosial yang dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Perbedaannya, ruang dan lingkupnya lebih difokuskan pada masalah keagamaan dengan substansi yang berbeda.

kepentingan tertentu yang notabene merupakan akar/penyebab sesungguhnya.

c. Konflik Etnik

Konflik etnik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan di antara dua kelompok etnis atau lebih, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, baik dipicu permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun teritorial, dengan menggunakan sentimen kesukuan.

Esensi dari konflik etnik terletak pada pelakunya, yaitu kelompok/komunitas etnis dan juga sentimen yang digunakan. Identitas yang diacu dan diandalkan dalam konflik etnik ialah kesukuan. Sedangkan faktor pemicunya meliputi: persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan teritorial.

Akan tetapi, tidak gampang menyebut suatu konflik masuk dalam kategori konflik etnik. Sebab, di sini perlu pengertian yang jelas dan tegas terlebih dahulu tentang apa itu etnis? Menurut Anthony Smith, komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu

memiliki keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama.¹⁵

Lebih rinci, kriteria komunitas etnis menurut Smith antara lain: *pertama*, memiliki namanya sendiri; *kedua*, orang-orang di dalam kelompok yakin bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama; *ketiga*, mereka memiliki ingatan sosial yang sama; *keempat*, mereka memiliki kultur yang sama (dapat dilihat dalam bahasa, agama, norma-norma adat, pakaian, musik, karya seni, arsitektur bahkan makanan); *kelima*, mereka merasa terikat pada suatu teritori tertentu, terutama teritori yang sedang mereka tempati; *keenam*, orang-orang yang berada di dalam kelompok merasa dan berpikir bahwa mereka adalah bagian dari satu kelompok yang sama.¹⁶

d. Konflik Antar-Kampung

Konflik antar-kampung adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antar-warga dari kampung yang berbeda dalam skala luas, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan

¹⁵ Reza A.A. Wattimina, "Memahami Seluk Beluk Konflik Antar Etnis Bersama Michael E.Brown", artikel diakses di <http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-bersama-michael-e-brown/> tanggal 23 November 2014. Lihat pula Michael E.Brown, "Causes and Implications of Ethnic Conflict" dalam *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (ed.), (Great Britain: Polity Press, 1997), h. 81.

¹⁶ *Ibid*, 82.

ketidakamanan dan disintegrasi sosial, dengan menggunakan sentimen yang disandarkan atas identitas perkampungan.

Esensi konflik antar-kampung terletak pada aktor atau pelakunya, yakni warga masyarakat kampung, sentimen yang digunakan, juga pada skalanya. Sentimen dalam konflik antar-kampung biasanya dibangun di atas identitas (solidaritas) perkampungan. Sedangkan pemicunya bisa bermacam-macam mulai dari persoalan sepele seperti saling ledek antar-geng atau kelompok nongkrong, persaingan antar-kampung dan sebagainya.

Mengenai skala konflik, konflik antar-geng atau antar-kelompok belum dapat dikatakan konflik antar-kampung jika skalanya belum meluas. Konflik semacam ini baru bisa disebut konflik antar-geng saja. Tetapi, ketika skalanya meluas melibatkan warga masyarakat kampung, apalagi motivinya berkembang menjadi dalih mempertahankan diri, mempertahankan wilayah teritori tempat mereka tinggal, maka konflik tersebut dapat dikatakan konflik antar-kampung.

e. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam lima sila Pancasila.

Masing-masing sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang sangat kaya bila dijabarkan lebih jauh dan mendalam. Implementasi nilai-nilai dasar tersebut diejawantahkan dalam berbagai norma serta aturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara bersandar dan mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila.

Lima sila Pancasila: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

f. Nilai-nilai Kebangsaan

Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi kekuatan pendorong pencapaian tujuan nasional.

Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari kearifan kultural masyarakat Indonesia yang majemuk yang mencita-

citakan bangsa yang satu, merdeka dan berdaulat. Dari realitas yang majemuk dan cita-cita kebangsaan ini, masyarakat Indonesia mengembangkan rasa persaudaraan antar-sesama bangsa (nasionalisme), menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan, sikap toleran, saling menghargai dan menyayangi satu sama lain, bersatu dalam keragaman (*bhinneka tunggal ika*), dan sebagainya. Termasuk nilai-nilai kebangsaan di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (beserta UUD 1945) yang telah disepakati sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

g. Nilai-nilai Kewargaan

Nilai-nilai kewargaan adalah nilai intrinsik dalam diri warga negara yang dengan nilai itu seseorang tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam sebuah negara, melainkan juga mengenal jati dirinya sebagai warga negara.

Seperti halnya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewargaan juga bersumber dari kearifan kultural masyarakat Indonesia. Hanya saja, biasanya di sini lebih menekankan pada hubungan antara negara dan warga negara. Hal-hal seperti hak dan kewajiban warga negara, pengetahuan mengenai kependudukan, tempat tinggal, identitas kewargaan dan sebagainya masuk dalam kategori ini. Hanya saja, konteks nilai-nilai kewargaan dewasa ini

sudah dikembangkan lebih luas di mana termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjadi syarat terwujudnya masyarakat madani seperti nilai hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, gotong royong serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang memang dikembangkan dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan nilai-nilai kewargaan, masyarakat akan memahami jati dirinya sebagai warga negara. Jati diri itu tak terbatas pada identitas kewarganegaraan saja tetapi juga secara kultural mampu mengidentifikasi diri sebagai warga Indonesia. Sikap, perilaku, kebiasaan dan tradisinya dalam berinteraksi dengan lingkungan khas warga negara Indonesia.

h. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila adalah upaya pembelajaran meliputi pengenalan, pemahaman dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara formal, pendidikan Pancasila merupakan materi pelajaran yang wajib dipelajari dan diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi. Materi ini meliputi sejarah perumusan Pancasila, latar belakang pendidikan Pancasila, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

pendidikan Pancasila, pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan lain-lain.

Hanya saja terdapat perbedaan penekanan pembelajaran pendidikan Pancasila antara tingkat menengah ke bawah dengan perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan Pancasila tidak hanya berorientasi mengenal dan memahami Pancasila tetapi sudah pada tingkatan mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.¹⁷

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan program ini adalah kajian akademik tentang pencegahan konflik sosial keagamaan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila meliputi:

1. Menyusun Desain Operasional (DO) kajian akademik yang berisi konsep, kerangka teori kajian akademik dan metodologi yang tepat digunakan dalam kajian akademik ini.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013. h. Vii.

2. Menyusun panduan wawancara mendalam, mencakup pemahaman atas topik yang diteliti, nara sumber kajian akademik, dan hal lain yang bersifat teknis di lapangan. Panduan ini menjadi dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kajian akademik.
3. Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* di Jakarta.
4. Melakukan serangkaian wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan kajian akademik ini.
5. Melaksanakan *monitoring* untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan tujuan kajian akademik.
6. Mentranskrip dan *coding* hasil wawancara.
7. Membuat laporan yang di dalamnya memuat uraian latar belakang, proses pelaksanaan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai lampiran laporan juga disampaikan data dasar hasil kajian akademik.

E. METODOLOGI

1. Studi Literatur

Dalam kajian akademik ini, secara sekuensial, studi literatur dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang akan dianalisis terkait dengan topik kajian akademik ini. Karena topik kajian akademik ini berkaitan dengan Pancasila dan konflik sosial keagamaan, ada tiga perspektif yang digunakan

untuk mencapai tujuan itu, yakni perspektif Pancasila, sosiologi agama, dan studi konflik. Ketiga instrumen ini digunakan untuk membedah permasalahan kajian akademik ini.

Tahap kedua, studi literatur yang bertujuan untuk memberi penilaian atas temuan empirik dari hasil wawancara mendalam. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan dengan konsep ataupun berbagai teori yang relevan dalam lingkup Pancasila, sosiologi agama, dan studi konflik. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber juga dapat memperjelas hasil kajian akademik ini. Data sekunder ini termasuk peran media massa sebagai entitas yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah satu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam pada umumnya menelusuri pandangan seorang narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam atau mereka yang terlibat langsung atas suatu peristiwa tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara mendalam ini menganut prinsip *snow ball*. Yakni wawancara akan terus dilakukan sehingga tidak ada lagi informasi baru yang belum tergal. Dengan kata lain, sepanjang masih ditemukan data yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain, wawancara mendalam akan terus dilakukan selama periode penghimpunan data, bahkan saat penulisan. Dengan demikian narasumber untuk suatu topik tertentu tidak hanya satu, melainkan beberapa orang sesuai kebutuhan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat kategori atas jawaban narasumber. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dalam penyajian hasil laporan kajian akademik, beberapa pernyataan narasumber dapat dikutip untuk mempertegas analisis.

Adapun *stakeholders* yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Akademisi
2. Aktivistis dan pemerhati konflik sosial keagamaan

3. Aktor dan korban konflik
4. Tokoh agama
5. NGO

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai situasi terkini, akar-akar konflik sosial keagamaan dan sejauhmana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat. Disamping itu, FGD akan mendiskusikan strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat. FGD akan dilaksanakan selama satu hari dan akan dihadiri oleh 18 peserta yang terdiri dari: aktor dan korban konflik, tokoh agama, pemerintah, akademisi, media, dan aktivis NGO dari Ambon, Poso, Pontianak, Medan, Bima, Tasikmalaya, Madura, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan kegiatan ini memberikan gambaran yang *genuin* dan utuh mengenai situasi terkini di Ambon, Poso, Pontianak, Medan, Bima, Tasikmalaya, Madura, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya guna menghasilkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Kajian Akademik "Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila" ini dilakukan dalam kurun dua bulan terhitung sejak persetujuan resmi kegiatan ini (November-Desember). Jadwal kegiatan disusun oleh pelaksana studi ini setidaknya mencakup aspek:

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERENCANAAN								
1	Desain Operasional (DO)		13-14						
2	Panduan <i>Indept Interview</i> dan nara sumbernya		14						
3	Kisi-kisi FGD dan pesertanya		14						
4	Rincian Biaya Pekerjaan		14						
5	Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan		14						
B.	INDEPT INTERVIEW								
1	Wawancara mendalam (<i>Indept Interview</i>)			17-20					
2	Transkrip hasil wawancara				23				
3	Coding hasil wawancara				24				
4	Penulisan laporan				24-3				
C.	LAPORAN TAHAP PERTAMA			24					
D.	FOCUS GROUP DISCUSSION								
1	Pelaksanaan FGD					4			
2	Transkrip hasil FGD					7			
3	Coding hasil FGD					8			

E.	PENULISAN LAPORAN								
1	Penulisan laporan					9-11			
2	Finalisasi Laporan						12		
3	Laporan Akhir Kajian							15	
F.	LAPORAN TAHAP KEDUA							15	

G. LOKASI KEGIATAN

Kajian Akademik “Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila” ini akan melihat kecenderungan (*trend*) secara nasional dengan menghadirkan aktor dan korban konflik, tokoh agama, pemerintah, akademisi, media, dan aktivis NGO dari Ambon, Poso, Pontianak, Medan, Bima, Tasikmalaya, Madura, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya.

H. PENYELENGGARA KEGIATAN

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
 Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat Jakarta 15419
 Phon. (6221) 744 5173
 Fax. (6221) 749 0756
 Email: info@csrc.or.id
 www.csrc.or.id

BAB II KERANGKA TEORI

A. PANCASILA DI TENGAH KRISIS KEBANGSAAN DAN KEWARGAAN

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah suku bangsa terbanyak di dunia. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia dihuni oleh 1.300 suku bangsa. Wilayahnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauka, setara dengan panjang dari London ke Teheran. Dengan wilayah seluas itu, ditambah keragaman etnik, bahasa, budaya, dan agama, tak pelak lagi Indonesia adalah bangsa yang paling heterogen di dunia. Dari sisi budaya, hal ini merupakan kekayaan yang tak ternilai. Namun dari aspek geopolitik, heterogenitas ini menyimpan ancaman disintegrasi yang sangat potensial.

Sejak berdiri, negeri ini memang menyimpan benih-benih konflik internal yang bersifat laten. Sebagian dari benih-benih konflik itu telah meledak dan berujung pada berbagai pemberontakan seperti: DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pada 1949, Pemerintahan Revolusioner Republik

Indonesia (PRRI) pada 1956, Perjuangan Semesta (Permesta) pada 1957, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Sementara yang lain adalah konflik yang bersifat partikular yang belakangan semakin sering terjadi seperti konflik rasial, agama, etnik, dan konflik antar-kampung yang menjadi beban tersendiri bagi politik integrasi.

Pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun diakui telah berhasil membangun stabilitas politik. Namun pendekatan otoritarian dan militeristik yang ditempuh oleh rezim pimpinan Soeharto ini membawa dampak lanjutan yang berkontribusi pada potensi disintegrasi dalam arti yang luas. Bahkan pasca runtuhnya Orde Baru, muncul tengara bahwa nasib bangsa ini di ambang perpecahan yang sangat serius. Pakar etika politik Franz Magnis-Suseno, misalnya, telah memperingatkan bahwa, "Sesudah keambrokan pemerintahan Orde Baru banyak orang bicara tentang bahaya disintegrasi. Orang menyindir ke nasib Uni Soviet atau Yugoslavia."¹

Kini, setelah 17 tahun gerakan Reformasi bergulir, masa-masa sulit itu tampaknya belum benar-benar terlewati, apalagi teratasi. Harapan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dan

¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), h. 6

terciptanya keadilan sosial masih tetap tidak menentu. Berbagai kekisruhan politik yang terjadi di pusat maupun daerah — terutama yang dipicu oleh proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) — belum mengarah pada soal-soal substansial seperti bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Kalau dicermati, akar dari berbagai kekisruhan tersebut ternyata hanya soal distribusi kekuasaan di tingkat elit. Ada benarnya pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi kita tengah dibajak dan dijadikan permainan kuasa oligarki; demokrasi di Indonesia sedang dalam “skandal.”²

Lebih jauh ditengarai bahwa skandal demokrasi terjadi karena dipicu oleh sejumlah faktor. *Pertama*, demokrasi yang seharusnya menghasilkan solidaritas justru di Indonesia membiarkan ekspansi pasar yang merusak solidaritas. *Kedua*, demokrasi yang seharusnya melindungi pluralitas justru di Indonesia membiarkan kekuatan-kekuatan religio-politis yang mengancam pluralitas. *Ketiga*, demokrasi yang seharusnya menghasilkan kesetaraan justru di Indonesia membuahakan kondisi-kondisi ketidaksetaraan. Skandal-skandal ini terjadi karena demokrasi elektoral sulit mewujudkan definisi demokrasi, yaitu *kratos* (pemerintahan)

² F. Budi Hardiman, Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013), h. 3

oleh *demos* (rakyat), karena *demos* yang ada dalam demokrasi elektoral direduksi menjadi *voters* (para pemberi suara) dikendalikan oleh kekuasaan segelintir orang superkaya yang sejak Aristoteles disebut 'oligarki'.³

Di luar masalah perseteruan kekuasaan oligarki elit, kekisruhan di akar rumput juga terus bermunculan. Konflik bernuansa suku, agama, ras, antargolongan, bahkan konflik antar kampung yang belakangan ini makin sering terjadi. Di tengah badai persoalan ini, banyak orang mulai bersuara penuh kekhawatiran: Adakah landasan moral yang memungkinkan kelestarian kesadaran kebangsaan dan menghindari potensi-potensi disintegrasi?

Kita mungkin lupa pada sejarah. Bangsa ini tidak lahir karena kesamaan melainkan karena perbedaan. Sejak awal para Bapak Pendiri Bangsa (*Founding Fathers*) telah menyadari hal tersebut. Itu sebabnya, mereka melakukan upaya penggalian nilai-nilai universal yang terdapat di semua komunitas etnik dan agama, sebagai landasan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara? Dalam rapat-rapat BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), para anggota menyuarakan pendapatnya masing-masing dalam menjawab pertanyaan Ketua Badan, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, tentang apa

³ Hardiman, Dalam Moncong Oligarki, h. 3

dasar dan landasan negara ini. Berhari-hari mereka merumuskan jawabannya. Sampai akhirnya ditemukanlah landasan dan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia yang disepakati bersama, yaitu: Pancasila.

Selama 70 tahun mengawal kemerdekaan Indonesia, Pancasila telah membuktikan eksistensinya sebagai dasar negara. Berbagai cobaan berat yang dihadapi bangsa ini seperti ancaman disintegrasi dan konflik horisontal maupun vertikal telah berhasil dilalui. Dan kini ia kembali dihadang pertanyaan kritis: apakah sebagai dasar negara Pancasila masih relevan di tengah krisis kebangsaan dan kewargaan yang tengah menggerogoti? Dan apakah sebagai pedoman hidup berbangsa Pancasila masih mampu menjaga ikatan-ikatan kultural di tengah ancaman konflik horisontal yang terus menyeruak belakangan ini? Akhirnya, bagaimana dan di mana kita sendiri sebagai warga negara akan menempatkan Pancasila di tengah krisis yang tengah melanda negeri ini?

a. Pancasila dalam Sorotan Kritis

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam salah satu pidatonya berbicara tentang Pancasila dengan retorika yang sangat meyakinkan: "Tetapi, kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu,

yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila itu.”⁴ Menurut penuturannya sendiri, pada malam menjelang 1 Juni Soekarno berdoa memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat dalam pikirannya tentang negeri yang tengah berjuang merebut kemerdekaan ini. Soekarno mengaku menemukan ilham yang mengisyaratkannya untuk menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri. Menurut Yudi Latif, Pancasila sesungguhnya adalah warisan dari jenius Nusantara. Soekarno hanya menggali mutiara itu dari bumi bangsa ini.⁵

Karena nilai-nilai Pancasila digali dari warisan budaya yang sudah ada dan hidup di wilayah Nusantara beratus-ratus tahun lamanya, maka ia sebenarnya telah menjadi darah daging penduduk di kawasan ini. Inilah alasan kenapa banyak orang berpendapat perlunya Pancasila terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Memang terdapat perdebatan apakah Pancasila sekadar sebagai kompromi politik atau pandangan hidup

⁴ Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 1

⁵ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 14.

bersama (*weltanshauung*). *Pertama*, pandangan yang menganggap bahwa Pancasila adalah *weltanshauung* terutama mengacu pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sebagai inspirasi utamanya. Di sini Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa yang orisinal digali dari bumi Indonesia. Mohammad Yamin termasuk salah satu yang paling getol membela pandangan ini.⁶

Kedua, pandangan yang menempatkan Pancasila sebagai sekadar kompromi politik. Bagi mereka, dasar argumentasinya jelas mengacu pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Pancasila adalah kompromi politik di antara kalangan Nasionalis-sekuler dengan Nasionalis-Islam. Dalam keyakinan mereka, tidak pada tempatnya bila Pancasila ditransformasikan menjadi asas politik, filsafat politik, ideologi politik, atau bentuk-bentuk lainnya.⁷

Selain itu, sebagai efek kepentingan politik rezim-rezim yang berkuasa (rezim Orde Lama dan Orde Baru) yang telah sedemikian rupa memanfaatkannya, perbincangan Pancasila sempat melahirkan kondisi traumatik dan hilang dalam peredaran. Pancasila menjadi sasaran beberapa sorotan kritis. Sebagian sorotan bersifat kritis-

⁶ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 23.

⁷Said Ali, *Negara Pancasila*, h. 23.

konstruktif. Kritis, karena sorotan tersebut mendudukkannya dalam ruang sejarah sebagai hasil pemikiran manusia (para pendiri bangsa ini) yang tidak lepas dari celah, kekurangan dan diliputi permasalahan. Konstruktif, karena sorotan tersebut menelusuri akar permasalahannya secara objektif dan mencari jalan penyelesaiannya secara solutif dengan tetap meyakini bahwa Pancasila adalah ijihad pemikiran dan karya bersama (para pendiri bangsa) untuk memberikan landasan solidaritas kebangsaan bagi republik ini.

Tapi sebagian yang lain menilai Pancasila telah kehilangan elan vital, kekuatan doktrin, dan relevansinya di masyarakat. Untuk itu, menurut kalangan ini, kita tidak perlu bersusah-payah mengupayakan perbaikan-perbaikannya, karena persoalannya bukan muncul dari luar melainkan dari Pancasila itu sendiri. Sebagai solusi, perlu pegangan baru yang lebih relevan, mengikat, dan lebih mungkin mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Sejumlah kelompok yang hendak mengganti Pancasila dengan falsafah lain yang muncul pasca reformasi berada dalam aras ini.

Demikianlah catatan-catatan kritis yang mengiringi jalan panjang dasar negara kita, Pancasila. Namun, sampai kini Pancasila masih tetap utuh. Sebagian orang—di

samping banyak pula yang menginginkan penggantinya—tetap berkeyakinan bahwa Pancasila adalah satu dasar perekat bangsa. Ia mengandung nilai, norma dan doktrin yang merefleksikan semangat religiusitas, gotong royong, kemanusiaan, dan nilai-nilai lokalitas suku-suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

b. Pancasila dan Krisis Kebangsaan

Solidaritas kebangsaan adalah faktor penting yang melandasi terbentuknya negara Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang ditandai oleh kerelaan untuk melepaskan atribut-atribut primordial kesukuan demi terwujudnya kesatuan bahasa, bangsa dan tanah air Indonesia yang melampaui perbedaan identitas kesukuan di antara kaum muda merupakan modal penting bagi Indonesia. Peristiwa 17 tahun sebelum proklamasi tersebut adalah bukti kesadaran kaum muda mewujudkan satu ikatan besar kebangsaan dan selanjutnya sebagai pemompa benih-benih kelahiran *nation-state* Indonesia.

Apakah itu bangsa? Soekarno sering mengutip definisi bangsa dari Otto Bauer. Menurutnya, bangsa adalah "*die aus einer Schicksalgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft*". Frans Magnis-Suseno

menerjemahkan kalimat di atas sebagai “komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama.”⁸ Pengalaman bersama yang paling menonjol adalah pengalaman sebagai sama-sama bangsa yang terjajah, seia-sependeritaan dan seia-sepenindasan selama ratusan tahun.

Adalah kolonialisme-imperialisme bangsa Eropa khususnya Belanda yang sangat bertanggung jawab melahirkan penindasan dan penderitaan rakyat pribumi. Kondisi tersebut menumbuhkan tekad mereka untuk bersatu. Melalui para pribumi terpelajar, sebagai konsekuensi dari kebijakan politik etis Belanda, pengalaman keterjajahan membuka kesadaran mereka untuk melakukan perlawanan.

Dengan demikian, yang mempersatukan atau menumbuhkan solidaritas sebagai satu bangsa adalah tekad bersama, yakni dorongan kesungguhan batin sebagai respon psikologis atas kondisi penindasan yang mereka alami. Kebangsaan kita bukan sesuatu yang alami, melainkan sesuatu yang dipersatukan oleh kesungguhan atau tekad bersama. Oleh karena itu,

⁸ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. xxiii.

solidaritas kebangsaan bukanlah sesuatu yang “jadi” (*be*) tetapi sesuatu yang terus “menjadi” (*being*), maka dibutuhkan kesungguhan atau tekad terus-menerus untuk memperkuatnya.⁹

Pertanyaannya, apakah Pancasila mampu menjadi spirit untuk terus memompa semangat solidaritas kebangsaan dan kewargaan ini? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu, kita perlu menelaah kembali beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Pertama, Pancasila mengandung semangat religiusitas yang tercermin dalam “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Dalam kehidupan, tiada satu pun umat manusia yang tidak memiliki semangat religiusitas atau setidaknya menggantungkan kepercayaan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Agama menjadi sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Bangsa Indonesia, sejak nenek moyang kita, tidak lepas dari ketergantungan pada kepercayaan agama bahkan jauh sebelum kehadiran agama-agama dunia di bumi pertiwi ini, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam dan Konghucu. Bahkan salah satu aspek penting dalam sejarah pembentukan tradisi dan kultur masyarakat Indonesia adalah peran agama-agama besar. Peradaban

⁹ Suseno, Etika Kebangsaan, h. 6.

Hindu, Buddha, dan Islam serta belakangan Kristen memberi andil tak ternilai dalam pembentukan karakter sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁰

Selain itu, prinsip ketuhanan dalam Pancasila tidak menonjolkan salah satu agama manapun meskipun mayoritas muslim. Setiap warga beragama menurut keyakinannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan Soekarno, "...hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama.'"¹¹

Dengan merenungkan prinsip ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, secara normatif tidak dimungkinkan terjadinya konflik-konflik bernuansa agama yang mencederai solidaritas kebangsaan dan memicu disintegrasi. Dengan sungguh-sungguh membatinkan dan mengaktualisasikan prinsip ketuhanan tersebut, seharusnya masyarakat Indonesia dapat terhindar dari malapetaka 'egoisme agama' – sebagaimana digemakan Soekarno.

¹⁰ Said Ali, Negara Pancasila, h. 75.

¹¹ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), h. 2-3.

Kedua, Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Semangat kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, adalah kemanusiaan universal. Kebangsaan atau Nasionalisme haruslah dibangun di atas dasar kemanusiaan universal, bukan *chauvinisme*, "...melainkan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa."¹²

Dengan prinsip ini, seharusnya kita terhindar dari disintegrasi bangsa sendiri. Bahkan lebih dari itu, dapat merajut rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip kemanusiaan universal ini seharusnya merangsang kita menjadi bangsa yang memiliki rasa *welas asih* kepada sesama manusia. Bila prinsip ini sungguh-sungguh diterima sebagai satu prinsip yang hidup dalam nurani, sikap dan perilaku, dengan sendirinya solidaritas kemanusiaan bangsa ini bergerak semakin kokoh dan potensi-potensi konflik dapat berkurang. Karena rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan ditempatkan di atas segala-galanya.

Ketiga, "Persatuan Indonesia". Bila prinsip persatuan

¹² Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 16.

dikedepankan, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang. Perbedaan – entah perbedaan etnis, suku, budaya, bahasa atau agama – bila disikapi dengan rasa persatuan yang tinggi tidak akan melahirkan malapetaka disharmoni. Prinsip persatuan mementingkan persaudaraan, maka rajutan persaudaraan dari aneka ragam warna yang berbeda akan menghasilkan pelangi keindahan. Indonesia adalah bangsa pelangi yang memiliki ragam warna. Kesediaan untuk berdampingan menghadirkan nuansa perbedaan yang indah. Di sinilah pentingnya *wejangan luhur* “bhinneka tunggal ika” atau bersatu dalam kebhinnekaan.

Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah jalan kemaslahatan bernegara. Dengan hikmat kebijaksanaan, kepemimpinan haruslah berpijak pada kebaikan dan pertimbangan pengetahuan yang luas, bukan sekadar ego dan kepentingan pribadi. Dengan musyawarah atau dikenal dengan *rembug*, jalan dalam mengambil keputusan haruslah melalui kesepakatan-kesepakatan dimana pendapat-pendapat yang berbeda diberi ruang sebaik-baiknya. Dengan musyawarah mufakat, setiap keputusan tidak saja berdasarkan pada prinsip suara terbanyak tetapi melalui pertimbangan mana dari alternatif keputusan yang lebih banyak unsur

kebaikannya pada rakyat.

Puncaknya adalah pada prinsip kelima dari Pancasila, yakni terwujudnya rasa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial adalah kondisi penting bagi terciptanya ikatan atau solidaritas sosial. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, maka kita peduli pada terwujudnya solidaritas kebangsaan yang kuat. Sebaliknya, ketidakadilan sosial (*social inequality*) adalah kondisi yang memungkinkan hadirnya potensi-potensi disintegrasi, disharmoni sebagai akibat kekecewaan, ketidakpuasan dan kecemburuan. Pengabaian terhadap kondisi ini sama artinya dengan sengaja kita abai terhadap persatuan atau solidaritas kebangsaan kita.

c. Pancasila dan Penguatan Masyarakat Warga

Tantangan lain dalam membumikan nilai-nilai Pancasila ialah munculnya solidaritas yang bercorak “kesetaraan eksklusif”. Solidaritas semacam ini telah membatasi kesetaraan menjadi hanya berlaku untuk kalangan tertentu atau kelompoknya saja, sementara kelompok lain tidak mendapat bagian.¹³ Kesetaraan eksklusif menciptakan blok-blok perbedaan yang memicu lahirnya

¹³ Hardiman, Dalam Moncong Oligarki, h. 60.

kecemburuan di antara kelompok-kelompok yang ada.

Blok-blok perbedaan dan kelompok-kelompok yang hanya memperjuangkan kesetaraannya secara eksklusif berpotensi menciptakan kompetisi kepentingan antar-blok. Garis kepentingan antar-kelompok semakin sulit dijembatani karena setiap blok mengejar tujuan dan kepentingan masing-masing. Dengan berfokus pada perjuangan kelompok primordial masing-masing, bingkai kebangsaan yang terajut dari aneka kelompok yang berbeda akan terabaikan. Karena itu, sistem nilai Pancasila dengan penghayatan yang berbeda sesuai nilai-nilai partikularitasnya, perlu disuntikkan kembali dengan rekayasa (*engineering*) sosial-politik dan kebudayaan dalam rangka penguatan masyarakat warga. Masyarakat warga adalah kalangan yang menjunjung tinggi “kesetaraan inklusif” (lawan dari kesetaraan eksklusif), yakni kesetaraan yang berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan yang melampaui batas-batas kepentingan primordialnya dengan memfokuskan garis perjuangan demi kepentingan seluruh warga negara Indonesia.¹⁴

Dalam situasi di mana ikatan kebangsaan mengalami krisis, sikap menjunjung tinggi kesetaraan inklusif akan

¹⁴ Hardiman, Dalam Moncong Oligarki, h. 61.

membantu mencegah terjadinya situasi yang lebih buruk. Bila melihat lanskap sejarah kebangsaan Indonesia, sikap ini tercermin dalam Sumpah Pemuda dan Pancasila. Karena itu kedua penanda ini (Sumpah Pemuda dan Pancasila) bisa merajut kepentingan nasional melampaui kepentingan-kepentingan primordial belaka. Kerelaan merajut kepentingan nasional adalah bukti kesadaran memperjuangkan kesetaraan inklusif. Dengan membaca sejarah tersebut, setidaknya kita dapat memetik satu pelajaran penting bahwa melestarikan ikatan kebangsaan atau menghadapi kondisi kebangsaan yang mulai retak, kita perlu memperkuat sikap kita sebagai masyarakat warga melalui nilai-nilai Pancasila.

B. KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA

Perdebatan menyangkut soal apakah konflik merupakan watak manusia atau sekadar efek dari realitas-realitas sosial telah berlangsung lama. Untuk memahami konflik itu sendiri para sosiolog memiliki definisi yang berbeda-beda. Lewis A. Coser, misalnya, memaknai konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber daya dimana tujuannya adalah untuk memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan (*a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the*

main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals).¹⁵ Hampir senada dengan itu, Leopold von Wiese menegaskan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.¹⁶

Definisi-definisi di atas belakangan dianggap kurang tepat untuk menggambarkan konflik sosial dengan varian agama yang turut menjadi pemicunya. Definisi itu dianggap masih terlalu umum dan tampaknya lebih didasari rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik. Seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa studi, aksi keagamaan dalam konteks konflik dan kekerasan sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan.¹⁷ Berbagai aksi kekerasan terkait konflik keagamaan juga banyak bersumber dari tradisi dan ideologi agama itu sendiri. Hal ini memperlihatkan salah satu kelemahan dalam berbagai penjelasan tentang fenomena konflik, termasuk konflik etnis-keagamaan.¹⁸ Kelemahan

¹⁵ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: Routledge, 1956), h. 10.

¹⁶ <http://sosiopedia.wordpress.com/materi-2/kelas-xi/semester-i/konflik-sosial/>, diakses pada 4 Desember 2014.

¹⁷ Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", Laporan Penelitian, (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009), h. 7.

¹⁸ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", Analisis,

semacam ini wajar karena definisi memang dibuat dengan mengikuti dinamika peristiwa dan kasus. Sementara kasus dan fenomena sosial terus berkembang.

Sampai dengan April 2014 Indonesia masih memiliki 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di empat pulau meliputi Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua sebagaimana dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos).¹⁹ Titik-titik rawan ini memiliki potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa pecah. Ada 3 (tiga) indikator dimana sebuah daerah dikategorikan rawan, yaitu mudurnya rasa saling percaya antar-warga, terputusnya komunikasi antar-warga, dan hilangnya kohesivitas sosial antar-warga. Bahkan penyebab daerah disebut paling rawan adalah kondisi perekonomian daerah tersebut yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ada daerah yang maju namun tetap saja rawan konflik karena interaksi sosial antar-kelompok atau anggota masyarakatnya sangat kaku. Dalam kasus ini, tidak jarang konflik meletup hanya karena masalah sepele.²⁰ Fakta ini mengkonfirmasi bahwa motif ekonomi-politik juga turut berperan sebagai akar konflik. Senada dengan ini Ichsan Malik menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses

Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 320.

¹⁹ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.

²⁰ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.

pengecahan konflik dalam varian apapun.²¹

Masing-masing konflik pasti memiliki kekhasannya sendiri walaupun dalam konteks tertentu juga memiliki kesamaan. Konflik bisa berwujud konflik antar-kampung, konflik etnis, konflik sosial-keagamaan, konflik politik, konflik lahan, dan sebagainya. Kita harus mampu memetakan kekhasan dari berbagai bentuk konflik sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai latar belakang konflik yang terjadi di sebuah wilayah dan pada waktu tertentu terjadi pula di daerah lain.²² Misalnya saat kita akan menyematkan agama sebagai varian konflik, maka tidak secara umum konflik itu bermuara pada agama *an sich*. Dalam konflik sosial tidak ada sumber tunggal (*single factor*). Kita tidak dapat melihat fenomena konflik dengan kaca mata kuda yang menafikan faktor-faktor lain. Konflik-konflik di Indonesia sangat beragam dengan berbagai variannya. Kasus konflik sosial di Mesuji, Lampung misalnya, sering diklaim bermula dari masalah perebutan sumber daya, namun isu etnisitas juga turut dimainkan. Maka isu pun melebar menjadi Lampung asli (pribumi) dan di luar Lampung (pendatang). Karena itu, dalam masalah

²¹ Wawancara dengan Ichsana Malik. Bahkan Weberian menyatakan bahwa fenomena munculnya konflik tidak sekedar disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja. Lihat Retnowati, *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik)*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, tth.), h. 3.

²² Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", h. 320-321.

konflik tanah maupun tata ruang selalu ada isu lain yang mengiringi seperti etnik dan agama.²³ Demikian juga dengan konflik-konflik yang lain.

Sebenarnya melekatkan agama sebagai satu varian potensial pemicu kekerasan dan akar konflik adalah hal yang tidak mudah karena memang tidak ada faktor tunggal. Agama selalu dianggap sebagai ajaran yang sarat dengan nilai kedamaian dan keselamatan. Semua pemeluk agama pasti meyakini bahwa agama tidak mengajarkan umatnya untuk melukai apalagi membunuh orang lain. Namun ironisnya, dalam sebuah konflik justru seringkali terlihat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan dengan wajah panas kekerasan. Namun, sekali lagi, fakta seringkali berbicara lain dimana banyak peristiwa menunjukkan bahwa agama dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Pemeluk agama menjadikan doktrin agama sebagai *main drive*, *primummobile*, dan *push factor* kekerasan yang mereka lakukan.²⁴ Oleh karena itulah untuk membaca fenomena konflik dengan ragam sumbernya harus benar-benar cermat sehingga kita tidak terjebak pada permukaan yang terkadang menipu.

²³ Wawancara dengan Ihsan Malik.

²⁴ Imam Priyo Handoko, "Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah", Kompas, Rabu 15 Februari 2006.

Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama seringkali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai *legal doctrine* yang harus dilaksanakan. Kekerasan atas nama agama dalam konflik dapat diterjemahkan sebagai *premium variant*. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya. Konflik berlatarbelakang agama masih terjadi di era Reformasi, seperti konflik Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, dan sebagainya. Konflik-konflik itu sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama melainkan ekonomi, sosial, dan hukum secara umum, namun kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu bagi komunitas agama tertentu, tetapi menjadi faktor pemecah-belah antar-kelompok agama yang berbeda.²⁵

Konflik juga dapat berawal dari sumber kultural atau kebudayaan, dalam hal ini adalah apa yang disebut "ideology". Konflik tersebut terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh, serta menjadi ideologi dari, berbagai kesatuan sosial. Konflik yang muncul dalam

²⁵ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", h. 318-319.

berbagai kesatuan sosial bisa bersumber dari perbedaan dan pertentangan nilai-nilai atau ideologi yang dianut berbagai kesatuan sosial dan dari keinginan kelompok tertentu untuk mendominasi kelompok lain melalui ideologi yang dianutnya.²⁶ Maka dalam konteks ini, kesatuan sosial yang berbeda-beda sangat butuh ideologi yang bisa memayungi mereka. Ideologi itu tidak lagi bersifat primordial milik kesatuan sosial tertentu, namun menjadi milik bersama. Ia berada di atas ideologi primordial.

Di sinilah Pancasila menemukan jati dirinya sebagai ideologi nasional dan harus menjadi agama sipil bagi pedoman publik bangsa Indonesia.²⁷ Rumusan Pancasila sebagai perasan nilai-nilai dan tradisi seluruh bangsa Indonesia sejatinya mengayomi seluruh kesatuan sosial yang hidup di Indonesia. Mulai dari Sila Ketuhanan yang Berkeadaban—dalam istilah Yudi Latif²⁸—sampai dengan Sila Keadilan Sosial menjadi anggitan bersama yang perlu dipahami, dihayati, dan diamalkan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila adalah satu kesatuan yang harus maju bersama-sama. Pengingkaran pada satu sila saja akan berimplikasi pada pengkhianatan seluruh sila. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai Pancasila,

²⁶ Nurman, S, "Konflik antar Lembaga di Pedesaan: Penelitian di Kenegarian Pianggu, Sumatera Barat", *Demokrasi*, Vol. I, No. 1, Tahun 2002.

²⁷ Wawancara dengan Yudi Latif, 2 Desember 2014.

²⁸ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

sehingga yang muncul adalah konflik, bukan persatuan.²⁹

Kompleksitas konflik di Indonesia memang nyata dan di luar harapan. Dengan alasan yang awalnya sepele seperti pertikaian antar pemuda mabuk beda kampung yang bersinggungan bisa menjalar menjadi tawuran massa yang menelan korban jiwa dan harta. Berbagai atribut ditarik untuk memenangkan hegemoni pribadi atau kelompok. Rumah dirusak dan dibakar, akses jalan kampung diblokir, bahkan warga yang tidak tahu menahu pun diancam, dilukai, bahkan dibunuh. Berbeda dengan konflik antar-kampung, konflik etnik lebih melibatkan massa yang besar dan dilatarbelakangi perbedaan primordial. Misalnya, konflik etnis di Sampit dan sekitarnya yang pecah pada 18 Februari 2001 telah banyak memakan korban baik dari suku Dayak (asli) maupun Madura (pendatang). Konflik antar-agama pun menjadi varian lainnya yang melibatkan komunitas agama yang berbeda dan antar-pemeluk satu agama yang memiliki aliran atau paham berbeda. Konflik di Poso, Maluku, dan Madura dapat menggambarkan bagaimana agama dimanipulasi menjadi alasan untuk menyerang dan membunuh.

R. Tockary³⁰ memberikan catatan mengenai konflik sosial-

²⁹ Wawancara dengan Yudi Latif.

³⁰ R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis-Agama di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-

keagamaan termasuk di dalamnya konflik etnis. Ada beberapa masalah mendasar dalam konflik-konflik yang terjadi, yaitu nativisme atau pribumisme, komunalisme, misi agama, faktor global, dan sistem etis nasional. Nativisme atau pribumisme terkait dengan isu pribumi dan pendatang. Dari sini persoalan bisa melebar ke mana-mana, dari isu tanah adat dan marginalisasi kelompok pribumi sampai dengan isu-isu kultural dimana pendatang dianggap tidak lagi menghargai adat istiadat kaum pribumi.

Problem komunalisme juga menjadi persoalan tersendiri. Jiwa masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan menegasikan tempat bagi individualisme. Namun pada gilirannya komunalisme justru berarti negatif saat mereka memeralat komunalisme untuk tindak kekerasan. Apabila ada satu warga disakiti maka seolah-olah yang tersakiti seluruh warga sehingga memicu tawuran bahkan konflik berkepanjangan. Semangat pertanggungjawaban atas aksi individu lenyap oleh semangat komunalisme yang membabi buta. Sistem nilai, budaya, dan keyakinan yang cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat kooperatif dapat berakhir dengan gesekan dan konflik. Hubungan sosial yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum

Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 55-58.

primitif yaitu siapa yang kuat dialah yang menang dan berkuasa, dia pula yang membuat hukum. Misi agama juga menyalakan problem tersendiri manakala terjadi benturan di lapangan. Benturan kepentingan misi masing-masing agama bila tidak disikapi dengan bijak juga dapat melahirkan konflik. Semua itu karena masyarakat tidak lagi mengindahkan sistem etis nasional. Sistem ini telah tergeser sedemikian rupa karena beberapa faktor sehingga yang tertinggal adalah semangat primordialisme kesukuan atau keagamaan.

Konflik, kata John Burton, bukanlah watak manusia. Konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang timpang, terutama ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan bertahan hidup, kehormatan, identitas dan makna, serta kebebasan. Pola relasi yang tidak imbang dalam proses-proses sosial inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan dan berujung pada situasi disharmoni dalam wujud konflik. Maka dapat dikatakan bahwa konflik mewujudkan sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya heterogenitas kepentingan.³¹ Dengan kata lain, konflik merupakan polarisasi dari berbagai kepentingan dari suatu kelompok yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus-menerus. Tentu harus akui bahwa hidup manusia tidak

³¹ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", h. 322-323.

mungkin terlepas sama sekali dari konflik. Usia konflik juga seumur dengan peradaban manusia. Masalahnya ialah bagaimana kita menyikapi konflik tersebut.

C. PANCASILA DAN PEMBANGUNAN NILAI-NILAI TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ia juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan dasar yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.³²

Pancasila harus menjadi palang pintu utama penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi di tengah-tengah kemajemukan bangsa sebagai realitas yang tak terelakkan sejak awal berdirinya NKRI ini. Kemajemukan adalah anugrah terindah yang diberikan Yang Maha Kuasa yang

³² Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 20120), Cet-4, h. 41

harus diakui, diterima, dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, kemajemukan harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.³³ Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini juga tercermin dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (1 dan 2), pasal 25A, pasal 37 ayat (5). Semua pasal ini merangkum kemajemukan realitas sosial kultural masyarakat Indonesia ke dalam satu wadah NKRI.

Secara de jure, kemajemukan menjadi aset berharga dalam merangkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Namun secara de facto, aset berharga ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan bangsa, bahkan tak jarang justru menjadi bumerang. Anarkisme masih marak terjadi di berbagai pelosok tanah air. Pemicunya ketimpangan sosial-ekonomi yang saling berpaut dengan kegagalan memahami kemajemukan dan minimnya sikap toleran dari masyarakat itu sendiri. Perdamaian akhirnya menjadi barang langka di negeri ini.

Dalam era reformasi, gerakan perubahan yang sebenarnya

³³ Sekretariat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 12 Agustus 2012, h. iv

mengusung misi demokratisasi dan perdamaian, tergulung oleh derasnya euforia kebebasan. Akibatnya, sebagian masyarakat lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku anarkis. Konflik sosial bermunculan dan tidak kunjung teratasi, bahkan di berbagai daerah timbul gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Citra bangsa Indonesia yang ramah dan santun segera berubah menjadi keras dan beringas. Inilah kenyataan empiris yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.

Persoalan konflik sosial bangsa ini terbagi ke dalam 4 (empat) sub masalah yang masing-masing mempunyai segmen berbeda. Di antaranya adalah:³⁴

1. Masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa
2. Masalah hubungan antar-umat beragama
3. Masalah hubungan antara mayoritas dan minoritas
4. Masalah integrasi budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia

Problematika kebangsaan berupa krisis toleransi dan perdamaian ini sesungguhnya tidak perlu terjadi karena dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dimungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan

³⁴ Koentjaraningrat, Masalah-Masalah Pembangunan; Bunga Rampai Antropologi Terapan (LP3ES: Jakarta, 1984), h. 91

bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.³⁵

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan model ideal pluralitas yang ada di Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari Bapak Pendiri Bangsa yang berpandangan toleran dan terbuka dalam memaknai perwujudan kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang.³⁶

Pancasila telah diakui sebagai perangkum dari pluralitas masyarakat Indonesia yang dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, kekokohan dan kemantapan Pancasila dalam mengintegrasikan bangsa di tengah berbagai persoalan nasional yang dinamis akan ditentukan oleh seberapa jauh nilai-nilai Pancasila itu sendiri dilaksanakan secara benar dalam praktek penyelenggaraan negara.³⁷

“Ketuhanan Yang Mahaesa” yang terdapat pada Pancasila misalnya, tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi hanya menegaskan bahwa agama-agama di

³⁶ Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3Es, 1985), h. 109

Indonesia berintikan satu Tuhan yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Hal ini terbukti dengan dihapuskannya tujuh kata “kontroversial” dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Apalagi bisa menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (tatkala pertama kali Soekarno mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam UUD Dasar 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial. Maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama dalam kemajemukan.

Nilai kebangsaan Indonesia yang bersatu dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* -- suatu konsepsi yang mengeksresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*) -- telah membentuk watak asli bangsa Indonesia, yaitu menjunjung toleransi.³⁸ Berbeda tetapi tetap bersatu dalam kebersamaan. Bersama-sama bersatu padu tetapi tidak menghilangkan kemajemukan. Inilah yang dirumuskan menjadi perkataan “Persatuan Indonesia” sebagai sila ketiga Pancasila. Persatuan bukanlah kesatuan. Dalam persatuan ada dinamika dan keanekaragaman, sedangkan dalam kesatuan hanya ada keseragaman yang tidak memberi

³⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 369

tempat pada dinamika perbedaan. Karena itu, meskipun warga bangsa menganut banyak sekali ajaran dan aliran keagamaan, tetapi tetap dapat hidup rukun dan damai.³⁹ Setiap orang meyakini agamanya masing-masing tanpa harus diganggu dan dipengaruhi. Setiap keyakinan harus dihormati. Perbedaan bukan alasan bahwa sesama warganegara tidak dapat bekerjasama, bahu-membahu membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bila toleransi benar-benar dijadikan dasar berpijak dalam memahami kemajemukan, maka perdamaian abadi akan menjadi capaian terbesar bangsa ini.

³⁹ Jimly As-Siddiqie, Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Paska Reformasi, Makalah pada Dialog Kebangsaan tentang "Toleransi Beragama", Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014

BAB III

AKAR KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DAN TERGESERNYA NILAI-NILAI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Saat pintu demokrasi terbuka lebar melalui Gerakan Reformasi 1998, Indonesia justru diguncang oleh aneka kekerasan. Konflik-konflik horisontal maupun vertikal seperti yang terjadi di Sambas, Ambon, Poso, Bekasi, Bogor, Lombok, Madura, Lampung, Aceh, dan Papua, mengemuka dengan telanjang dan dalam skala yang luas. Berbagai pertanyaan bermunculan untuk menganalisa tragedi-tragedi kemanusiaan yang sampai saat ini masih terus berlangsung secara sporadis. Korban pun masih berjatuhan. Banyak orang berpandangan bahwa Reformasi 1998 justru membuka kran ketertekanan yang selama ini disumbat. Begitu dibuka, kran itu menumpahkan semua yang selama ini tertahan.

Namun pandangan ini harus dilihat secara kritis. Sebab sebelum Orde Baru jatuh, konflik telah beberapa kali terjadi. Tesis mana yang lebih akurat? Untuk menjawab ini kita harus melacak berbagai kajian yang ada, yang mengurai konflik-konflik berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), mulai dari apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana ia terjadi, mengapa bisa terjadi, dan siapa aktor-aktor sejati di balik konflik.

Harus diakui bahwa konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena itu mustahil untuk dilenyapkan sama sekali. Baik konflik perseorangan maupun kelompok telah menghiasi sejarah manusia. Bahkan dua jenis konflik ini kadang saling mempengaruhi. Tak jarang konflik antar-kelompok bermula dari konflik perseorangan yang sengaja (ataupun tidak sengaja) dihembuskan. Konflik ada seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan dan gesekan-gesekan. Bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka saat itu pula konflik terjadi bahkan dapat berkepanjangan dan menciptakan sentimen kebencian dari satu generasi ke generasi yang lain. Trauma psikologis akibat konflik dapat menguatkan watak konflik.¹ Karenanya dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi saat ini pun tak lepas dari konflik di masa lalu.

¹ William Chang, "Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 27.

Pada April 2014 Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa di Indonesia masih terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di empat pulau meliputi Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua.² Fakta ini menunjukkan bahwa sampai sekarang banyak wilayah di Indonesia masih memiliki potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kemensos menyebutkan 3 (tiga) indikator sebuah daerah dikategorikan menjadi rawan konflik sosial, yaitu memudarnya rasa saling percaya antarwarga, terputusnya komunikasi antar warga, dan hilangnya kohesivitas sosial antarwarga. Indikator-indikator ini secara fisik dapat terlihat pada makin tingginya provokasi, pengrusakan sarana warga (misalnya rumah ibadah), adu fisik, teror terhadap warga, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sering pula menjadi penyebab konflik sosial. Fenomena yang terakhir ini disebut Ichsan Malik makin melengkapi sikap mental bangsa yang makin "SARAP" dari hari ke hari. Isu dan sentimen SARAP (SARA plus Politik) mudah dipertunjukkan.³ Pasca Orde Baru, politik adalah penyumbang konflik antar-warga yang cukup besar. Tidak sedikit aset negara hancur karena sentimen politik yang meledak-ledak. Kekalahan dalam Pilkada menjadi pemicu utama aksi-aksi kekerasan atas nama kecurangan dan ketidakadilan. Gara-gara sentimen

² <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.

³ Wawancara dengan Ichsan Malik, 2 Desember 2014.

politik, saudara bisa menjadi musuh karena berbeda pandangan politik. Situasi ini pula yang digambarkan oleh seorang peserta FGD “Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila” dari Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh CSRC. Menurutnya, di Kalimantan Barat konflik sangat rentan muncul khususnya menjelang Pemilu. Isu politik ditarik menjadi isu kesukuan, agama, dan lain sebagainya. Saat pemilihan gubernur misalnya, isu sentimen etnik bahwa Melayu diidentikan dengan muslim mencuat demi kemenangan salah satu calon.⁴

Daerah yang disebut sebagai paling rawan konflik sosial menurut Kemensos adalah daerah-daerah yang secara ekonomi tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang maju namun rawan konflik karena interaksi sosial antar-kelompok atau anggota masyarakat sangat kaku.⁵ Fakta ini makin menguatkan asumsi faktor ekonomi sebagai “aktor” dalam setiap konflik yang muncul. Ketidakadilan dan ketidakmerataan kue pembangunan menjadi bagian inti dari akar permasalahan konflik sosial

⁴ Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4 Desember 2014.

⁵ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.

sebagaimana diyakini oleh peneliti konflik, Ichsan Malik. Di balik konflik-konflik yang meletup dengan pola apapun, bila ditelusuri lebih jauh ujung-ujungnya adalah permasalahan ekonomi. Oleh karena itu Malik meyakini bahwa kesejahteraan memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya konflik. Bila masyarakat sejahtera, maka konflik susah untuk lahir.⁶

Fenomena konflik di Indonesia terjadi dalam beberapa varian. Tawuran antar-sekolah, misalnya, terus saja terjadi dan melibatkan tidak saja siswa aktif namun juga alumni. Kekerasan antar-sekolah ini tak jarang menelan korban dan menumbuhkan watak konflik siswa sekolah. Hal ini berbeda dengan konflik antar-kampung yang tidak hanya melibatkan generasi muda, namun juga orang dewasa. Dengan alasan yang seringkali awalnya sepele seperti pertikaian antar-pemuda mabuk beda kampung, bisa menjalar sampai menjadi tawuran massa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah, namun sering pula di ibukota yang notabene merupakan pusat pemerintahan.

⁶ Wawancara dengan Ichsan Malik. Walaupun juga tetap ada faktor-faktor lain yang turut memainkan kemunculan konflik, bahkan Weberian menyatakan bahwa fenomena munculnya konflik tidak sekedar disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja. Lihat Retnowati, *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik)*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, tth.), h. 3.

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, konflik antaretnik juga kerap terjadi di tanah air. Walaupun mirip dengan konflik antar-kampung, konflik etnis melibatkan massa yang lebih besar. Konflik etnis di Sampit dan sekitarnya yang pecah pada 18 Februari 2001 telah banyak memakan korban baik dari suku Dayak (asli) maupun Madura (pendatang). Konflik antar-agama pun menjadi varian lainnya yang melibatkan antar komunitas agama yang berbeda dan antar-pemeluk dalam satu agama yang memiliki aliran atau paham berbeda. Maluku dan Madura adalah salah satu contohnya, bagaimana agama yang sejatinya mengajarkan kasih sayang dimanipulasi menjadi alasan untuk menyerang dan membunuh. Konflik komunal lain yang kini masih terus terjadi adalah konflik tanah, bahkan konflik ini terjadi di wilayah Taman Nasional yang banyak tersebar di wilayah Indonesia yang notabene terlindungi. Konflik separatis juga masih terus terjadi di Papua. Sementara di Aceh telah mereda dengan penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 5 Agustus 2005. Namun dalam kajian ini, bahasan konflik hanya dibatasi pada konflik sosial keagamaan yang meliputi konflik antar kampung, konflik antar etnis, dan konflik sosial bernuansa keagamaan.

B. KONFLIK ANTAR-KAMPUNG

Istilah konflik antar-kampung seringkali dipertukarkan dengan istilah tawuran antar-warga. Tawuran mengindikasikan peristiwa konflik yang intensitas waktunya hanya sesaat. Namun perlu diingat bahwa tawuran antar-kampung sudah menjadi semacam peninggalan turun-temurun yang diwariskan. Artinya, walaupun tawuran terjadi sewaktu-waktu namun benih-benih tawuran telah ada sejak lama. Tawuran bisa terjadi hanya karena masalah sepele, seperti senggolan anak muda saat konser dangdut, perkelahian pemuda saat mabuk, saling mengejek, dan sebagainya. Peristiwa tawuran antar-kampung seolah telah menjadi peristiwa rutin bukan saja di Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Jatuhnya korban jiwa pun seringkali tak terelakkan. Sayangnya, berita mengenai rentetan kekerasan yang terjadi, saking rutinnnya, hanya melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain, yang menyentak kesadaran publik secara sesaat. Dalam waktu relatif singkat, fenomena ini segera dilupakan dari fokus perhatian banyak pihak.⁷ Beberapa contoh kasus konflik

⁷ Mohamad Miqdad, *Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan*, http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=13, diakses pada 4 Desember 2014.

antar-kampung yang terjadi dalam waktu yang tidak berjauhan antara lain⁸:

NO	KEJADIAN DAN LOKASI	WAKTU
1	Kampung Hanja, Cibuntiris dan Sindang Jaya, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya. Kasus ini konon diawali oleh isu penduduk Kampung Hanja yang menganut aliran sesat. Sebanyak 30 rumah warga Hanja dibakar oleh sekitar 100 orang bertopeng.	21-24 Juni 2000
2	Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebanyak 4 (empat) orang tewas dan 2 (dua) rumah warga dibakar massa yang dipicu oleh pertengkaran antara buruh dan cukongnya. Buruh yang nekad bersama kelompoknya melakukan penyerangan yang berubah menjadi aksi pembakaran rumah di sekitar cukong.	5 Juli 2000
3	Kampung Sumpian yang didukung warga Kebonmanis melawan warga Kampung Plikon, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Konflik dipicu oleh Suworyono yang memalak beberapa warga Kampung Plikon yang sedang main lotre yang berakhir dengan insiden pemukulan warga Plikon kepada Suwaryono. Kemudian berujung aksi pembalasan yang memakan nyawa Suwaryono sendiri dengan dibakar massa hingga tewas. Kejadian ini mengundang konflik antara dua kampung dimana sebanyak 32 bangunan rumah habis terbakar.	6 Juli 2000
4	Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng dan Desa Harjosari Kecamatan Suradadi terletak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peristiwabermula dari perkelahian antar-kelompok dua desa di dekat rumah warga desa Harjosari yang sedang menggelar hajatan dengan pertunjukan wayang golek. Dalam perkelahian tersebut, seorang warga Desa Karangmalang tewas dan memicu aksi balas dendam.	10 Juli 2000

⁸ Diolah dari <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>, diakses pada 5 Desember 2014.

5	Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun, Bekasi dan Kampung Pangkalan, Desa Kedungpengawas, Kecamatan Babelan, Bekasi. Dua orang warga Kampung Gabus yang akan melakukan penyerangan ke desa tetangganya, kampung Pangkalan tewas tenggelam di kali.	14 Juli-15 Juli 2000
6	Tawuran antar pemuda di Matraman antara Palmeriam, Kayumanis, Tegalan dan Berlan, Kebonmanggis, Manggarai pinggir kali.	15 Juli-24 Juli 2000

Tawuran antar kampung termasuk kekerasan “rutin” yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Institut Titian Perdamaian (ITP), rekaman angka mengenai kekerasan rutin dimana tawuran merupakan salah satu variannya, menunjukkan angka yang tinggi dan secara konsisten tidak bergeser jauh dari tahun ke tahun sejak tahun 2006. Menurut ITP meski *monitoring* konflik dan kekerasan dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda, tidak banyak perbedaan hasil analisis terkait fenomena kekerasan rutin tersebut. Hasil monitoring ITP pada tahun 2011 menunjukkan dari kekerasan rutin yang mencapai 1.310 kali, tawuran menyumbang angka yang cukup fantastis, yaitu 501 kali insiden atau 28%.⁹

Kasus-kasus termasuk pula contoh di atas menggambarkan betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang

⁹ Mohamad Miqdad, *Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan*.

bertikai, melainkan juga seluruh desa. Kampung-kampung yang sudah sejak bertahun-tahun hidup dalam keharmonisan dapat berubah menjadi saling serang dan saling menghancurkan. Desa yang lain dianggap sebagai musuh yang patut dihancurkan. Namun pemicu-pemicu konflik yang tampak sejatinya bukanlah penyebab utama. Ini hanyalah *casus belli* yang memunculkan konflik terpendam yang berakumulasi secara bertahap. Penyebab utamanya akan diketahui bila dilakukan suatu kajian yang seksama yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Walaupun di permukaan berawal dari masalah individu, namun faktor-faktor sosial, budaya, bahkan politik bisa menjadi faktor utama mengapa konflik antar kampung bisa pecah. Konflik ini harus terus diwaspadai karena bila dibiarkan dapat meluas menjadi konflik terbuka dengan dimensi lain, bahkan intensitasnya menempati posisi tertinggi dari konflik yang ada.

Ichsan Malik menganalogikan konflik seperti kebakaran hutan. Syarat kebakaran hutan harus ada *trigger*-nya berupa api, akseleratornya berupa angin, dan rumput keringnya berupa *structural factor*. Api boleh besar, angin boleh besar, tapi kalau rumputnya basah (*structural factor*-nya tidak ada) masalah tidak akan terbakar. Rumput dapat menjadi kering karena perilaku korupsi, diskriminasi, atau ketidakbecusan

¹⁰ <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>.

pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan *structural factor*. *Trigger*-nya bisa berupa PILKADA. Sementara angin bisa berupa krisis ekonomi dan tingkat pendidikan atau karena emosi sehingga "otak sedang tidak bisa berjalan". Dari ilustrasi ini terlihat bahwa di seluruh Indonesia *structural factor* (rumputnya) sudah setengah kering. Situasi ini diperparah dengan sistem penegakan hukum yang masih lemah yang meliputi tidak saja penegak hukumnya yang harus baik, namun juga kesadaran masyarakat terhadap hukum harus baik. Walaupun demikian Ichsan Malik menegaskan bahwa tidak mengapa kesadaran hukum rendah asalkan kondisi masyarakat makmur. Faktor kemakmuran inilah yang bisa menghambat api dan angin.¹¹

Apa yang disampaikan Ichsan Malik tergambar, misalnya, dalam kasus konflik antar-kampung di Sukabumi pada 11 Agustus 2013. Konflik berawal dari kondisi jalan rusak yang pada akhirnya memicu bentrokan antar-warga. Peristiwa ini melibatkan dua kampung yang saling berbatasan antara Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, yaitu Kampung Babakan Jawa Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kampung Pasir Pogor Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Peristiwa yang menghancurkan 5 (lima) rumah warga ini dipicu oleh kasus perebutan jalan yang

¹¹ Wawancara dengan Ichsan Malik.

bagus untuk dilintasi kendaraan.¹² Kasus ini makin mengukuhkan asumsi bahwa pemicu konflik tidak hanya sentimen antar-kampung, namun juga masalah infrastruktur jalan. Bila dirunut pun, faktor-faktor penyebabnya tidak akan berhenti di sini. Kesimpulan hasil kajian Sulaeman dan kawan-kawan dari Universitas Padjadjaran menunjukkan asumsi ini saat mereka melakukan penyusunan model resolusi konflik antar-desa dan antar-kampung di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kesimpulan mereka menggambarkan akar masalah konflik tawuran antar-kampung, yaitu:¹³

1. Adanya syarat kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) untuk terjadinya konflik, misalnya kebiasaan minum minuman keras pada saat hiburan hajatan yang dilembagakan oleh nilai sosial budaya yang dikemas dalam kesenian tradisional dan hasil sejarah sosialisasi jeratan warisan pemerintahan kolonialisme Belanda.
2. Adanya krisis identitas dan harga diri yang menuntut banyak perhatian orang lain.

¹² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/08/13/mrg174-jalan-rusak-picu-konflik-antar-kampung-di-sukabumi>, diakses pada 7 Desember 2011.

¹³ Sulaeman et al., "Penyusunan Model Resolusi Konflik Antar Desa Dan Antar Kampung Melalui Pembangunan Modal Sosial Pada Masyarakat Pedesaan Pantai Utara Jawa Barat", *Laporan Penelitian*, Universitas Padjadjaran, 2005, <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>, diakses pada 7 Desember 2014.

3. Konflik politik dalam Pilkades (pemilihan kepala desa) disebabkan adanya kontradiksi yang tajam dalam orientasi nilai sosial kepemimpinan yang berkembang menjadi stereotip, kemudian muncul sikap emosional yang disusul perilaku obyektif struktural saling menyerang.

Hasil penelitian ini mempertegas bahwa nilai sosial budaya dan sejarah masyarakat turut memainkan peran yang sentral dalam perkembangan sosial masyarakat. Krisis identitas karena pemaknaan hakikinya yang telah hilang memberi potensi ke arah konflik. Misalnya dalam kasus Pantura Jawa Barat, mitos kebanggaan sebagai keturunan nenek moyang yang mempunyai karakter pemberani Laskar Mataram, adanya tradisi minuman keras, serta permainan adu kekuatan atau tarung kekuatan yang dikemas dalam kesenian dan upacara tradisional (seperti buwahan, ngarot, kuda lumping, sempiong, satron/koprokan, ujugan). Tidak hanya tradisi yang berekses negatif, nilai sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai media penyelesaian konflik juga harus terus dipelihara, misalnya *brayan* (*barayaan*, persaudaraan) makan nasi tumpeng bersama dan tradisi *buwahan* yang diperluas jangkauan lintas desa. Nilai sosial budaya (tradisi ritual dan seni) memang memiliki potensi sebagai modal sosial karena sifatnya yang dapat memotivasi dan menumbuhkan perdamaian serta kondusif menggalang

dan menumbuhkan kerja sama, tanggungjawab, menyelesaikan masalah bersama, meluaskan jaringan hubungan sosial, rasa solidaritas sosial dan kejujuran.¹⁴ Sampai tataran ini pendekatan budaya dapat dijadikan andalan dan tumpuan dalam upaya memelihara dan mencegah konflik. Kita harus cermat memperlakukan budaya-budaya yang telah tumbuh sejak zaman nenek moyang. Jangan sampai budaya leluhur justru menjadi pemicu munculnya konflik. Budaya harus diberdayakan sebagai alat untuk membangun sikap toleransi, menghormati, dan damai.

C. KONFLIK ETNIS

Menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, Indonesia dirundung duka dengan pecahnya konflik di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Kalimantan Barat memiliki sejarah konflik antar-etnis yang panjang. Kebanyakan konflik di daerah ini melibatkan dua suku: Dayak (pribumi) dan Madura (pendatang) di samping etnis kesukuan lain seperti Melayu dan Cina yang juga merupakan pendatang. Dengan kata lain, konflik tidak hanya terjadi antara kelompok pendatang

¹⁴ <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>.

dan pribumi, namun juga antar-pendatang. Beberapa tragedi konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat antara lain:¹⁵

NO	KASUS	PELAKU
1	Kasus 1952 antara Madura dan Dayak	Pendatang dan pribumi
2	Pengusiran orang Cina oleh Dayak pada 1967	Pendatang dan pribumi
3	Kerusuhan antara Madura dengan Dayak pada 1979 di Samalantan	Pendatang dan pribumi
4	Konflik antara Madura dengan Dayak pada 1983	Pendatang dan pribumi
5	Peristiwa Sanggau Ledo pada 1997 berupa kerusuhan antara Dayak dengan Madura	Pendatang dan pribumi
6	Konflik Samalantan pada 1998 yang melibatkan Madura dan Dayak	Pendatang dan pribumi
7	Kasus Sambas tahun 1999 yang menjadi perang terbuka antara Madura dengan Melayu	Antar pendatang
8	Peristiwa 25 Oktober 2000 berupa kerusuhan antara Melayu Pontianak dengan Madura.	Antar pendatang

¹⁵ Diolah dari Syarif Ibrahim Alqadrie, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 106-108, dan Munawar M. Saad, *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*, http://insankampus.blogspot.com/2008/12/sejarah-konflik-antar-suku-di-kabupaten_09.html, diakses pada 5 Desember 2014. Bahkan menurut Alqadrie sejak 1963 berdasarkan catatan resmi Kapolda Kalbar, kasus perselisihan, antagonisme, dan konflik antar kelompok anggota masyarakat telah terjadi setidaknya sampai 12 kali.

Data di atas menunjukkan bahwa konflik di wilayah ini tidak hanya terjadi pasca Orde Baru runtuh, namun sebelum itu pun konflik beberapa kali pecah. Karenanya beberapa ahli melihat konflik ini dari beberapa sisi. Apa yang salah dengan daerah ini menjadi kajian yang menarik, mulai dari penguatan identitas kesukuan, perebutan sumber daya ekonomi, ketimpangan, sampai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait proses pembauran pendatang dan pribumi. Gerry van Klinken mencatat, dari sekian kasus yang terjadi terdapat dua peristiwa konflik komunal yang penting untuk dicatat karena memakan korban yang tidak sedikit baik yang meninggal maupun yang terusir. *Pertama*, kasus di awal tahun 1997 yang menurutnya memakan korban sampai 500 jiwa melayang dan 20.000 pendatang asal Madura terusir sesuai data dari Human Rights Watch. *Kedua*, kasus di tahun 1999 yang memakan korban jiwa lebih sedikit akan tetapi jumlah orang Madura yang diusir membengkak sampai dengan 60.000 sesuai data dari Norwegian Refugee Council.¹⁶ Kasus pertama dan kedua memiliki pola yang hampir sama, yaitu pembakaran rumah, pembunuhan, dan mengusir secara massal. Targetnya pun sama, yaitu kelompok etnis Madura walaupun pelakunya berbeda, yaitu etnis Dayak sebagai pendatang di kasus pertama dan etnis

¹⁶ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 90-91.

Melayu yang sama-sama sebagai pendatang di kasus kedua. Van Klinken memandang bahwa kasus kedua dilakukan secara lebih terorganisir daripada kasus yang pertama dan tampak seperti kasus pengulangan yang disengaja dari kasus yang pertama.¹⁷ Bahkan sampai sekarang tidak sedikit dari anggota etnis Madura yang tidak bisa kembali ke Kalimantan Barat karena etnis Melayu belum bisa menerima mereka.¹⁸

Dari semua konflik di Kalbar yang meletus pada 1999 dan berlanjut pada 2000, melibatkan dua komunitas etnis pendatang yang awalnya berhubungan cukup mesra, khususnya di wilayah kota Pontianak, kabupaten Ketapang, dan wilayah pantai kabupaten Pontianak. Di samping karena karakter etnis Melayu yang tidak pernah terlibat konflik berdarah dengan komunitas ataupun etnis lain,¹⁹ juga karena etnis Melayu dan Madura memiliki kedekatan dari afiliasi agama mereka, yaitu Islam. Bagaimana kemudian dua komunitas yang sama-sama pendatang dan memiliki kedekatan dapat terlibat dalam konflik berdarah? Beberapa analisa pun diungkapkan. Misalnya Syarif Ibrahim Alqadrie

¹⁷ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 91.

¹⁸ Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

¹⁹ Bahkan Alqadrie mengatakan bahwa ada kesan bahwa orang-orang Melayu selalu menghindari bentuk antagonisme dan konflik apapun. Lihat Syarif Ibrahim Alqadrie, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat", h. 108

yang menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini muncul, mulai dari persaingan sosial-ekonomi antar-komunitas yang tidak seimbang, premanisme dan kriminalitas, kebijakan pemerintah pusat, sampai dengan ketidakberdayaan aparat penegak hukum.²⁰ Sementara itu sebagaimana dipercaya oleh Ichsan Malik bahwa akar konflik tidak tunggal,²¹ John Bamba juga menekankan adanya 3 faktor dari kelompok-kelompok yang bertikai, yaitu perebutan atas pengelolaan sumber daya, kekuasaan ekonomi dan politik, dan tidak adanya penegakan hukum.²²

Konflik antara dua komunitas pendatang ini juga sekaligus membantah anggapan bahwa konflik antara etnis Dayak dan Madura disebabkan oleh bangkitnya tradisi *Pengayauan* (berburu kepala manusia) yang dipicu oleh perbedaan agama. Mayoritas Dayak beragama Kristen sementara Madura merupakan komunitas Muslim. Anggapan seperti ini serta-merta runtuh dengan pecahnya konflik 1999 khususnya di Sambas. Bamba menegaskan dua alasan penting untuk mendukung pendapat ini. *Pertama*, etnis

²⁰ Syarif Ibrahim Alqadrie, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di KalimantanBarat", h. 108-109.

²¹ Wawancara dengan Ichsan Malik.

²² John Bamba, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina, dan Papua New Guinea*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Uin Jakarta dan European Center for Conflict Prevention (ECCP), h. 57-58.

Melayu tidak memiliki sejarah tradisi Pengayauan. Pengayauan hanya dimiliki oleh etnis Dayak. *Kedua*, dua komunitas ini sama-sama memeluk agama Islam.²³ Karenanya apakah konflik antara Dayak dan Madura sebelum 1999 adalah konflik bernuansa agama dengan sendirinya terbantahkan dengan meletusnya konflik tahun 1999 dan diikuti dengan konflik tahun 2000.

Kasus yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu di Sampit pada 18 Februari 2001 dan Palangkaraya pada 25 Februari 2001. Konflik di daerah ini juga melibatkan etnis Dayak dan Madura sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Barat. Konflik diawali dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh kelompok suku Madura terhadap suku Dayak. Dalam peristiwa penyerangan tersebut 7 orang suku Dayak dan 5 orang Madura meninggal. Akibat dari penyerangan tersebut, terjadi serangan balasan dari suku Dayak terhadap suku Madura yang memakan korban sebanyak 87 orang meninggal yang sebagian besar berasal dari suku Madura. Polda Kalteng merinci korban kerusuhan di Kalteng adalah 388 orang (164 diantaranya tanpa kepala)²⁴ dari suku Madura dan dari suku Dayak hanya 16 orang meninggal serta 2 orang suku Banjar. Sementara itu

²³ John Bamba, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?", h. 57.

²⁴ Pola inilah yang kemudian dicurigai oleh beberapa pengamat sebagai bangkitnya tradisi *Pengayauan* yang sebenarnya telah musnah di awal abad ke-20 sebagaimana disebutkan di atas.

kerugian material sebanyak 1.234 rumah dibakar dan 748 rumah dirusak. Tercatat pula sebanyak 65.134 orang Madura eksodus dan dievakuasi ke Surabaya.²⁵ Konflik ini bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura walaupun skalanya kecil. Misalnya, di tahun 1983 seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh dalam kasus pengeroyokan oleh 30 orang Madura, di tahun 1997 orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura di Barito Selatan namun orang Maduralah yang justru tewas, tahun 1998 orang Dayak dikeroyok oleh empat orang Madura hingga meninggal di Palangkaraya.²⁶

Lagi-lagi beberapa penjelasan mengenai latar belakang yang menyebabkan konflik etnis di Kalteng dapat terjadi tidak melulu karena faktor kebencian dan permusuhan antar-etnis. Faktor ini memang ada akan tetapi banyak pula kalangan yang melihat sisi lain mengapa ini bisa terjadi. Misalnya karena faktor persaingan atas penguasaan sumber daya. Etnis Madura yang pertama kali tiba di Kalimantan pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah pada tahun 2000. Namun Suku Dayak merasa tidak puas dengan

²⁵ http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_konflik-poso-sampit.html, diakses pada 5 Desember 2014.

²⁶ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>, diakses pada 6 Desember 2014.

persaingan yang terus datang dari warga Madura yang dianggap semakin agresif. Warga Madura makin memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di daerah ini seperti perikanan, pertambangan, dan perkebunan.²⁷ Lebih jauh lagi ICG dalam laporannya menyebutkan akar konflik yang berasal dari kegagalan proses transmigrasi yang melupakan aspek pembauran, etnis Dayak yang justru merasa menjadi minoritas di daerahnya sendiri karena banyak tanah mereka yang hilang dan mereka harus menepi dan terpinggirkan dari pusat perkotaan, akses ke pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang, dan penegakan hukum yang lemah.²⁸

D. KONFLIK BERNUANSAGA AGAMA

Walaupun secara resmi hanya ada enam agama yang diakui, sejatinya negeri ini sejak zaman dulu kala telah memiliki tradisi spiritualitas yang sangat kaya dan beragam. Pengakuan terbatas atas Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu seringkali mengundang polemik. Kebijakan menyangkut "6 agama resmi" ini sering dianggap sebagai upaya memarjinalkan agama lain yang eksis di

²⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>.

²⁸ Lihat ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan*, Laporan ICG Asia N°19, Jakarta-Brussels, 27 Juni 2001. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Thamrin Amal Tomagola, lihat <http://tehmanisenak.wordpress.com/2011/12/04/konflik-sampit-dalam-perspektif-sosiologi/>, diakses pada 6 Desember 2014.

Indonesia khususnya agama lokal yang biasa disebut aliran kepercayaan. Dalam laporan ICG, misalnya, disebutkan bahwa salah satu penyebab konflik antar-etnis di Kalimantan selain soal etnisitas dan budaya yang terpinggirkan, juga karena agama asli mereka, Kaharingan, terpinggirkan. Sampai sekarang agama Kaharingan masih dianut oleh suku Ngaju yang merupakan komunitas dominan dalam etnis Dayak. Bahkan anggota suku Dayak yang telah memeluk Islam dan Kristen pun tak lepas dari pengaruh Kaharingan. Pada kenyataannya, agama ini di masa Orde Baru dianggap sebagai agama Hindu karena memiliki kedekatan dalam praktik dan kepercayaannya walaupun Kaharingan sejatinya bukanlah Hindu. Karenanya di tahun 1999 statistik resmi menunjukkan jumlah penganut Hindu mencapai 195.646 jiwa.²⁹

Sosiolog Prancis, Emile Durkheim, menengarai bahwa agama dalam tingkat sosial dapat berfungsi sebagai alat integrasi kelembagaan masyarakat. Akan tetapi, fungsi agama sebagai integrasi kelembagaan masyarakat pada tingkat individu bukannya tidak pernah menimbulkan masalah.³⁰ Kasus Kalimantan dapat menjadi contoh untuk analisa Durkheim. Semangat kebersamaan dalam ikatan yang sama dalam sebuah institusi agama juga sangat mungkin

²⁹ ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia*, h. 27

³⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj., (Jakarta Gramedia, 1986), Jilid I, h. 166.

mengakibatkan konflik. Ambon dan Poso bergejolak dengan pengerahan massa yang luar biasa dari luar dua kota ini atas nama agama yang sama sehingga justru memperparah situasi konflik yang pada gilirannya mengubah pola dan peta konflik. Karenanya konflik di dua daerah ini banyak dianggap sebagai konflik antar-agama.³¹ Dalam bahasa Durkheim, heterogenitas dan individualitas yang semakin besar menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.³² Di satu sisi masyarakat tidak dapat lepas dari heterogenitas namun di sisi lain individualitas makin menguat. Individualitas tidak hanya dimaknai sebagai perseorangan namun juga individualitas kelompok-kelompok yang merasa memiliki persamaan, mengalami perjumpaan, dan mengental dalam institusi baik formal maupun informal. Bahkan dalam institusi yang sama pun konflik dapat muncul. Perebutan otoritas atas tafsir agama seringkali menjebak pemeluknya dalam konflik di antara satu pemeluk agama, misalnya dalam Islam konflik antara Syiah dan Sunni. Contoh lain adalah Ahmadiyah yang dikategorikan sebagai aliran sesat karena dianggap telah melenceng dari penafsiran Islam *mainstream* dengan menganggap masih ada Nabi setelah kenabian Muhammad. Fatwa sesat ini kemudian memancing berbagai

³¹ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 13.

³² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, h. 169.

aksi kekerasan sampai pembunuhan terhadap komunitas Ahmadiyah di beberapa daerah.

Di Poso terdapat dua agama besar yang dianut oleh mayoritas warga yaitu Kristen dan Islam. Sebelum pemekaran, Poso dihuni oleh mayoritas Muslim. Namun pasca pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una, Poso didominasi oleh komunitas Kristen. Konflik Poso berawal dari praktik politik pemilihan Bupati pada Desember 1998 yang disisipi sentimen keagamaan. Sebenarnya, sebelum itu pun Poso mengalami ketegangan antara komunitas Kristen dan Muslim pada tahun 1992 dan 1995. Ketegangan di tahun 1992 dipicu oleh tindakan seorang mantan Muslim yang menghujat Islam. Sementara ketegangan di tahun 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejo oleh sekelompok pemuda Kristen desa Mandale. Peristiwa ini menimbulkan balasan dari pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Untungnya kala itu kerusuhan dapat diredam oleh aparat keamanan sehingga tak sampai menjalar dan berlarut-larut.

Ketika Orde Baru runtuh dan posisi aparat keamanan melemah seiring dengan gugatan atas peran mereka dalam berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus secara lebih masif dan beruntun. Awal kerusuhan terjadi pada Desember

1998 diikuti pada April 2000, Mei-Juni 2000, Juli 2001, dan yang kelima pada November 2001. Karenanya peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian yang disebut jilid satu sampai dengan jilid lima dengan intensitas yang berbeda.³³ Sejatinya Konflik Poso yang telah meninggalkan trauma psikologis lagi-lagi ternyata hanya disulut oleh persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antar-pemuda. Solidaritas kelompok memang muncul dalam kerusuhan itu, namun konteksnya masih murni seputar dunia remaja, yakni isu minuman keras (miras) atau isu tempat maksiat. Namun justru persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh kelompok tertentu melalui instrumen isu pendatang versus penduduk asli dengan varian sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultur, ekonomi, dan politik yang diakibatkan dari adanya pergeseran atas penguasaan sumber daya. Ujungnya, konflik diradikalisasi dengan bungkus ideologis keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran dalam skala kecil berubah menjadi perang saudara.³⁴ Proses ke arah pengentalan konflik bernuansa agama ini tampak misalnya dalam Buletin Laskar Jihad Ahlus Sunah wal

³³ Arianto Sangaji, "Aparat Keamanan dan Kekerasan Regional di Poso", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 342. Lihat juga di Hamdan Basyar (ed.), *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-pola Alternatif Penyelesaiannya* (Jakarta: P2P LIPI, 2003).

³⁴ <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>, diakses pada 6 Desember 2014.

Jama'ah edisi X yang menekankan pada isu "Konflik Poso adalah Konflik Agama".

Banyak kalangan justru meragukan agama sebagai faktor utama penyebab meletusnya konflik. Walaupun demikian konteks pergeseran komunitas keagamaan di masa Orde Baru juga diyakini turut menyumbang benih ke arah konflik. Di masa kolonial, Belanda memfasilitasi penyebaran Kristen dalam bentuk dukungan finansial di Poso walaupun sebenarnya ini merupakan taktik untuk membentengi aksi-aksi pembangkangan kelompok Islam. Politik agama warisan kolonial akhirnya membangun *image* bahwa Poso identik dengan komunitas Kristen termasuk dalam birokrasi yang didominasi oleh warga Kristen. Namun, di era kemerdekaan fakta keagamaan itu mengalami proses pembalikan. Jika tahun 1938 jumlah umat Kristen Poso mencapai angka 41,7%, lalu menurun sampai 30-an persen.³⁵ Sementara pada tahun 2001 populasi Kristen hanya sampai pada angka 34,36% dan Katolik yang hanya 0,52%, sedangkan Islam mencapai 62,82%.³⁶ Konstelasi sosio-ekonomi dan politik kultural terpengaruh oleh realitas perubahan komposisi komunitas ini.

³⁵ <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

³⁶ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, h. 67.

Pembangunan jalan Sulawesi dari Palopo ke Palu lewat Tentena dan Poso turut membawa implikasi bagi kian cepatnya proses migrasi pendatang muslim yang masuk ke wilayah basis Kristen. Misalnya, para politisi Muslim pada tahun 1998 secara strategis bisa menggalang suara dalam kompetisi menyangkut agama. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi makin mengubah peta demografi Poso menjadi kelompok suku-suku dan agama-agama dimana orang Protestan naik ke wilayah gunung dan berpusat di kota misi Tentena, sementara orang Islam memilih wilayah pesisir dan terpusat di kota Poso.³⁷Fakta pergeseran komunitas keagamaan ini pada akhirnya memang berpengaruh pada konstelasi politik Poso. Dengan digalakkannya program pendidikan di era Kemerdekaan, kaum terdidik dari kalangan Muslim pun bermunculan dan berikutnya mulai ikut bersaing dalam lapangan birokrasi yang awalnya dikuasai oleh komunitas Kristen. Di sinilah politik komunitas keagamaan mulai bermain dalam dunia kepegawaian. Kalangan Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan Islam. Jabatan strategis yang semula didominasi Kristen, secara alamiah terjadi peralihan ke kelompok Muslim.

³⁷ Lorraine V. Aragon, "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 57.

Dalam situasi inilah politik agama dalam konteks birokrasi kepegawaian mulai merasuk dalam kehidupan masyarakat Poso. Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persaingan politik birokrasi—lengkap dengan imbasnya berupa pembagian berbagai proyek pada orang-orang dekat—telah menjadi wacana penting dalam mencermati konflik Poso. Dari sini tampaklah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang sejatinya sangat kompleks dengan melibatkan elemen-elemen birokrat, para pelaku ekonomi, disamping kelompok kultur keagamaan, yang pada gilirannya melibatkan pula kekuatan-kekuatan dari luar Poso dengan segala kepentingannya, mulai dari para laskar, aparat keamanan, birokrat pada level provinsi ataupun pusat yang memanfaatkan persoalan Poso untuk berbagai macam kepentingan.³⁸ Tidak lupa pula bahwa faktor etnisitas yang mengental menjadi keagamaan turut berperan dalam persaingan menguasai sumber daya antara penduduk yang sudah lama menetap di Poso dan yang datang belakangan. Identitas etnis yang dipengaruhi oleh agama yang dipeluk juga turut menjadi pencetus konflik.³⁹

Dengan pola yang hampir sama juga ditemukan pada kasus Ambon dimana Muslim dan Kristen terlibat dalam konflik berdarah dan memakan korban yang tidak sedikit. Keduanya

³⁸ <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

³⁹ Lorraine V. Aragon, "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", h. 61.

(kasus Poso dan Ambon) ditutup dengan Perjanjian Malino. Sebelum Ambon membara pada 19 Januari 1999, sekitar bulan Juni 1998 sebenarnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) sudah memperingatkan bahwa Ambon adalah tempat dimana suatu kelas menengah Muslim yang tengah naik daun dan menjadi bagian dari organisasi-organisasi seperti ICMI bisa menimbulkan friksi dengan orang-orang Kristen.⁴⁰ Situasi ini memperuncing perebutan area birokrasi yang awalnya dikuasai oleh komunitas Kristen. Maka dalam konteks ini, mental *ambtenaar* (anti kerja kasar dan berorientasi ke birokrasi) orang Ambon yang mengandalkan birokrasi sebagai penghidupan menjadi salah satu faktor utama pemicu konflik.⁴¹ Pergeseran sosial di Ambon dengan varian agama sebenarnya tidak hanya terjadi di era Orde Baru namun sejak sebelum era kolonial.⁴² Segregasi keagamaan berdasarkan garis kewilayahan memang telah membudaya dari dulu di Maluku. Dari sini lahirlah komunitas Pata Siwa yang identik dengan pemeluk Kristen dan Pata Lima yang identik dengan pemeluk Islam. Islam sudah masuk terlebih dahulu dengan pengaruh dari Kesultanan Ternate sementara Kristen masuk kemudian berbarengan dengan masuknya kolonialisme. Kondisi ini melahirkan

⁴⁰ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 158.

⁴¹ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 158.

⁴² John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 166.

kerinduan untuk perjumpaan sehingga lahirlah *Pela Gandong*.

Sebelum penjajah (Portugis dan Belanda) membawa masuk misi Gospel ke kepulauan Maluku, Islam sudah ada terlebih dahulu. Maluku Utara berpenduduk mayoritas Muslim sementara Maluku (Selatan) mayoritas Kristen (Protestan). Saat menguasai wilayah Maluku, Belanda tak lupa melancarkan strategi *divide et impera*-nya. Perlakuan diskriminatif diterapkan terhadap dua kelompok warga Ambon yang berbeda agama. Warga Kristen mendapatkan keistimewaan dalam pendidikan dan kemudahan untuk bekerja di birokrasi kolonial Belanda daripada warga Muslim. Maka di masa kolonialisme mayoritas Ambon Muslim mempunyai status ekonomi lebih rendah daripada Ambon Kristen.⁴³ Perlakuan diskriminatif ini menyisakan *stereotype* bahwa Ambon Kristen bermental *ambtenaar* dan menguasai sektor pemerintahan dan pendidikan, sementara Ambon Muslim tipe pekerja keras dan sedikit yang menguasai sektor perekonomian. Namun peta sosial mengalami pergeseran manakala secara kuantitas Muslim meningkat akibat gelombang migrasi kaum pendatang (Muslim) khususnya Bugis-Buton-Makassar (BBM) dan Jawa pasca kemerdekaan,

⁴³ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 165-166.

dan terutama setelah tahun 1970-an.⁴⁴ Mereka berhasil menguasai sektor ekonomi dan banyak memasuki bahkan menguasai wilayah birokrasi dan pemerintahan. Misalnya di era 1990-an dua gubernur dijabat dari kelompok Muslim. Isu yang beredar, mereka mendistribusikan kekuasaan atas dasar agama dan bukan kompetensi. Dari sinilah Islam mulai dilihat sebagai ancaman. Di pihak lain di kalangan Muslim juga merasakan ketidakpuasan dengan dominasi Kristen yang sangat kuat, misalnya di Universitas Pattimura (UNPATTI).⁴⁵ Bahkan Thamrin Amal Tomagola dengan berani mengatakan bahwa konflik turut dilatarbelakangi oleh kekecewaan warga Kristen yang pelan-pelan kehilangan pengaruh dalam birokrasi.⁴⁶ Situasi ini semakin mengukuhkan indikasi bahwa dengan kompleksitas yang terus tumbuh, nyatanya Ambon tidak berkembang dalam lingkungan sosial yang terintegrasi.⁴⁷

Konflik selalu bersifat multivarian, tidak dapat dilihat dari satu variabel saja. Perasaan terancam kelompok mayoritas oleh minoritas yang makin menggeliat dan menguasai arena

⁴⁴ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 166. Lihat juga Iwan Gardono Sudjarmiko, "Communal Conflict , State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia", dalam Giuseppe Caforio et al., *Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives*, (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2008), h. 351.

⁴⁵ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 166-167.

⁴⁶ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, h. 169.

⁴⁷ Iwan Gardono Sudjarmiko, "Communal Conflict , State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia", h. 352.

yang semula dikuasai mayoritas tampak dalam kasus-kasus konflik sosial baik dengan varian etnis maupun agama. Merujuk pada teori balapan (*racing theory*) Schrieke, kondisi seperti ini dapat dibaca sebagai sebuah balapan antara dua kelompok mayoritas dan minoritas atau pribumi dan pendatang. Schrieke menganggap Islam telah berhasil memenangkan kompetisi dari Kristen sekitar abad ke-16 M untuk mengambil hati penduduk Nusantara dengan lebih memilih untuk berpindah agama ke Islam daripada ke Kristen. Maka, teori ini menganggap bahwa penyebaran Islam di Nusantara lebih dipengaruhi oleh balapan antara Islam dan Kristen untuk berebut pengaruh sebagai kelanjutan dari Perang Salib di Eropa dan Timur Tengah.⁴⁸ Varian lain juga turut mewarnai misalnya kebijakan dari pusat ke daerah. Sistem kepemimpinan lokal semakin melemah pasca diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 terkait perubahan struktur dan sistem pemerintahan desa. UU ini telah melemahkan sistem dan pranata sosial lokal seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Azyumardi Azra, "1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?", dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Brill, 2008), h. 9-20. Walau demikian, Azra juga menyebutkan bahwa tidak sedikit kalangan yang meragukan teori ini, salah satunya Naquib Al-Attas. Al-Attas menolak anggapan bahwa kompetisi antara Islam dan Kristen telah mengakselerasi penyebaran Islam.

⁴⁹ Abidin Wakano, "Maluku dan Keindahan Sejarahnya, Harmoni Kehidupan Masyarakat Maluku yang Berbasis Kearifan Lokal", dalam Josep Antonius

Konflik komunal di Maluku berangkat dari kota Ambon yang notabene berpenduduk lebih plural daripada di desa-desa yang lebih tersegmentasi. Dalam komunitas perkotaan masyarakat Ambon yang terus berkembang lebih kompleks dan plural inilah fungsi institusi sosial seperti *Pela*, *Gandong*, dan *Famili* telah melemah. Institusi sosial ini tidak lagi adaptif dalam merespons dinamika sosial tersebut.⁵⁰

Di samping fakta konflik antar-agama yang terjadi, konflik di dalam satu agama pun kerap terjadi bahkan diikuti dengan kekerasan. Isu yang paling sering mengemuka berdasarakan hasil penelitian CRCS UGM adalah penodaan atau penyimpangan agama dan rumah ibadah.⁵¹ Kasus aliran-aliran sesat dalam agama hampir menjadi fenomena nasional walaupun kekerasan terjadi secara sporadis di daerah-daerah. Hanya selang beberapa hari setelah peluncuran Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2010 pada 1 Februari 2011, harapan bahwa pada 2011 kekerasan akan menurun langsung ambruk. Kasus lama terkait Ahmadiyah mencapai tingkat kekerasan baru dengan terbunuhnya tiga warga Ahmadiyah secara mengenaskan di Cikeusik, Banten, dan minggu berikutnya beberapa fasilitas

Ufi dan Hasbullah Assel, *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku* (Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng, 2012), h. 18.

⁵⁰ Iwan Gardono Sudjarmiko, "Communal Conflict, State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia", h. 353.

⁵¹ Zainal Abidin Bagir et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta: CRCS, 2012), h. 75.

publik, termasuk gereja, menjadi sasaran amuk massa di Temanggung setelah pengadilan terkait kasus penodaan selesai. Di penghujung tahun 2011, kekerasan lain dalam skala besar adalah pembakaran pesantren di Sampang, Madura, yang memaksa ratusan pengikut Syiah menjadi pengungsi.⁵² Sepanjang tahun 2011 SETARA Institute mencatat ada 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 299 bentuk tindakan, yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan. Ada 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45, Jawa Timur 31, Sumatera Utara 24, dan Banten 12 peristiwa.⁵³

Ihsan Ali Fauzi dan kawan-kawan dalam laporan penelitian tentang Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) tidak secara penuh menerima anggapan bahwa konflik sosial keagamaan seperti ini didasari atas rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik.⁵⁴ Aksi keagamaan termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan memang sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi

⁵² Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 326.

⁵³ Agnes Dwi R. et al., *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), h. 21.

⁵⁴ Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada(MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009), h. 7.

dan politik atau kekuasaan. Berbagai tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik. Misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai "ketaatan" terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas atau ideologi kekafiran atau kemurtadan yang menghalalkan darah si tertuduh murtad.⁵⁵ Agama sebagai doktrin perdamaian dalam praksis sosialnya mengalami paradoks interpretasi, sehingga kekerasan dianggap sebagai bagian titah agama. Maka penting dicatat bahwa pada akhirnya agama tidak hanya menyentuh dimensi keimanan tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagaimana telah banyak dibuktikan, konflik sosial-keagamaan amat rentan ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu. Walhasil yang terjadi sebenarnya bukan konflik agama melainkan konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.⁵⁶

⁵⁵ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", 320.

⁵⁶ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", 323.

E. AKAR-AKAR KONFLIK SOSIAL-KEAGAMAAN DAN TERGESERNYA NILAI-NILAI PANCASILA

Tujuh pimpinan lembaga negara, yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) pada Mei 2011 bertemu dan membicarakan soal penurunan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Bahkan dengan tegas Mahfud MD sebagai Ketua MK saat itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami keterpinggiran dari masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan munculnya persoalan di masyarakat seperti konflik kekerasan yang mudah dipicu oleh perbedaan latar belakang primordial. Lebih lanjut Mahfud MD menguraikan dampak lain dari keterpinggiran nilai-nilai Pancasila, yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kesantunan, toleransi, dan *tepa salira*. Pimpinan tujuh lembaga negara itu akhirnya menyetujui perlunya rencana aksi nasional untuk melakukan sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi. Bahkan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga sempat menyinggung

untuk kembali memasukkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.⁵⁷

Momentum pertemuan itu memperlihatkan kekhawatiran dari para pemimpin Indonesia terhadap fenomena konflik, khususnya konflik sosial-keagamaan, yang semakin memprihatinkan. Tergesernya nilai-nilai Pancasila menjadi hipotesis yang cukup kuat sebagai penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut.

Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yang oleh Yudi Latif disandarkan pada gagasan Soekarno, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, disebutnya ketuhanan yang berkeadaban.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, disebutnya kemanusiaan universal.
3. Persatuan Indonesia, disebutnya persatuan dalam kebhinekaan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, disebutnya demokrasi permusyawaratan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, disebutnya keadilan sosial.⁵⁸

⁵⁷ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan-konflik-agama-muncul>, diakses pada 4 Desember 2014.

Nilai-nilai dari lima sila inilah yang ditengarai telah tercerabut. Nilai ketuhanan tidak lagi mengindahkan keadaban sehingga kemanusiaan universal terpinggirkan. Kemanusiaan di antara anak bangsa tak lagi terhormat dan bernilai sehingga nyawa tak lagi berharga. Kebhinekaan yang seharusnya menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi luntur dalam satu warna darah. Perbedaan seperti barang haram di negeri ini. Permusyawaratan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi mempertemukan perbedaan menjadi barang langka. Yang tersisa adalah arogansi yang berubah menjadi hegemoni primordial yang harus dimenangkan. Kondisi ini diperparah dengan semangat keadilan yang hanya menjadi angan-angan. Keadilan sosial yang berarti adil bagi semua tanpa pandang bulu bermetamorfosa menjadi keadilan hanya milik segelintir orang atau pihak.

Pancasila adalah dasar negara yang berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat bersamaan, ia juga sebagai ideologi bangsa yang berperan sebagai ajaran dan ilmu yang tersusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menyelesaikan

⁵⁸ Baca Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁹ Pancasila bukanlah rumusan yang tidak berdasar dan asal-asalan. Sila-silanya merupakan rumusan perasan dari nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa ini sejak lama.⁶⁰ Maka wajar bila nilai-nilai universal yang terkandung dalam lima sila Pancasila merupakan acuan bagi kita semua dalam hidup bermasyarakat. Namun nyatanya kita juga harus menyadari — suka ataupun tidak — bahwa sudah teramat banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Pancasila.

Nilai ketuhanan yang berkeadaban mengindikasikan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, nilai ketuhanan juga mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kebebasan untuk memeluk agama, rasa saling menghormati antar-pemeluk agama, tidak ada diskriminasi agama yang satu atas yang lain. Faktanya, kasus pembatasan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu masih saja ada. Konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Poso, Ambon, dan lain-lain menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya rasa saling menghargai perbedaan agama. Begitu pula kasus-kasus yang menimpa aliran-aliran keagamaan minoritas yang disingkirkan atau dianiaya. Tengoklah bagaimana saudara-

⁵⁹ http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html, diakses pada 6 Desember 2014.

⁶⁰ Wawancara dengan Yudi Latif, 2 Desember 2014.

saudara kita diusir karena dianggap tidak berhak hidup di atas tanah sendiri yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Warga Syiah di Madura harus menikmati hidup dalam pengungsian. Demikian pula dengan warga Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan nyawa pun melayang karena harus mempertahankan keyakinan dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Di sinilah nilai-nilai kemanusiaan universal dalam Pancasila tengah diuji.

Yudi Latif mengkhawatirkan perkembangan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang merupakan pancaran dari cara berketuhanan yang tidak lapang, tidak *rahman* dan *rahim*, hanya mengedepankan aspek formalistik legalistik, ketika melihat perbedaan langsung mengarahkannya kepada konflik. Sejak awal mereka melihat perbedaan sebagai garis pertikaian. Padahal hakekatnya setiap agama dipertemukan dengan kaidah "cintailah sesamamu bagaikan engkau mencintai dirimu sendiri". Konflik yang diakibatkan radikalisme dan fundamentalisme ini mengisyaratkan bahwa daya kemanusiaan dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) masih tumpul.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Yudi Latif.

Dari kaca mata sila ke-3, konflik sosial terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, namun justru mengembangkan model hidup yang monokultural. Idealnya sebagai bangsa yang multikultur, masyarakat seharusnya mengembangkan pola hidup dan pandangan multikultural juga. Kelompok-kelompok yang telah terpapar oleh fundamentalisme dan radikalisme, dalam konteks ini, pergaulannya cenderung tertutup. Konflik juga terjadi karena tidak jalannya demokrasi permusyawaratan. Ketika keterwakilan menyebabkan banyak pihak tidak bisa ikut berpartisipasi, maka mereka akan tersisih dan terkesan bagaikan penonton yang berteriak lebih nyaring untuk mendapatkan perhatian media. Kalau dibiarkan, kelompok ini akan berkembang dan menjadi radikal.⁶² Kasus Ahmadiyah di Kalimantan Barat dapat dijadikan contoh bagaimana komunikasi dengan bermusyawarah menjadi efektif dalam pencegahan konflik. Komunitas Ahmadiyah yang hanya sekitar 20 KK (Kepala Keluarga) di Kampung Anam pasca kasus Cikeusik saat itu merasa terancam. Namun peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan adat dalam menjaga sikap toleran dengan mengadakan dialog menjadi kunci aksi perdamaian -- kekerasan pun dapat diredam.⁶³

⁶² Wawancara dengan Yudi Latif.

⁶³ Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Pada sisi lain, konflik juga terjadi karena masalah ketidakadilan. Zona konflik yang tergolong sebagai zona kemiskinan dan tertinggal sebagaimana dirilis oleh Kemensos menunjukkan "Keadilan Sosial" belum terwujud. Pemerataan dengan semangat Sila Kelima Pancasila ini harus terus diupayakan. Dengan demikian, menyelesaikan konflik harus dilihat secara holistik dari lima sila Pancasila. Lima sila ini saling memperkuat menjadi *total factor* yang bila diabaikan salah satunya saja akan mampu meledakkan konflik. Konflik-konflik di negeri ini terjadi karena lima sisi ini tidak saling bertemu dan ditautkan. Agama tidak bertemu, keadilan tidak bertemu, birokrasi mulai tenggelam, ruang politik tertutup, dan sebagainya.⁶⁴

Sila ke-3 "Persatuan Indonesia" mengandung pesan pentingnya nasionalisme dan kebersamaan bagi bangsa ini. Konflik telah menghilangkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar-suku, ras, agama, golongan, maupun budaya. Sila kelima juga mempertegas makna kemakmuran yang seharusnya merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama. Pengabaian atas spirit sila ini akan menciptakan tumpukan rumput kering sehingga mudah terbakar.⁶⁵ Ini yang menjadi pondasi utama

⁶⁴ Wawancara dengan Yudi Latif.

⁶⁵ Wawancara dengan Ichsan Malik.

bagi proses pencegahan dan pembangunan perdamaian. Karena itu ideologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Tidak kurang pentingnya justru kandungan dari ideologi sendiri. Ideologi Pancasila memang dapat berfungsi sebagai perekat di antara anak-anak bangsa. Namun dengan syarat bahwa substansi dan kandungannya harus dijalankan dengan benar.⁶⁶ Maka lagi-lagi keadilan sosial menjadi prasyarat utama agar konflik tidak mudah pecah dan menimbulkan banyak korban. Aspek ini yang harus segera dibenahi oleh para pemangku kepentingan. Negara kita amat subur, dengan kekayaan alam yang melimpah, tapi sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Menilik kenyataan ini, kesadaran diri dengan sepenuhnya harus terus ditumbuhkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita dapat menemukan kembali (*reinventing*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, dan paradigma pembangunan.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Ichsan Malik.

⁶⁷ http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SYARAT BERINDONESIA

A. PENDAHULUAN

Para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) kita telah merumuskan Pancasila melalui usaha penggalan dan penyerapan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dan berkembang di bumi Nusantara. Nilai-nilai itu kemudian dikristalisasikan dan diberi konteks aktual dalam kehidupan bersama untuk menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila telah dimulai sejak tahun 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis di antara berbagai ideologi dan gerakan yang muncul di awal abad ke-20.

Setelah melewati rangkaian fase panjang, Pancasila akhirnya disepakati sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan. Sila-sila yang terkandung di dalamnya memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang apabila dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten

dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.¹

Soekarno menyebut Pancasila sebagai *dasar statis* atau *dasar dinamis* dimana nilai-nilai di dalamnya dicari dan digali dari dalam jiwa rakyat dan bangsa itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar bangsa yang dihuni oleh ragam perbedaan ini tidak rentan kandas. Lima sila yang disepakati sebagai fondasi bangsa itu menjadi penentu hidup matinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan benar-benar tumbuh dan mengakar dari jiwa rakyat. Ini berarti Pancasila tidak hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang, melainkan bagi seluruh warga negara agar bisa tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwanya sendiri, yaitu Pancasila.²

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan satu kesatuan, bukan lima dasar negara, tetapi satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur, sehingga susunannya tidak tunggal, tetapi majemuk tunggal. Kelima unsur tersebut bersama-sama merupakan bagian-bagian dari satu kesatuan keseluruhan, serta setiap bagian berhubungan satu sama lain, tidak terpisahkan, sehingga jelaslah bahwa dasar negara itu satu: Pancasila.

¹ Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.

² Pandangan Soekarno tersebut juga disinggung dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 14.

Kelima sila yang dikandung Pancasila tersebut saling terkait. Misalnya, manusia Indonesia yang berketuhanan akan saling mencintai, saling menghargai sesama manusia maupun sesama makhluk Tuhan, saling hormat-menghormati sesuai dengan hak dan harkat martabatnya. Manusia Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa saling menghargai perbedaan suku, adat istiadat, dan mempunyai persamaan cita-cita, satu kesatuan bangsa sebagai bangsa Indonesia.³

Sila Ketuhanan sebagai cermin keimanan dan ketakwaan, sangat terkait dengan keadilan dan keberadaban, persatuan, persamaan dan kebebasan, serta kesejahteraan. Oleh karena itu, Panca dan Sila dalam penulisannya pun tidak terpisah "Panca-sila", melainkan digabung menjadi satu "Pancasila," mengisyaratkan keterkaitan erat antara sila-sila yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Pancasila menjadi dasar pemerintahan, acuan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita bernegara.⁴

Sebagai acuan dan dasar pemerintahan, pengamalan nilai-nilai Pancasila akan terus diuji mengingat proses berbangsa dan bernegara yang tidak akan pernah berhenti dan selesai.

³ Noor Ms Bakry, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 99.

⁴ H. A. W Wijaya, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 61.

Karena konstruksi kebangsaan tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh dinamika sejarah. Benturan, gesekan maupun pertentangan merupakan hal yang niscaya yang kerap mewarnai dinamika tersebut. Pancasila sengaja dirumuskan dan disepakati untuk menjawab tantangan tersebut.

B. ORDE BARU DAN KEBEKUAN PANCASILA

Munculnya suara-suara penolakan terhadap Pancasila kerap terjadi karena Pancasila tidak didudukkan secara proporsional. Tidak sedikit anggota masyarakat yang belum dapat menempatkan dirinya sebagai warga negara (*citizen*), dan menerima Pancasila sebagai dasar negara karena kesulitan mencari titik temu antara Pancasila dengan nilai-nilai budaya, bahasa, dan agama yang mereka anut.

Akibatnya, alih-alih menerima Pancasila, mereka justru menggugatnya, bahkan mengkambinghitamkan Pancasila sebagai penyebab kemacetan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan selama ini.⁵ Gelombang penolakan terhadap Pancasila semakin mengemuka setelah tumbangny rezim Orde Baru yang disusul oleh lahirnya era reformasi.

⁵ Rikard Bagun, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2010), h. xix.

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa sebagian masyarakat saat ini cenderung menolak Pancasila. *Pertama*, trauma Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap anti-Pancasila, mengancam Pancasila dan tidak mengamalkan Pancasila. Sehingga setelah sekian tahun Pancasila dipaksakan menjadi sebuah ideologi represif, saat memasuki era reformasi masyarakat kemudian merasakan trauma, bahkan dendam terhadap cara-cara Orde Baru tersebut. Akhirnya Pancasila tidak lagi diwacanakan baik di dalam diskursus politik, sosial, budaya, bahkan juga pendidikan.⁶

Pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila mempunyai dua kelemahan yang cukup serius. *Pertama*, merujuk pada "buku" Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan semua butir yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang menyangkal rumusan itu cukup baik. Namun yang menjadi persoalan adalah rumusan yang dihasilkan rezim tersebut tidak dapat digunakan untuk mengkritik dan mengontrol pemerintah sendiri, sehingga rezim menjadi otoriter.

Kedua, lebih gawat lagi, adalah wacana Pancasila di era Orde Baru yang selalu digunakan untuk menghantam

⁶ Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, PP Muhammadiyah, Jakarta, 04 Desember 2014.

kekuatan-kekuatan kritis. Pancasila menjadi kata sandi yang sering tanpa disadari digunakan untuk melegitimasi kebijakan Orde Baru yang sebenarnya sama sekali tidak identik dengan nilai-nilai Pancasila. Penindasan hak-hak politik sekelompok masyarakat di era Orde Baru semata-mata karena Orde Baru merasa terancam. Tindakan represif yang ditempuh untuk meredam mereka yang dianggap menentang seakan-akan dilegitimasi oleh Pancasila. Dampaknya, Pancasila menjadi nama pejoratif untuk segala tindakan yang buruk, rendah, dan banal alias tidak bermanfaat. Sebagian masyarakat kemudian menjadi ragu dan salah paham. Padahal, yang buruk dan rendah itu bukanlah nilai-nilai Pancasila, melainkan penyalahgunaannya.⁷

Dampak yang ditimbulkan dari cara-cara tersebut adalah Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihilangkan dari kurikulum sekolah karena faktor "trauma" yang dibumbui dendam, diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Ideologi-ideologi bawah tanah tertentu yang sebelumnya dilarang kemudian mendapatkan kanalisasi untuk tampil kembali melalui berbagai bentuk seperti politik politik, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan-gerakan sosial yang bersifat sporadis.

⁷ Franz Magnis-Suseno, "Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa," Prisma Vol. 28, No.2, Oktober 2009, h.58.

Kedua, masyarakat cenderung tidak lagi menganggap penting Pancasila. Sekat-sekat kehidupan yang terbuka mendorong kelompok kedua ini cenderung tidak terlalu terikat dengan negara. Di kalangan Muslim, kelompok pertama yang tidak menganggap penting negara, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok-kelompok lain yang selama ini tetap bersemangat mengusung isu-isu *khilafah*. Kedua, kelompok-kelompok Islam yang memang tidak menginginkan Pancasila tetapi menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berdasar pada agama. Misalnya usaha-usaha kelompok tertentu yang berusaha menggeser dasar negara yang disepakati dengan mengusung cita-cita tegaknya Negara Islam.

Ketiga, adalah kelompok yang beraliran politik pragmatis yang berpandangan bahwa ideologi negara tidak penting. Kelompok ini biasanya bersikap abai untuk menyerap dan memahami ideologi suatu negara karena tujuan utama mereka meraih kemakmuran. Mereka cenderung menjadi kelompok pragmatis dengan menyebut dirinya sebagai warga negara global (*global citizen*) bukan *citizen of particular nation*. Mereka juga berasumsi apa susahnyanya menjadi Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, toh bisa secara langsung memutuskan untuk pindah ke negara lain jika memang tidak nyaman tinggal di negara yang mereka diami.

Kelompok yang paling mengancam dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mereka yang menggunakan gerakan politik-keagamaan yang sudah dirancang dengan sangat kuat secara sistematis dan terorganisir. Konflik kemudian muncul ke permukaan ketika mereka berusaha memperjuangkan apa yang mereka yakini bahkan dengan cara anarkis.⁸ Jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam rasa persaudaraan, kerukunan antarumat beragama dan NKRI, bahkan bisa dipastikan bahwa gerak bangsa ke depan menuju ke arah negara gagal (*failed state*).

C. PANCASILA DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL-KEAGAMAAN

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi acuan dalam kehidupan bernegara atau sebagai basis moralitas kebangsaan-kenegaraan. Namun, kelima sila yang dikandungnya dapat menjadi “paradigma” untuk mendeteksi gejala penyakit sosial yang memicu munculnya konflik sosial-keagamaan. Ledakan konflik di Indonesia khususnya terjadi karena lima unsur yang dikandung Pancasila tersebut tidak terpenuhi.

⁸ Wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 04 Desember 2014.

Sebut saja fenomena munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang merupakan refleksi dari cara beketuhanan yang tidak lapang dan memancar dari proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang tanpa belas kasih (*rahman* dan *rahim*). Tentu ada yang salah dengan cara pandang ketuhanan kelompok tersebut sehingga memunculkan sikap eksklusif dengan tabiat yang keras dan kasar.

Perpecahan dan gesekan dalam masyarakat juga terjadi karena keringnya nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang ditandai oleh matinya nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menyumbat nilai-nilai keadilan. Hal ini membuat cita-cita "Persatuan" sulit diwujudkan karena kemanusiaan yang "biadab" menelan rasa kemanusiaan yang "beradab." Kondisi demikian akan menciptakan atmosfir kehidupan yang rentan konflik antar-kelompok masyarakat.

Sedangkan gejala matinya sila "Permusyawaratan" ditandai oleh maraknya cara bergaul yang tertutup baik atas nama agama, etnis, politik dan budaya suatu kelompok masyarakat tertentu. Konflik sosial terjadi karena tersendatnya aliran demokrasi permusyawaratan yang menekankan aspek otoritarian dengan menekankan dominasi suara terbanyak. Permusyawaratan yang ditempuh dengan cara demikian

memicu munculnya kelompok-kelompok kecil karena tidak mempunyai ruang bersama. Kelompok kecil ini kemudian berusaha mencari perhatian dengan bersuara latang dan kerap menimbulkan ketersinggungan dan gesekan sosial.

Konflik sosial juga terjadi karena absennya nilai-nilai “Keadilan” yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama menyangkut soal ekonomi. Semangat toleransi akan meredup di tengah masyarakat yang hidup dalam himpitan ekonomi atau yang lebih populer dengan ungkapan, *no tolerance with empty stomach* (tak ada toleransi dengan perut kosong). Zona-zona konflik dan kekerasan kerap mengikuti zona-zona kemiskinan seperti yang terjadi di wilayah Banten dan Jawa Barat Selatan.⁹ Dalam beberapa kasus yang terjadi, konflik muncul saat terjadi pergeseran dalam penguasaan ekonomi suatu kelompok masyarakat antara *the rising middle class* dengan *middle class* yang mulai jatuh.

Dengan demikian konflik yang muncul di berbagai daerah harus dilihat dari banyak sudut pandang. Setiap konflik muncul dari akar yang berbeda yang tidak selalu pada agama. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, gesekan sosial menjadi tampak berdimensi agama karena melibatkan orang-orang yang beragama. Jadi,

⁹ Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

menyematkan agama sebagai satu-satunya varian dalam konflik kurang tepat karena tidak secara umum konflik itu bermuara pada agama *an sich*.

Potensi gesekan antar-kelompok masyarakat di masa depan diprediksi masih cukup besar. Kondisi yang demikian menuntut pula adanya gerakan besar yang bersifat kolektif agar nilai-nilai Pancasila mampu diserap dan dijiwai kembali oleh rakyat, utamanya pascareformasi. Mereka yang kecewa dan trauma untuk mencerna dan menginternalisasi ke dalam diri harus didekati kembali dengan cara-cara baru melalui berbagai pendekatan, baik politik, agama, maupun kebudayaan. Harus ada terobosan baru agar Pancasila terbatinkan ke dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia; Pancasila menjadi milik bersama dan menjadi identitas bersama seluruh tumpah darah Indonesia.

D. MEMBATINKAN PANCASILA DAN REKAYASA SOSIAL

Kata “membangkitkan”¹⁰ memiliki makna jauh lebih mendalam daripada sekadar “memasyarakatkan”, mengingat Pancasila dan nilai-nilainya sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat namun belum dibatinkan maupun dijiwai.¹¹

¹⁰ Kata “membangkitkan Pancasila” digunakan oleh Frans Magnis-Suseno pada wawancara di Jakarta, 26 November 2014.

¹¹ Hasil Survei Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan bahwa semakin hari masyarakat semakin mengenal Pancasila dan nilai-nilainya. Pada 2011 hanya 23%

Membatinkan nilai-nilai Pancasila agar meresap secara mendalam ke dalam tiap-tiap individu memerlukan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai upaya pencegahan ataupun mengurangi konflik sosial keagamaan.¹² *Sosial engineering* mengandaikan perubahan sosial yang direncanakan "*planned social change*" dengan melibatkan unsur-unsur yang memiliki kepentingan baik itu melalui gerakan budaya maupun politik. Suatu perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik tentulah membutuhkan model perubahan yang terencana.

Dalam dunia pemaknaan, *engineering* lebih dikenal sebagai sebuah diksi dari dunia sains dan teknologi. Istilah ini mengacu kepada suatu proses rancang bangun yang disengaja dan direncanakan dengan cara dan teknik tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil (berupa produk maupun karya) yang diinginkan. Dalam konteks sosial istilah *engineering* bisa dimaknai sebagai sebuah proses perancangan kondisi sosial seperti yang diinginkan. Misi dalam proses ini jelas, yaitu wujudnya kondisi sosial yang diharapkan. Keinginan untuk merancang kondisi sosial ini

dari penduduk Indonesia yang mengenal Pancasila, kemudian pada 2013 meningkat menjadi 48.1%. Tentu saja bila diadakan survei pada tahun-tahun ini atau tahun-tahun mendatang akan ada peningkatan terus-menerus. Lihat Laporan Akhir Survei Implementasi Empat Pilar dan Reformasi GBHN oleh CSRC UIN Jakarta dan MPR RI 2013.

¹² Wawancara dengan Franz Magnis-Suseno, Jakarta, 26 November 2014; wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 4 Desember 2014.

muncul ketika realitas yang ada tidak seperti apa yang diharapkan. Atau dalam kata lain terdapat *gap*, jarak antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi faktual. Dengan kondisi ini maka sebuah proses *engineering* dalam konteks sosial (yang bisa disebut juga sebagai *social engineering*) bisa disebut sebagai bagian dari disiplin aktivitas perubahan sosial. Maka sebuah "proyek" *social engineering* adalah sebuah proyek yang diluncurkan sebagai sebuah upaya untuk mengentaskan permasalahan sosial atau problem sosial keagamaan.¹³

Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Pancasila dalam upaya mengurangi konflik sosial keagamaan ataupun mencegahnya bisa dimulai dengan cara menafsir kembali nilai-nilai universal (*universal values*) yang dikandung Pancasila. *Universal values* tersebut dimaknai kembali agar terkoneksi dengan nilai lokal (partikular) yang tumbuh mengakar dalam masyarakat (daerah/wilayah) tertentu. Pasti ada benang merah untuk mengawinkan kedua nilai yang universal dan partikular tersebut karena Pancasila tidak diangkat dari nilai agama, budaya, suku atau etnis tertentu, sehingga masyarakat juga bisa menerima semua nilai di dalamnya. Nilai universal tidak boleh membunuh nilai-nilai

¹³ <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/2009/05/rekayasa-sosial-social-engineering.html>.

lokal berbasis kesukuan karena Indonesia ditunjang oleh suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara.

Saat ini yang paling mendesak ialah bagaimana universalitas yang dikandung Pancasila tersebut dikembangkan menjadi milik semua. Universalitas menjadi terinternalisasi dalam semuanya dan meresap melalui kontekstualisasi antara Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Munculnya konflik dan kekerasan bernuansa agama dan hilangnya rasa persaudaraan terjadi karena Pancasila belum bisa diinternalisasi maupun dibatinkan. Karena belum dibatinkan maka kebekuan pemahaman terhadap Pancasila bisa menutup jalan kerukunan dan persaudaraan. Masyarakat pun kerap mengalami kesulitan memahami nilai-nilai luhur Pancasila melalui budaya lokal yang mereka anut. Menjembatani nilai-nilai universal Pancasila dengan nilai-nilai partikular yang muncul dari budaya lokal memerlukan rekayasa (*engineering*) sosial, politik dan budaya.

Kemungkinan untuk menjembatani yang universal dengan yang partikular terbuka lebar. Di Medan misalnya, meskipun masyarakat di daerah tersebut hidup dalam suasana perbedaan (Islam dan Kristen), jarang terjadi konflik. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur yang menyatukan di dalam masyarakat yang memiliki latar agama yang berbeda

tersebut, baik itu berupa nilai-nilai “kewargaan” maupun unsur pemersatu lainnya yang dijiwai oleh semangat persaudaraan bermuatan lokal yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk memaknai nilai-nilai luhur Pancasila agar lebih melekat dengan masyarakat setempat, bahwa nilai-nilai persaudaraan, kerukunan dan persatuan yang menjadi acuan bersama di tengah masyarakat itu sejalan dengan Pancasila.

Begitu juga dengan “gotong royong” sebagai suatu frase yang berasal dari bahasa Jawa yaitu *ngotong* yang dalam bahasa Sunda juga berarti membawa sesuatu secara bersama-sama. Dalam bahasa Sunda gotong royong didefinisikan sebagai *gawé babarengan pikeun ngahontal tujuan anu ditangtukeun* (bekerja bersama demi mencapai tujuan yang ditentukan). Karena frase ini muncul dari tanah Jawa maka orang-orang di luar Jawa memiliki kecurigaan yang mengental melalui sentimen kedaerahan bercampur rasa cemburu. Orang di luar Jawa kemudian berasumsi bahwa ada upaya-upaya Jawanisasi melalui Pancasila mengingat gotong royong merupakan inti dari Pancasila. Sebagian dari mereka kemudian memilih bersikap abai dan enggan menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila bahkan bisa mengarah kepada dampak yang lebih jauh, yaitu menolak Pancasila untuk menjadi nilai bersama. Kondisi ini

menuntut adanya rekayasa sosial dengan kembali menyambungkan antara kedua nilai universal dan partikular yang terputus tersebut.

Terputusnya ataupun hilangnya hubungan (*missing link*) antara kedua nilai itu kerap terjadi karena tidak adanya upaya-upaya pemaknaan ulang. Misalnya, di tanah Sunda semangat gotong royong tercermin dalam "*sabilulungan*" yang merupakan wujud karakter budaya bekerjasama bisa tumbuh dalam setiap individu. Makna *sabilulungan* yaitu "seiya, se-kata, seayun selangkah, sepengetian sepemahaman, senasib sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedemikian erat dan kebersamaan." *Sabilulungan* dalam bahasa Sunda mengandung arti gotong royong yang merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat.

Istilah *sabilulungan* ini bagi masyarakat Sunda tentunya lebih dijiwai daripada "gotong royong". Dan nilai-nilai ini harus ditransformasikan agar masyarakat di sana mengetahui bahwa inti dari Pancasila adalah *sabilulungan* yang juga dikenal dengan gotong royong. Di sinilah ruang dan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila itu terjadi bahwa gotong royong yang menjadi ruh Pancasila juga mengadopsi

nilai budaya Sunda melalui *sabilulungan* tersebut sehingga mereka merasa memiliki Pancasila dan merasa tidak asing dengan nilai-nilai Pancasila. Potensi untuk membatinkan kembali Pancasila sangat besar karena sebagian masyarakat di sana sudah terlibat dalam kegiatan "Sabilulungan Bebersih Lembur" sebagai momentum yang tepat dalam rangka mendorong dan menumbuhkembangkan kesadaran bergotong-royong dan partisipasi aktif. Hal ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan aparat dengan masyarakat yang berlandaskan semangat *sabilulungan*.

Demikian pula dengan nilai-nilai musyawarah mufakat yang berkembang dalam budaya lokal Minangkabau yang terefleksi dalam pepatah "*Kok bulek lah dapek digolongkan, Kok picak lah dapek dilayangkan.*" Terjemahan bebasnya adalah, kalau sebuah keputusan telah menjadi mufakat dalam sebuah pengambilan keputusan, maka ia sudah bisa menjadi kebijakan yang diterapkan dalam aktivitas kehidupan bersuku, bernagari dan lainnya.¹⁴ Di Minangkabau berlaku prinsip musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan. Musyawarah diperlukan karena kebenaran bukan datang dari individu melainkan dari kumpulan individu dalam sebuah kelompok. Bagi mereka keputusan yang telah melalui tahap musyawarah untuk memperoleh mufakat

¹⁴ datuakrajotanjuang.wordpress.com/2011/04/14/kaum-dan-pesukuan/.

adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan didukung penuh oleh semua individu yang turut dalam bermusyawarah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pancasila juga menyerap nilai-nilai musyawarah yang berkembang di daerah tersebut dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Semangat yang sama tersebut tinggal dimaknai sehingga mereka juga merasa memiliki Pancasila. Tentu hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak sebagaimana didedahkan berikut ini.

a. Pemerintah

Gagasan rekayasa sosial membutuhkan kebijakan besar dan harus ada gerakan (*movement*). Kebijakan besar tersebut harus dibuat oleh penyelenggara negara dalam bentuk aturan-aturan formal yang mampu mengikat semuanya. Rekayasa sosial tidak muncul begitu saja di tengah masyarakat. Ia harus digerakkan melalui dua arah: pertama, *top-down* (dari atas ke bawah) dan kedua, *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Gerakan *top-down* ditempuh melalui kelompok-kelompok kecil yang dikembangkan sebagai model untuk menciptakan sebuah situasi dan kondisi kultur yang mencerminkan pengamalan nilai. Di sini Pancasila dikembangkan sebagai "sistem nilai", bukan sebagai

“format nilai” yang kaku karena kerangkanya sudah dibentuk demi tujuan tertentu. Misalnya, butir sila pertama sudah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung kepentingan tertentu, sila kedua dengan butir yang sudah disiapkan, dan seterusnya. Kelima sila tersebut kemudian dipolitisasi demi kepentingan sendiri sebagaimana Pancasila masa Orde Baru.

Hal ini sangat berbahaya dan harus dihindari dengan cara menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, sehingga ada keterlibatan semua kelompok dengan berbagai latar belakang untuk membuat kerangkanya. Tetap ada ruang dimana masing-masing kelompok dapat bergerak dan menafsirkan Pancasila sesuai dengan nilai yang telah mereka miliki, baik nilai adat, budaya, maupun agama. Dalam konteks ini misalnya, sila “Persatuan Indonesia” bisa dimaknai gotong royong. Pada konteks Sumatera, misalnya, muncul semangat gotong royong dengan bahasa yang berbeda yang esensinya sama yakni setiap individu ataupun kelompok masyarakat harus bersatu dan tidak berarti harus seragam. Begitu juga pada konteks Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan seterusnya.

Kelemahan rezim Soeharto adalah ketika memaknai persatuan dengan penyeragaman Indonesia yang sangat

Jawa (Jawanisasi). Misalnya *Eka Prasetya Panca Karsa* yang sangat kental khas Jawa sehingga orang Aceh dan beberapa daerah lainnya merasa asing dengan istilah tersebut bahkan berpotensi untuk menentang hal itu. Sistem nilai tersebut kerangkanya sudah ditentukan, sangat kaku, tidak fleksibel dan bahkan menyimpang.

Hal yang sama bisa juga diterapkan dalam berorganisasi. Misalnya setiap organisasi boleh berasas Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya tapi tetap pada prinsip yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu yang disebut dengan sistem nilai dengan tetap memberikan ruang-ruang bagi masyarakat untuk bisa mengisi nilai itu dengan *existing value* (nilai yang sudah ada) yang mereka punya.

Sedangkan gerakan *bottom up*, semua orang bisa memiliki Pancasila, membahasakannya dengan bahasa mereka sehingga bersatu tapi tidak seragam sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Biarlah Jawa Barat memainkan anklungnya, Jawa Tengah dengan serulingnya, Jawa Timur dengan gendangnya, dari Sabang hingga Merauke memainkan alat musik masing-masing sehingga menciptakan nada yang indah menjadi satu dalam sebuah orkestra.

Alat musik yang dimainkan dalam suatu kelompok orkestra memiliki kekhasannya masing-masing. Gendang dengan suara khasnya dan tidak perlu berubah menjadi seruling. Demikian juga dengan gitar yang harus tetap menjadi gitar. Namun, ketika sudah tergabung menjadi satu orkestra mereka harus tetap harmoni dan bersatu tapi tidak berarti harus seragam. Ini yang dimaksud dengan sistem nilai yang tetap mengakomodasi keanekaragaman dan keberagaman. Bukan seperti masa Orde Baru ketika Pancasila diklaim sebagai "kristalisasi nilai-nilai luhur" namun tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal.¹⁵

b. Pendidik

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pernah diajarkan dengan pendekatan intelektual tanpa adanya sentuhan antarwarga negara. Di sekolah-sekolah, Pancasila dibahas panjang lebar namun menguap tanpa bekas. Nilai-nilainya tidak dieksplorasi lebih mendalam sehingga Pancasila menjadi kode kebangsaan yang mati. Ia mampu diserap pada level kognitif namun belum menyentuh level afektif. Ia hanya dihafal dan disimpan dalam memori peserta didik namun tidak pernah mendorong anak-anak bertindak dengan nilai-nilai

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, Jakarta, 04 Desember 2014.

Pancasila. Hal ini tercermin dari hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 2011 yang cukup mengejutkan. Survei terkait radikalisme yang dilakukan di 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan hampir 50% pelajar mendukung cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. Hasil survei ini menunjukkan adanya indikasi dukungan kalangan pelajar terhadap tindakan radikalisme. Padahal mereka yang disurvei bukan pelajar sekolah agama, melainkan sekolah umum yaitu SMP dan SMA di 10 kawasan di sekitar Jakarta. Survei ini selanjutnya menyimpulkan bahwa lebih 63% siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas mau melibatkan diri dalam tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah umat agama-agama lain.¹⁶

Kondisi yang demikian menuntut cara-cara baru agar sistem pengajaran *civic education* menjadi lebih "kongkret" dan tidak "abstrak". Terkait dengan hal itu pendekatan yang ditawarkan oleh Yudi Latif cukup menarik agar pembelajaran Pancasila bisa mendorong para siswa-siswi, sebagai tunas bangsa dan cikal bakal pribadi yang toleran, untuk melakukan eksperimen agar bertindak sesuai dengan Pancasila. Menurut Yudi, siswa-

¹⁶http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_survei_radikalisme.shtml

siswi yang saat ini sudah terbiasa dengan *gadget* tetap dibiarkan membawa dan menggunakannya di dalam kelas sebagai sarana pembelajaran. Dalam pemanfaatannya siswa digiring pada pertanyaan ringan soal sila-sila yang dikandung Pancasila seperti sila Ketuhanan. Misalnya "Siapa tokoh di Indonesia yang mencerminkan sikap *welas asih* dan toleran?" Pada situasi itu akan muncul beberapa nama seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan lain sebagainya. Pertanyaan kemudian dilanjutkan, "Kalian tahu tidak Gus Dur itu siapa?" dari pertanyaan ini kemudian beragam respon dari berbagai siswa akan bermunculan mulai dari yang hanya kenal namanya saja hingga yang tidak tahu sama sekali. Siswa kemudian diajak menyelami *Google picture* untuk mengenal lebih dekat wajah tokoh yang dianggap toleran tersebut. Selanjutnya bisa digiring pada *Wikipedia* untuk mengenal siapa sebenarnya sosok tersebut. Bagaimana keteladanan para tokoh itu dalam berbangsa dan bernegara, termasuk pemikirannya.¹⁷

Selain itu, menyelami nilai-nilai Pancasila juga bisa melalui lagu yang mencerminkan cinta kasih Tuhan, misalnya seperti lagu Bimbo yang cukup dikenal yang berjudul "Tuhan". Siswa diajak mendengarkan ataupun melihat video lagu tersebut secara bersama-sama,

¹⁷ Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

selanjutnya mendiskusikan syair-syairnya bersama-sama, memaknainya, bernyanyi bersama dan mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Dengan *gadget* yang sudah melekat dalam kehidupan mereka, para siswa/siswi diberi tugas untuk mengambil gambar yang mencerminkan toleransi dalam kehidupan keseharian,¹⁸ bisa tokoh-tokoh di lingkungan mereka, tempat ibadah dan kegiatan kerja bakti di tingkat RT/RW yang dihuni oleh berbagai latar belakang masyarakat. Pembelajaran dengan memanfaatkan *gadget* di ruang kelas ini tentu tidak akan membuat para pelajar bosan karena sudah melekat dengan keseharian mereka.

E. DARI INKLUSI SOSIAL HINGGA MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG

Musyawarah dan gotong royong yang dikandung Pancasila diangkat dan dimunculkan menjadi nilai bersama untuk memecah pergaulan yang tertutup (eksklusif) sehingga tercipta hubungan yang cair di antara anak bangsa. Dalam beberapa kasus, mereka yang tergolong pada kelompok radikal ataupun garis keras biasanya cenderung menutup diri dan menutup ruang komunikasi. Kondisi demikian seringkali memancing rasa saling curiga yang berujung pada konflik.

¹⁸ Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

Semangat musyawarah dan gotong royong yang merupakan nilai Pancasila didorong untuk membuka ruang komunikasi sehingga warga masyarakat menjadi individu-individu yang membuka diri (inklusif). Komunikasi, utamanya di masyarakat akar rumput, sangat penting untuk menghilangkan rasa asing sebab intoleransi muncul karena ada rasa khawatir dari pihak-pihak tertentu terutama jika menyangkut isu-isu keagamaan. Menjalin komunikasi juga penting bagi tokoh-tokoh agama karena mereka menjadi panutan umat. Komunikasi di antara para tokoh agama dapat dilakukan dengan saling berbagi pengalaman atau saling berkunjung untuk berbagi pemecahan suatu masalah.

Komunikasi membuka ruang bagi masyarakat untuk sama-sama belajar membawa diri secara beradab, termasuk terbukanya ruang toleransi yang akan semakin lebar jika jalan komunikasi di antara kelompok masyarakat dibuka secara bersama-sama.¹⁹ Ruang komunikasi tersebut menjadi mungkin apabila gerakan “inklusi sosial” sudah dibangun. Inklusi sosial berarti sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah masyarakat yang semakin terbuka, melibatkan semua pihak untuk ikut serta dalam menyikapi persoalan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sebuah kondisi sosial-keagamaan yang terbuka, ramah dan nyaman karena tiap-tiap individu dapat

¹⁹ Wawancara dengan Franz Magnis-Suseno, Jakarta, 26 November 2014.

menjalankan kewajibannya. Inklusi sosial menuntut interaksi langsung di antara warga masyarakat. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan ideologi. Oleh karena itu, dalam masyarakat inklusif kita bertemu dan melakukan interaksi sosial dengan pribadi-pribadi individu yang memiliki keunikan dan perbedaan. Keunikan dan perbedaan dapat dilihat dari etnik, agama dan kepercayaan, warna kulit, postur tubuh, status sosial-ekonomi, latar belakang pendidikan, profesi dan jabatan, budaya seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, karakteristik dan yang lainnya.²⁰

Ketika inklusi sosial (interaksi langsung) dibangun maka masyarakat bisa berinteraksi secara personal, tetapi tidak berarti harus *melting* atau mencair dengan menyamakan semua. Inklusi sosial menggiring pada suasana keakraban dan menumbuhkan sikap toleran yang alamiah karena muncul dari pengalaman langsung dengan tidak menerkanerka. Dalam kondisi demikian setiap individu akan berani menanyakan hal-hal yang menyangkut keagamaan secara terbuka karena sudah saling mengenal, akrab, bahkan terbiasa bercanda.

²⁰ <https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/>.

Sebaliknya, ketika ruang interaksi tidak ada, maka proses untuk “mengerti” orang lain pun akan tertutup. Proses mengerti bisa melalui dua cara; *pertama*, dengan cara membaca. Cara ini biasanya hanya dilakukan kalangan terpelajar atau akademisi. *Kedua*, dengan cara *social inclusion* dimana proses memahami orang lain dilakukan melalui pengalaman langsung. Cara ini umum dilakukan masyarakat biasa atau kalangan awam. Masyarakat tipe kedua ini mengetahui karakter tetangganya yang non-Muslim, misalnya, melalui interaksi yang dibangun sehari-hari di lingkungannya.

Jika proses mengerti tersebut berlangsung dengan baik maka akan berujung pada pengakuan dan penghargaan atas keberagaman. Prinsip-prinsip hidup untuk berinklusi sesungguhnya telah muncul dalam tatanan masyarakat kita. Semangat dan nilai-nilai bhineka tunggal ika, kegotongroyongan, tepo saliro, tenggang rasa, serta toleransi sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat bangsa kita sesungguhnya dapat diartikan sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif.

Keinginan untuk berinteraksi langsung melalui gerakan inklusi sosial tersebut meniscayakan jalan komunikasi membuka ruang bagi “musyawarah mufakat” termasuk

“gotong royong”. Tensi egoisme mayoritas dan minoritas akan berkurang sebab didahului oleh pengalaman interaksi langsung yang dialami dalam keseharian. Proses mengerti di antara warga yang diperoleh secara alami mendorong terciptanya suasana penuh rasa persaudaraan tatkala muncul suatu persoalan yang harus diselesaikan melalui forum musyawarah mufakat.

Dalam kondisi demikian, keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah mufakat tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, melainkan dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.²¹

Bangsa Indonesia akan semakin kokoh jika nilai-nilai “Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” tumbuh berkembang. Sila permusyawaratan tersebut selanjutnya menjiwai demokrasi di Indonesia sehingga menjadi “demokrasi permusyawaratan” yang mendatangkan kesejahteraan social -- sistem demokrasi yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai

²¹ Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011, h. 45 .

mufakat. Demokrasi permusyawaratan harus dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan.²² Hal yang menyangkut "hajat hidup masyarakat" sebenarnya merupakan tugas bersama. Di sinilah pentingnya "musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" dimana arah sebenarnya sudah lebih dari sekadar "ko-eksistensi damai". "Musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" bagi kaum tepelajar dianggap sebagai ciri penting bagi sebuah *civil society* yang beradab.²³

Permusyawaratan harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas demi kepentingan kelompok tertentu. Permusyawaratan harus didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Musyawarah harus diorientasikan jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi kepentingan politik yang bersifat destruktif. Musyawarah imparial, dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil apapun) secara inklusif, dapat menangkal dikte-dikte dan klaim-klaim kelompok mayoritas. Kata mufakat dicapai dengan mengambil keputusan sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah persoalan diperbincangkan dan dibahas

²² Anita Yossihara, Rindu Pancasila (Jakarta: Kompas 2010), h. 129.

²³ Abdul Hakim dan Yudi Latif (penyunting), Dalam Bayang-Bayang Fanatisme (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007), h. 135.

panjang lebar dengan penuh kehati-hatian, sehingga mufakat merupakan buah dari permusyawaratan.

Hal ini memerlukan mentalitas kolektif yang cenderung pada kemaslahatan umum, sebagai prasyarat rohaniah yang memudahkan tercapainya mufakat. Mentalitas kolektif ini, menurut Bung Hatta, tidak perlu membuat seseorang menjadi objek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Yang diperlukan adalah bahwa kemerdekaan individu harus beroperasi dalam batas garis kontur kemaslahatan umum.²⁴ Penyelesaian konflik sosial keagamaan biasanya tergantung pada kepribadian serta nilai yang dipegang oleh masing-masing individu. Salah satu nilai yang memengaruhi gaya penyelesaian konflik yang dipilih seseorang adalah nilai individualisme-kolektivisme. Pada masyarakat individualis, gaya penyelesaian konflik yang diambil cenderung menggunakan metode dominasi. Sebaliknya, pada masyarakat kolektif yang didorong oleh semangat permusyawaratan dan gotong royong, gaya penyelesaian konflik yang diambil lebih bersifat membantu lawan atau menghindari konflik itu sendiri.

Semangat yang diusung oleh permusyawaratan dan gotong royong bukanlah budaya individualis yang lebih memilih untuk memakai cara konfrontasi dalam menyelesaikan

²⁴ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 479.

konflik. Dalam permusyawaratan dan gotong royong sebagai ciri dari masyarakat kolektivis, masyarakat cenderung untuk menekankan pada penggunaan gaya penyelesaian konflik seperti mediasi dan negosiasi, dimana setiap individu memilih hidup bersama-sama dan menjadi bagian dari kelompok. Selain itu, inidividu juga menekankan pada tujuan kelompok di atas tujuan pribadi, serta menekankan keinginan dan kepentingan kelompok berada di atas kepentingan pribadi. Gaya penyelesaian konflik yang dipilih oleh masyarakat yang menganut nilai kolektivis yaitu dengan menghindari konflik atau negosiasi. Dalam kedua metode tersebut tergambar bahwa individu berusaha untuk menghargai orang lain serta mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.²⁵

Persetujuan yang ditempuh melalui jalan musyawarah dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus yang berpijak pada mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga semua pihak yang terlibat ikut merasa memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Sedangkan *voting* harus ditempatkan sebagai jalan terakhir, itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dalam permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna

²⁵ http://www.academia.edu/7183266/Hubungan_nilai_budaya_individualisme_kolektivisme_dan_gaya_penyelesaian_konflik.

substantifnya jika tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan dan kekeluargaan.

Demikian juga dalam hal semangat gotong-royong yang harus dimunculkan melalui proses inklusi sosial tersebut. Saling mengerti dan memahami antarkelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda merupakan modal awal untuk meraih semangat gotong-royong yang mendasari semua sila Pancasila. Gotong royong mengandaikan sebuah cita-cita pemecahan masalah sosial-keagamaan secara bersama-sama. Gotong-royong tidak muncul begitu saja ke permukaan jika tidak didahului oleh kedekatan, perjumpaan, dan keakraban yang dibangun secara alami melalui interaksi langsung dalam keseharian.

Dalam alam pikiran Pancasila, ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismennya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan berperikeadilan), bukan intenasionalisme yang menjajah dan eksploitatif.

Prinsip kebangsaan harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, "bhinneka tunggal ika"), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip

demokrasi harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elite penguasa-pemodal (minorokrasi).

Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan berbasis indivisualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.²⁶

Pada hakekatnya agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong-royong untuk mengelola ruang publik bersama. Gotong Royong menggambarkan perilaku-perilaku individu yang memacar dari kesadaran yang mendalam. Dalam masyarakat pertanian desa semangat gotong royong mendorong mereka untuk bekerja sama tanpa menerima upah, dan lebih luas, sebagai suatu tradisi yang mengakar, meliputi aspek-aspek dominan lain dalam kehidupan sosial. Gotong royong harus dimaknai sebagai filosofi yang menjadikan kehidupan bersama sebagai aspek yang paling

²⁶ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 19.

penting. Gotong royong adalah filosofi yang menjadi bagian dari budaya Indonesia, bukan hanya menjadi filosofi beberapa kelompok tertentu.

Gerakan inklusi sosial, yang dibahas sebelumnya, menjadi roh dari hidupnya nilai-nilai gotong-royong dan permusyawaratan. Dan yang paling penting, *social inclusion* tersebut membutuhkan ruang dan waktu karena tidak tumbuh dan hidup begitu saja di tengah masyarakat. Suasana inklusi sosial ini harus diciptakan dalam bentuk *social engineering* melalui sebuah kebijakan konkret seperti *policy* dalam tata ruang. Misalnya, jika ada perumahan yang dibangun secara eksklusif untuk pemeluk agama tertentu harus dilarang, harus tegas karena menyangkut kebijakan tata ruang bahwa konsep perumahan harus bersifat publik tidak boleh dikhususkan kelompok agama tertentu. Saat ini ada kecenderungan ke arah itu. Ketika muncul konflik bernuansa keagamaan, ia menjadi objek yang mudah untuk diserang.

Rekayasa sosial melalui penamaan dan pemaknaan tersebut harus juga menyentuh nilai gotong royong dan musyawarah. Misalnya, gotong royong bagi orang Jawa juga sering diartikan sebagai "sambatan" (meminta tolong). Ketika ada yang membangun rumah, orang hanya cukup memukul "kentong" para tetangga langsung berdatangan dan tahu

apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari membangun fondasi rumah, menurunkan genteng, dan sebagainya.

Gotong royong -- yang ditanamkan sebagai nilai universal dalam Pancasila - dibahasakan, dikontekstualisasikan dengan kata "sambatan" tersebut agar nuansa nilai-nilai lokal yang partikular muncul beriringan dengan yang universal. Di sinilah proses *engineering* melalui penamaan dan pemaknaan itu terjadi atau dengan kata lain di-*branding* ulang sehingga masyarakat setempat merasa bangga dan merasa memiliki karena hal tersebut tidak asing bagi mereka.

F. KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN RUANG TOLERANSI

Dalam pidatonya yang cukup heroik terkait sila Ketuhanan, Soekarno menegaskan, "*...Negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.*" (Soekarno, 1 Juni 1945).

Semangat awal sang Proklamator tersebut harus kembali dihadirkan di tengah gejala memudarnya sila Ketuhanan sebagai fundamen etik kebangsaan. Munculnya nilai-nilai ketuhanan yang rapuh biasanya ditandai dengan munculnya

berbagai konflik berbau SARA utamanya pada dekade 1998-2002. Sebut saja konflik dan kerusuhan sosial dan komunal yang meledak di Jakarta, Ambon, Poso, Sampit, Mataram, dan beberapa daerah lainnya. Konflik tersebut telah merenggut nyawa dan harta yang tidak sedikit, bahkan kadang menimbulkan trauma dan luka sosial yang berpotensi hidup kembali baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Benturan maupun konflik sosial keagamaan yang kerap muncul di berbagai daerah menandai redupnya pemahaman terhadap sila "Ketuhanan" sebagai cermin komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ketuhanan (religiositas) yang menjadi sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dan sebagai fundamen etik kehidupan bernegara, seakan mulai kehilangan daya cengkramnya ditelan sikap intoleran dan egoisme kelompok. Padahal benih-benih toleransi bagi masyarakat di negeri ini telah mengakar sejak lama secara alami. Secara historis, hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Sejak zaman kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Empu Tantular dalam Sutasoma,

"Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa", semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu juga, sebab tidak ada jalan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan.²⁷

G. KETUHANAN TIDAK MENGANCAM KEMANUSIAAN

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan karena bangsa ini menyadari bahwa manusia Indonesia yang beragama dan bertuhan pasti memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam. Sebab agama lahir bukan untuk agama itu sendiri, tetapi untuk manusia dan memperjuangkan martabat manusia. Spirit tiap-tiap agama yang ada di Indonesia memiliki inti ajaran yang sama yaitu agama dan ketuhanan yang menjadi rahmat bagi bangsa, bukan sebaliknya menginjak-injak harkat dan martabat manusia dengan menebar kebencian.

Perjuangan untuk kemanusiaan tersebut menjadi dasar "toleransi" agar terjadi kerja sama dari berbagai agama di Indonesia. Toleransi yang berpijak dari Ketuhanan tersebut menjadi pemicu untuk bersama-sama mencari makna kemanusiaan dan martabat manusia serta membangun kepekaan yang lebih mendalam terhadap kemanusiaan.

²⁷ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Universitas Paramadina, 2004), h. 39-40.

Oleh karena itu agama perlu melepaskan diri dari kesetiaan-kesetiaan sempit dan primordial. Sila Ketuhanan merupakan kunci pembuka pada pintu-pintu kemanusiaan, adanya keterbukaan pada etika kemanusiaan yang membuka prioritas pada penyelamatan khususnya manusia dan alam pada umumnya (*rahmatan lil alamin*).²⁸

Nilai-nilai Ketuhanan Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri (keyakinan) pribadi. Tidak diperkenankan menyebarkan propaganda untuk menolak atau membenci agama. Nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila adalah nilai-nilai Ketuhanan yang positif bukan yang bersifat mengancam ke arah kehidupan anarkis.

Nilai-nilai tersebut diperas dan diresap dari inti nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Nilai Ketuhanan Pancasila diharapkan mampu mengayomi perbedaan yang sering menjadi pemicu konflik untuk menghidupkan dinamika sebuah masyarakat. Nilai-nilai profetis, inklusif, membebaskan dan memuliakan keadilan dan persaudaraan tersebut harus bisa diserap oleh tiap-tiap penganut agama sehingga konflik bisa dihindari. Nilai-nilai tersebut sekaligus menjadi jembatan ketika kepentingan antara kedua kelompok mengalami benturan dalam kebuntuan.

²⁸ Sastrapratedja, "Agama: Mampukah Mendorong Perubahan Sosial?," Prisma, 9 September 1982, h.64.

Jika sila Ketuhanan dipahami oleh umat beragama maka perbedaan yang kerap kali muncul justru dapat menjadi energi yang menuntun kepada pemahaman yang lebih luas dan kaya terhadap suatu permasalahan, dan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi.²⁹ Ketuhanan yang lapang dan toleran memberikan semangat kebersamaan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan sila Ketuhanan di atas sila-sila yang lain, maka akar kerohanian yang menjadi modal dasar bagi para penganut agama dan keyakinan tertentu untuk menghadapi situasi potensi konflik sehingga berusaha menekannya agar tidak muncul ke permukaan, membuka bagi jalan dialog.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing akan tetapi menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan Pancasila, kehidupan kolektif yang berorientasi pada penghayatan nilai-nilai itu terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral.

Sila Ketuhanan membuka ruang bagi toleransi dimana komunitas agama-agama dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama mereka sebagai pembawa kebaikan untuk semua. Masalah yang

²⁹ Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia (Jakarta: PBB UIN Syahid, 2006), h. 17-18.

secara khusus dihadapi suatu komunitas agama tidak dapat dipandang akan dapat diselesaikan hanya oleh mereka sendiri. Jika kerusakan moral merupakan sumber pokok krisis kenegaraan dan kebangsaan, usaha untuk menyembuhkannya bukan dengan jalan mengedepankan eksklusivisme simbol-simbol keagamaan, melainkan dengan lebih menekankan inklusivisme agama. Dan yang paling penting, setiap komunitas agama harus dapat membedakan persoalan privat dan persoalan publik, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu.³⁰

Keragaman yang tumbuh dan menguat di bumi Nusantara yang kemudian menjadi bingkai dalam formasi kebangsaan Indonesia, membuat para pendiri bangsa tidak bisa membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak pernah terlepas dari ketuhanan. Ketuhanan kelak menjadi fundamen toleransi yang penting bagi banguna NKRI kita.

³⁰ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 115-119.

BAB V

STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA YANG EFEKTIF DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN

A. PENDAHULUAN

"Pancasila adalah satu weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila itu". (Soekarno, 1958)¹

Kebhinnekaan adalah fondasi utama bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak awal para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) kita menyadari bahwa mereka akan membentuk sebuah negara yang dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan, bukan oleh persamaan-persamaan. Perbedaan yang lahir dan tumbuh dari keragaman bahasa, budaya, adat-istiadat, suku, ras, dan agama, terus-menerus dicoba untuk didekatkan dan dihimpun dalam ikatan kebangsaan, tanpa harus dilebur menjadi satu yang menghilangkan keberagaman itu sendiri.

¹ Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Cet-4, h. 1

Keberagaman telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah 70 tahun kemerdekaan, konstruksi kebhinnekaan bangsa ini tidak pernah lepas dari ujian. Di masa-masa awal kemerdekaan tantangan utama kebhinnekaan ialah munculnya aspirasi untuk menjadikan negara kita sebagai negara agama, di bawah naungan satu agama, menafikan keragaman agama yang ada. Lalu muncul gerakan-gerakan separatis yang menantang persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan juga lahir negara tandingan seperti DI/TII, PRRI, Permesta, yang telah kita bahas di bagian-bagian sebelum ini.

Sekarang, ancaman serius bagi kebhinnekaan ialah munculnya konflik-konflik horisontal bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Saat ini bangsa kita berada dalam krisis toleransi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus konflik berlatar-belakang SARA, yang telah menimbulkan korban, baik nyawa maupun harta benda.

Di berbagai tempat di Indonesia terjadi kerusuhan yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Masyarakat yang dulu ahulu hidup

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 6 Agustus 2012, h. iv-v

rukun, tenang, dan damai, telah berubah menjadi masyarakat yang saling membenci, menyerang, bahkan saling membunuh. Di masa-masa awal Gerakan Reformasi 1998, gendrung kebebasan ditabuh dengan keras. Semua orang menyambut dengan suka-cita. Ibarat pesakitan terbebas dari kurungan penjara. Ibarat air yang tertahan oleh kran, lalu saat kran dibuka lebar air tumpah ruah. Di era rezim Orde Baru yang totaliter, aspirasi politik masyarakat disumbat. Maka saat rezim tersebut tumbang, berbagai aspirasi masyarakat menemukan momentumnya untuk disuarakan. Tak jarang dengan nada yang teramat keras, sehingga berbenturan dengan suara-suara lain yang berbeda, yang juga bersuara atas nama kebebasan.

Gerakan Reformasi tergulung oleh derasnya euforia kebebasan, sehingga sebagian masyarakat seakan lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku anarkis yang akhirnya memicu konflik sosial. Itulah yang belakangan bermunculan di berbagai daerah di tanah air, yang secara politik menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar-warga-etnis-agama, yang akhir-akhir ini kerap muncul, menjadi titik noda bagi spirit kemerdekaan yang diproklamasikan dengan cita-cita untuk bersatu dalam perbedaan, hidup bersama di atas dasar Pancasila – sebagaimana kata-kata Bung Karno di atas.

Problem bangsa kita saat ini lebih dari sekadar memiliki Pancasila sebagai dasar hidup bersama, tetapi memahami nilai-nilai Pancasila itu dengan baik dan mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan nyata. Pusaran konflik harus segera diakhiri, tabir kekerasan harus segera ditutup, karena konflik dan kekerasan akan merugikan seluruh anak bangsa dan berpotensi menghambat jalannya pembangunan.³

Di tengah keprihatinan nasional yang semakin mengkhawatirkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di bawah pimpinan Taufiq Kiemas selaku ketua MPR RI (periode 2009-2014) bersama pimpinan MPR lainnya mengupayakan langkah-langkah untuk menjawab berbagai tantangan dan problematika kebangsaan dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan yang visioner. Upaya ini dikenal khalayak luas dengan program nasional sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (selanjutnya disebut Empat Pilar) yang meliputi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Empat pilar ini merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus difahami oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia

³ Sekretariat Jendral MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012), h. IV

dan menjadi tuntunan perilaku dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Empat pilar ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Penyebutan empat pilar ini tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, akan tetapi setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, tentunya kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai nilai fundamental yang menjiwai ketiga pilar yang lain. Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatupadu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera.

Dalam rangka mensosialisasikan program empat pilar ini, MPR melandaskan kegiatannya kepada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menetapkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengkoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan

Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Tata Tertib MPR, tugas tersebut diimplementasikan oleh Pimpinan MPR dengan menyosialisasikan 4 (empat) pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada segenap elemen bangsa.⁴

Secara normatif MPR sesungguhnya tidak pernah menggunakan istilah "empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara" dalam UU MD3 dan Tatib MPR. UU MD3 dan Tatib MPR hanya mencantumkan kewajiban anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah "empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara" hanya digunakan sebagai frasemologi politik MPR dalam memasyarakatkan keempat nilai-nilai luhur bangsa tersebut.

Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang oleh Pasal 34

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, 2014, h. 55

ayat (3b) huruf a UU Parpol disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Penghapusan frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara" oleh MK dalam Pasal 34 ayat 3b huruf a UU Parpol, bukan berarti memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi diperlukan, apalagi dihapuskan. Justru kegiatan tersebut harus dilanjutkan sebagai bagian dari pendidikan politik dan pembangunan karakter bangsa.⁵

Putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian posisi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga membawa manfaat hukum (*doelmatigheid*) karena meskipun menyatakan frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun mengingat manfaatnya bagi upaya membangun karakter bangsa, MK tetap mempertahankan dan mendukung upaya pendidikan karakter bangsa dengan tetap menyatakan konstitusional upaya partai politik maupun lembaga negara lainnya yang melaksanakan pendidikan politik melalui kegiatan memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

B. REVIEW STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA OLEH MPR RI

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, 2014, h.

Dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bingkai kegiatan sosialisasi Empat Pilar, MPR senantiasa berikhtiar untuk memberikan yang terbaik dari tahun ke tahun. Sejauh ini program yang dilaksanakan oleh MPR ini dianggap berhasil dalam memberikan pemahaman nilai-nilai empat pilar kepada seluruh anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar dan yang mengikuti kegiatan sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar.

Dalam upaya sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar ini ternyata MPR tidaklah berjalan sendirian namun juga mendapat dukungan penuh pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomer 6 tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang dukungan kelancaran Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR. Dalam hal ini, Presiden menginstruksikan kepada seluruh aparat pemerintahan seperti para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para kepala lembaga pemerintahan non departemen, para gubernur, para bupati

dan walikota untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD NRI tahun 1945.⁶

Alokasi anggaran sosialisasi pun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2012 misalnya jumlah anggaran sebesar 170 milyar. Sedangkan tahun 2014 meningkat tajam sebesar 809 milyar. Diharapkan besarnya anggaran ini dapat memaksimalkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Empat Pilar.⁷

Dalam rangka optimalisasi peran dan tugas MPR RI dalam mensosialisasikan empat pilar maka pimpinan MPR membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR yang ditugasi untuk menyusun materi dan metodologi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta melaksanakan sosialisasi. Di antara salah satu tugas utamanya adalah menyusun Materi Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara secara komprehensif.

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi, 2014, h. 55

⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, 2014, h. 58

Materi sosialisasi yang disusun oleh Tim Kerja Sosialisasi ditetapkan dalam dua buah buku, yaitu:⁸

1. Buku Pertama, berjudul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Buku ini memuat bagian yang menguraikan substansi tentang Latar belakang sosialisasi Empat Pilar, tugas dan peran MPR dalam melakukan sosialisasi, serta dasar hukum MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar. Kemudian terdapat penjelasan tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dipaparkan juga sejarah, perkembangan, tantangan kekiniana, dan aktualisasi Empat Pilar.
2. Buku kedua, berjudul Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Buku ini berisikan materi sosialisasi dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Ketetapan

⁸ Sekretariat Jendral MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012), h. 14

dan Keputusan MPR) yang disusun oleh Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR pada periode 1999-2004. Buku ini bukan merupakan penjelasan atau tafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR, tetapi merupakan uraian dan informasi seputar latar belakang, proses, hasil perubahan, dan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS.

Kedua buku tersebut disusun dengan melibatkan para pakar/ahli. Setelah seluruh materi dibahas oleh Tim Kerja Sosialisasi dan Tim Kecil secara terus-menerus, konsep materi diujisahkan dalam lokakarya oleh pakar/ahli serta tokoh nasional, yaitu Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, M.A.; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.; Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.; Dr. Franz Magnis Suseno, SJ; Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra Wingarta, S.IP.,M.Sc (mewakili Gubernur Lemhannas); Prof. Dr. Bachtiar Effendy; Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, MA; Harun Kamil, S.H.; Yudi Latief, M.A., Ph.D; Dr. Arief Rachman; Dr. Asvi Warman Adam; dan Dr. Bambang Noorsena. Selanjutnya dilakukan rapat-rapat finalisasi oleh Tim Kerja Sosialisasi dengan melibatkan Tim Editor, yaitu Prof. Dr. Bachtiar Effendy dan Yudi Latief, M.A., Ph.D serta

ahli bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dra. Ebah Suaebah, M.Hum.⁹

Selanjutnya dalam mensosialisasikan nilai-nilai tersebut MPR senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lainnya seperti kalangan perguruan tinggi, sekolah menengah, organisasi kemasyarakatan, perusahaan negara dan swasta, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Metode-metode yang dipergunakan dalam rangka sosialisasi cukup beragam. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan output yang maksimal pula. Di antara metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat dengan segmentasi para siswa-siswi sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan sejak dini tentang nilai-nilai empat pilar (Pancasila).
2. Sosialisasi Empat Pilar melalui Media Cetak dan Elektronik. Kegiatan ini berbentuk tayangan iklan

⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 2014, h. 15

¹⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi, 2014, h. 57-58

layanan masyarakat di Televisi dan Media Cetak, Dialog interaktif di RRI dan Radio di daerah dan lain sebagainya. Program ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat terutama masyarakat akar rumput terkait berbagai persoalan bangsa dan bagaimana menyikapinya berdasarkan nilai-nilai empat pilar.

3. Pagelaran Seni Budaya Nusantara. Program ini berupa pagelaran wayang yang dikemas secara kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan melalui jalur seni dan budaya.
4. Sosialisasi secara langsung oleh seluruh anggota MPR setiap masa reses. Sosialisasi ini telah dilakukan oleh 692 anggota MPR di daerah pemilihannya di seluruh Indonesia dalam bentuk program dialog dengan anggota masyarakat untuk menyerap aspirasi dari konstituen, terutama terkait dengan pemahaman nilai-nilai Empat Pilar.
5. Sosialisasi dengan aparat pemerintahan daerah. Program ini melibatkan seluruh aparat pemerintahan daerah seperti kepala desa/lurah dan camat dalam rangka mendukung upaya pemahaman nilai-nilai Empat Pilar kepada seluruh masyarakat.
6. Lomba Kreativitas Seni dan Budaya seperti Lomba Cipta Puisi Empat pilar, Lomba Cipta Lagu Empat Pilar, Lomba Menggambar/Mewarnai dan Lomba Karya Tulis Empat

Pilar. Semua program ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kepedulian dan memahami nilai-nilai Empat Pilar.

7. Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers). Pesertanya berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan (ormas), birokrat, kalangan pesantren, aparat keamanan, dan sebagainya. Program ini diharapkan mampu menciptakan para narasumber dan pelatih-pelatih handal dan mumpuni sebagai ujung tombak sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar.
8. Sosialisasi bersama para guru/pendidik. Program ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada para guru agar nantinya bisa menjadi ujung tombak penanaman nilai-nilai Empat Pilar kepada seluruh peserta didik.
9. Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat. Program ini melibatkan para tokoh masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan duta-duta Empat Pilar di masyarakat.
10. Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Kegiatan seminar dan FGD ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan sekaligus menggali nilai-nilai Empat Pilar yang terbaik bagi bangsa ini.

Untuk melihat hasil capaian implementasi keseluruhan program yang telah dicanangkan maka MPR juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi empat pilar dengan tujuan untuk melihat sejauhmana efek dan dampak yang dihasilkan baik efek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan/emosi), dan psikomotorik (perilaku) dari kegiatan sosialisasi tersebut di atas. Evaluasi ini melibatkan 3 lembaga yaitu CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPPM Universitas Airlangga Surabaya, dan Setara Institut Jakarta di tahun 2011. Evaluasi ini berupa survei atas 2 kelompok sasaran yaitu pertama, survei terhadap peserta kegiatan program. Kedua, survei terhadap opini public.

Untuk kategori survei terhadap peserta sosialisasi Empat Pilar ditemukan bahwa:¹¹

1. Dari aspek Proses dan Metode. Proses penyampaian metode yang praktis dan efisien adalah metode ceramah dan dialog interaktif, namun menghindari pola yang bersifat indoktrinatif.
2. Dari aspek Materi. Mayoritas peserta program sosialisasi mengakui adanya peningkatan pengetahuan tentang Empat Pilar paska sosialisasi.

¹¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi, 2014, h. 60

3. Dari Aspek Dampak. Dampak sosialisasi cukup besar dimana peserta menyatakan menerima perbedaan suku bangsa, agama dan ras. Mereka juga sepakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara musyawarah dan mengutamakan persatuan.

Sementara itu, untuk kategori survei terhadap masyarakat umum, ditemukan bahwa:¹²

1. Hampir seluruh masyarakat percaya kepada Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila juga dianggap sebagai kekuatan yang dapat melindungi bangsa dari perpecahan.
2. Masyarakat secara umum menilai positif eksistensi UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum dan sepakat untuk melaksanakannya serta mempertahankannya.
3. Separuh masyarakat yakin NKRI adalah final dan Negara harus mempertahankannya.
4. Mayoritas masyarakat mengetahui Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto bangsa dan masyarakat harus memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keragaman.

¹² Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi, 2014, h. 60

5. Sebagian masyarakat berhasil terjangkau oleh program pemasyarakatan Empat Pilar. Pemasyarakatan secara langsung dianggap paling efektif.

Sementara itu, capaian target jumlah masyarakat yang terpapar Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah sangat tinggi, bahkan melebihi ukuran realisasi atas perencanaan dan target di atas 100%. Hal tersebut karena target ini dihitung sesuai dengan rating program dalam televisi. Dalam kenyataannya, tayangan-tayangan dalam rangka sosialisasi 'Empat Pilar' banyak diminati oleh masyarakat karena jam tayangnya pada *prime time*.

Dalam konteks kuantitatif, jumlah masyarakat yang telah dipaparkan mengenai Pancasila, UUD NRI 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2009 jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sebanyak 3.891.228 dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebesar 489.000. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2010, dimana jumlah masyarakat yang terpapar sebanyak 13.931.828, sejumlah 689.000 yang mengikuti kegiatan. Di tahun 2011, jumlah tersebut meningkat lagi yakni 23.665.728 yang terpapar kegiatan, sedangkan yang mengikuti kegiatan sebanyak 919.000. Di tahun 2012, dari 17.093.328 yang terpapar,

sebanyak 1.838.000 yang mengikuti kegiatan. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2013 dimana 17.093.328 yang terpapar kegiatan sebanyak 2.297.000 yang mengikuti kegiatan.¹³

Tabel 1
Capaian Hasil Memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

No	Tahun	Jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan memasyarakatkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui media massa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan memasyarakatkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
1	2009	3.891.228	489.000
2	2010	13.931.828	689.000
3	2011	23.665.728	919.000
4	2012	17.093.328	1.838.000
5	2013	17.093.328	2.297.000

Berdasarkan hasil review program sosialisasi Empat Pilar di atas, dan hasil kajian mendalam dari beberapa sumber baik hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa tokoh kompeten, diperoleh masukan dan rekomendasi penting terkait pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, di antaranya

¹³ Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, 2014, h. 61

adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila hingga kini sudah dianggap berhasil namun pada tataran aspek kognitif semata, dan belum mampu mencapai aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini terlihat dari masih maraknya perilaku-perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dibutuhkan upaya sosialisasi dan strategi yang efektif, tepat, dan terstruktur. Karena itu perlu dibentuk kelembagaan atau institusi yang menanganinya, seperti lembaga khusus sejenis BP7 (dulu), yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memasyarakatkan ke segenap lapisan masyarakat Indonesia.
2. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila disarankan untuk tidak menggunakan pola indoktrinasi seperti halnya pola pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan menggunakan strategi yang akomodatif dan humanis sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi pilar utama setiap tindakan masyarakat.
3. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam sistem kurikulum pendidikan

nasional, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Hal ini untuk lebih memberikan pengetahuan dasar bagi generasi penerus bangsa perihal nilai-nilai Pancasila sebagai pilar utama bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar ini (terutama terkait dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila) memang masih sangat diperlukan karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalaupun terdapat sosialisasi namun belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa ini. Namun demikian, masih menurut Azra, MPR adalah lembaga legislatif dan bukan lembaga eksekutif. Tidak semestinya ia melaksanakan kegiatan sosialisasi. Apalagi para anggota dan pimpinan MPR bisa datang dan pergi sesuai dengan masa jabatannya saja. Belum lagi persoalan keberadaannya sebagai politisi yang memang memiliki opini politis.¹⁴ Senada dengan Azra, Prof. Dr. Atho Mudzhar juga memberikan catatan kritis bahwa memang tidak akan mungkin MPR bisa melakukan sosialisasi ini dengan maksimal karena MPR sama sekali tidak memiliki

¹⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

struktur pendukungnya hingga ke level masyarakat paling bawah. Hal ini akan berbeda bila sosialisasi ini langsung menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui seluruh kementerian yang ada.¹⁵

Menurut M. Ubaidillah (Direktur ICCE UIN Jakarta), pemegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan pendidikan nilai-nilai Empat Pilar ini sebenarnya terletak pada pemerintah (eksekutif) meskipun para anggota dan pimpinan MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, serta lembaga-lembaga lainnya dapat saja didorong dan dianjurkan untuk melakukan sosialisasi tersebut, tetapi bukan sebagai tugas dan tanggungjawab utama, melainkan hanya tanggungjawab moral yang bersifat tambahan (*taakstelling*).¹⁶ Pemikiran ini didasarkan pada fungsi penyusunan dan perumusan Pancasila dan juga UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan fungsi politik atau fungsi pembuatan kebijakan negara (*policy making*), sedangkan fungsi sosialisasi atau pemasyarakatan merupakan fungsi eksekutif (*policy executing*) sebagai pelaksanaan atau tindak lanjut dari kebijakan negara yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada MPR untuk memasyarakatkan Pancasila.

¹⁵ Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

¹⁶ Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, 22 November 2014.

Pemerintah harus tampil dengan tanggungjawabnya sendiri untuk upaya memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya.

C. STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN

Upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan upaya yang sistematis, serius, dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan *output* yang maksimal. Cara atau pendekatan dan metode yang digunakan pun harus bervariasi disesuaikan dengan segmentasi masyarakat yang memang sangat heterogen.

Setiap upaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, harus didasari oleh pemahaman terhadap maksud dan tujuannya, selanjutnya apa dan bagaimana implementasi tersebut diselenggarakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana cara yang sebaiknya diterapkan, serta bentuk kelembagaan yang diperlukan. Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan strategi pengamalan Pancasila sangat bergantung pada pencapaian 3 aspek utama yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif seringkali diistilahkan sebagai *moral knowing* yang memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral (*moral awareness*),

pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil menentukan sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). Selanjutnya adalah aspek afektif, dalam hal ini seringkali disebut dengan *moral loving* atau *moral feeling*. Aspek ini merupakan penguatan aspek emosi untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh individu-individu, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). Ketiga adalah aspek psikomotorik yang dikenal dengan istilah *moral acting*, dimana tindakan nyata menjadi kekuatan aspek ini. Namun jangan lupa bahwa penguatan ketiga hal di atas haruslah dilakukan dengan cara-cara yang logis, rasional dan demokratis. Sehingga perilaku yang muncul benar-benar sebuah karakter diri. Strategi pengamalan Pancasila tanpa identifikasi karakter hanya akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir, petualangan tanpa peta yang jelas.

Hal terpenting lainnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah konteks pendekatan yang tepat. Pendekatan yang dipergunakan dalam implementasi Pancasila sebaiknya adalah pendekatan

kontekstual, yakni menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila langsung pada permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk maksud ini diperlukan ketentuan standar yang menggambarkan pola pikir, sikap, tingkah laku dan perbuatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Dengan ketentuan standar tersebut, masyarakat secara mudah dan cepat dapat menilai suatu sikap atau tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah tahapan-tahapan pelaksanaannya. Diantara tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: pertama, *Artikulasi*, pemberian penjelasan yang mantap tentang isi, kandungan, kebenaran rasional, struktur dan tujuan implementasi Pancasila. Kedua, *Internalisasi*, usaha memasukkan gagasan tersebut dalam hati sanubari setiap warganegara, sehingga benar-benar memahami dan bersedia menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dan ketiga, *Aktualisasi*, aplikasi gagasan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata, baik dalam pemikiran maupun perbuatan.

Selain itu, agar implementasi Pancasila dapat mencapai sasaran maka perlu ditempuh proses pendekatan sebagai

berikut: Pertama, *menimbulkan atensi*. Sajian mengenai Pancasila diupayakan menarik perhatian setiap orang, sehingga khalayak sasaran (*target audience*) tidak merasa terpaksa, tetapi dengan senang hati, ikhlas, dan sukarela menerimanya. Kedua, *mengembangkan komprehensi*. Upaya untuk memahami substansi konsep, prinsip dan nilai Pancasila secara mendalam, sehingga faham akan makna, esensi, maksud dan tujuan gagasan yang apabila dilaksanakan bermanfaat dalam menjangkau masa depan yang lebih baik. Ketiga, *menimbulkan akseptasi*. Pengakuan secara jujur dan menerima secara sadar kebenaran konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keempat, *menimbulkan retensi*. Terbentuknya keyakinan akan kebenaran dan ketangguhan gagasan tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dan panduan dalam menentukan pilihan tindakan. Dan kelima, *mengadakan aksi*. Menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pendekatan, faktor metode yang digunakan juga memiliki pengaruh yang besar atas kesuksesan program sosialisasi. Metode yang diterapkan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebaiknya tidak monoton tapi lebih bervariasi sehingga peserta yang terpapar sosialisasi tidak merasa

bosan tetapi malah terus bersemangat untuk mengikuti dan menjalankannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁷

Lantas bagaimana sesungguhnya strategi sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap kalangan ormas keagamaan? Bila ditelisik lebih jauh, hingga saat ini misalnya, sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan belumlah dilakukan dengan maksimal. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila biasanya hanya berputar kepada ormas keagamaan yang pro atau tidak mempersoalkan Pancasila seperti kepada Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam bentuk kegiatan seminar, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), dan lain sebagainya. Sementara kepada ormas yang tidak sepatutnya dengan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia, FPI dan lain sebagainya belum banyak dilakukan.¹⁸

Bagi ormas keagamaan yang mengakui Pancasila sebagai ideologi maka sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidaklah menjadi persoalan, namun bagi mereka yang ragu atau tidak

¹⁷ Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

¹⁸ Munculnya ormas yang menolak Pancasila sebenarnya bukan fenomena baru, melainkan sudah ada dalam sejarah pembentukan Pancasila itu sendiri dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertikaian wacana antara nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler, kini seolah tampil lagi dengan lahirnya kelompok-kelompok yang oleh beberapa pengamat politik disebut sebagai neo-nasionalis muslim, yang mencoba meragukan premis-premis dalam Pancasila karena dianggap hanya buatan manusia bukan hukum Tuhan. Bahkan di luar itu, juga ada kelompok keagamaan yang mengusung agenda raksasa yang utopis yakni transnasionalisasi.

mengakui Pancasila maka upaya sosialisasi ini akan menjadi persoalan tersendiri yang tidak mudah menyelesaikannya. Apalagi upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila tampaknya semakin terhimpit di antara dua kekuatan besar yang saat ini secara *de facto* menyandera kita yaitu kapitalisme-neoliberalisme dan konservatisme Islam (terlebih mereka yang masih belum selesai memperdebatkan kompatibilitas demokrasi dan Islam), yang terus menguat di ruang kehidupan dan kebudayaan bangsa ini. Yang pasti, kedua kelompok ormas keagamaan baik yang pro maupun kontra Pancasila ini harus sama-sama menjadi target utama sosialisasi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat menjadi ruh utama dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Melihat realitas di atas, berdasarkan kajian penulis atas keseluruhan program yang telah dilaksanakan oleh MPR dan masukan dari berbagai kalangan, maka berikut ini beberapa contoh program yang bisa dijalankan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada ormas keagamaan agar bisa menghasilkan *output* yang lebih maksimal lagi.

Prinsip utama sosialisasi terhadap ormas keagamaan ini adalah pelibatan partisipasti aktif mereka dalam ikut memaknai dan menafsirkan nilai-nilai Pancasila dan mencari

¹⁹ Wawancara dengan Prof Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

terobosan-terobosan efektif dan tepat berdasarkan karakteristik dan keunikan dari masing-masing ormas keagamaan. Sehingga diharapkan ke depan, tokoh-tokoh agama dari masing-masing ormas keagamaan menjadi aktor dan ujung tombak sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat. Di antara usulan program-program tersebut adalah:

Usulan Program Sosialisasi Pancasila Kepada Ormas Keagamaan

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Indikator	Mitra Kerja	Target Group
1	Dialog Nilai-nilai Pancasila Bersama Ormas Keagamaan	Mensosialisasikan Nilai-nilai Pancasila kepada seluruh ormas keagamaan. Membangun kerjasama strategis bersama ormas keagamaan untuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila	Terlaksananya dialog bersama ormas keagamaan. Adanya dukungan sikap atas posisi ormas keagamaan terhadap Pancasila	Seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia	Pengurus ormas keagamaan
2	Seminar, Diskusi dan FGD Nilai-nilai Pancasila	Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada	Terlaksananya seminar, diskusi dan FGD dengan lancar.	Ormas keagamaan di Tingkat Nasional, Propinsi dan	Anggota Ormas Keagamaan Masyarakat

	dan Implementasinya	seluruh peserta Merumuskan cara dan strategi tepat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan sikap dan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	Adanya rumusan cara dan strategi terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	KAbupaen/Kota	t Tokoh agama dan masyarakat
3	Penulisan Kajian ilmiah tentang reinterpretasi nilai-nilai Pancasila menurut pandangan ormas keagamaan	Mengetahui pandangan masing-masing ormas keagamaan tentang nilai-nilai Pancasila Memperkaya khazanah tafsir nilai-nilai Pancasila	Tersedianya draft kajian perihal nilai-nilai Pancasila menurut ormas keagamaan Publikasi kajian nilai-nilai Pancasila menurut ormas keagamaan	Ormas keagamaan di tingkat Nasional	Peneliti dan penulis dari masing-masing ormas keagamaan
4	Pilot Project Desa "Harmoni di Tengah Perbedaan"	Meningkatkan kerjasama, toleransi dan kepercayaan antar	Terlaksananya pilot project "Harmoni di tengah perbedaan" Dokumenta	Ormas keagamaan berbeda agama	Anggota masing-masing agama

		umat beragama Memunculkan best practices kerukunan umat beragama sebagai sikap keteladanan	si sikap-sikap kebersamaan dan toleransi di antara mereka yang berbeda		
5	Pembuatan Film Dokumenter "Indahnya Kebersamaan dalam Damai"	Meningkatkan kesadaran akan penting dan indahnya perdamaian Menumbuhkan sikap kebersamaan dalam damai	Film Dokumenter Publikasi film dokumenter	Rumah Produksi Fim	Seluruh Masyarakat

D. STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT KEPEMUDAAN (KARANG TARUNA, ORMAS-ORMAS PEMUDA BERBASIS KESUKUAN)

Generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa, karena itu perlu kiranya ditanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah diyakini kebenarannya, diterima, diikuti, dibela dan diperjuangkan. Nilai yang dimaksud adalah yang terkandung

dalam sila-sila Pancasila yang meliputi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan dan keadilan. Tanpa ada proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, niscaya nilai-nilai luhur Pancasila tidak akan dikenal, bahkan akan diabaikan. Bila nilai-nilai Pancasila tidak dipahami dengan baik oleh kalangan generasi muda sejak dini maka niscaya mereka akan semakin gagap menghadapi tantangan realitas kejemukan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Hal ini tentu sangat membahayakan keberadaan bangsa Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui sosialisasi yang tepat diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut tersosialisasi dan terinternalisasi dalam diri pribadi generasi muda. Dalam diri mereka akan tumbuh sikap demokratis serta analitis kritis dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan dan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan kajian tim penyusun buku ini, program-program sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, organisasi kepemudaan berbasis kesukuan, dan lain sebagainya) yang selama ini dilakukan oleh MPR sebenarnya cukup baik namun masih

kurang variatif dan cenderung focus kepada peningkatan aspek kognitif saja, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan. Kegiatan lomba cerdas cermat, seminar, dan diskusi tentu dapat menumbuhkan dan meningkatkan aspek pengetahuan mereka. Namun aspek kepekaan, kepedulian dan peran aktif dalam merajut damai dan toleransi di antara kalangan generasi muda hendaknya juga diperhatikan. Sebab, kaum muda yang kurang terasah kepekaan jiwa dan kepedulian sosialnya sangat rawan dengan tindakan kekerasan dan perilaku anti-sosial. Hal ini terlihat dari masih maraknya tawuran antar-pelajar, perkelahian antar-kampung, dan berbagai konflik lainnya yang melibatkan — atau bahkan disponsori oleh — kalangan generasi muda.

Maka berdasarkan hasil telaahan tim penulis atas realitas tersebut, berikut ini beberapa usulan program dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan generasi muda:

**Usulan Program Sosialisasi Pancasila Kepada
Organisasi Kepemudaan**

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Indikator	Mitra Kerja	Target Group
1	Cerdas Cermat Nilai-Nilai Pancasila Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Indonesia	Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Membangun dan membina persahabatan antar-generasi muda yang dapat memperkuat persatuan bangsa.	Terlaksananya lomba cerdas cermat tingkat Sekolah lanjutan Atas.	Kementerian Pendidikan Menengah RI	Siswa Terpilih dari masing-masing SMA
2	Seminar, Diskusi dan FGD Nilai-nilai Pancasila dan Implementasinya di Perguruan Tinggi Se-Indonesia	Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia. Merumuskan cara dan strategi tepat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan sikap dan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	Terlaksananya seminar, diskusi dan FGD dengan lancar. Adanya rumusan cara dan strategi terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	Universitas dan Perguruan Tinggi Se-Indonesia	Dosen Mahasiswa Tokoh pendidikan

3	Kemah "Lintas Agama"	Meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya nilai-nilai Pancasila Menumbuhkan kebersamaan antar generasi lintas agama Mempaktikkan sikap-sikap toleransi antar pemuda lintas agama	Terlaksananya Kegiatan "Kemah Lintas Agama" dengan baik. Adanya komunikasi Bersama "Janji pemuda Cinta Damai dan Cinta Indonesia" antar pemuda lintas agama.	Organisasi Kepemudaan Organisasi Keagamaan	Tokoh muda dari berbagai ormas kepemudaan (karang taruna, organisasi kepemudaan dan keagamaan)
4	Lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Baca Puisi, Drama, Penulisan, Cerpen, dll)	Menumbuhkan Kreativitas Pemuda Menjalin tali kerjasama yang kuat antar pemuda	Lomba puisi Lomba Drama Lomba Penulisan "Bangga Menjadi Indonesia". Lomba Penulisan Cerpen Kebangsaan. Lomba	Organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna dan organisasi kepemudaan lainnya.	Siswa Mahasiswa Karang Taruna
5	Lomba Olahraga Lintas Etnis, Agama, dan Budaya	Meningkatkan kerjasama antar pemuda lintas etnis, agama dan budaya Meningkatkan sportivitas dalam olah	Lomba Olahraga Lintas Etnis, Agama dan Budaya	Organisasi Kepemudaan	Generasi muda lintas etnis, agama dan budaya. Karang taruna

		raga			
6	Pentas Budaya Nusantara antar-pelajar	Meningkatkan rasa cinta Indonesia Melestarikan budaya lokal Meningkatkan persahabatan antar-pelajar seluruh Indonesia	Pentas budaya Nusantara antar-pelajar Kumpulan aksi budaya Nusantara	Dinas Kebudayaan, Propinsi	Kalangan pemuda dan pelajar kreatif
7	Pemilihan Pelajar Berjiwa Pancasila Se Indonesia	Menumbuhkan sikap teladan berjiwa Pancasila di kalangan pelajar Mempraktikkan sikap teladan berjiwa Pancasila	Terlaksananya pemilihan pelajar berjiwa Pancasila Terpilihnya Pelajar berjiwa Pancasila	Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri	Pelajar SMA seluruh Indonesia

E. STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA KEPADA MASYARAKAT AWAM DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap kelompok awam perkotaan dan pedesaan memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang berbeda dari target sosialisasi lainnya. Hal ini mengingat kelompok awam perkotaan dan pedesaan identik dengan keterbelakangan dari aspek pendidikan, strata sosial, akses ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu, strategi sosialisasi kepada mereka haruslah melihat latar belakang sosiologis dan psikologis mereka. Yang pasti mereka masih

memiliki nilai-nilai penting yang mereka anut seperti semangat gotong royong, ikatan sosial yang kuat dan religiusitas yang kuat pula.²⁰

Masyarakat awam perkotaan dan pedesaan sesungguhnya bisa menjadi komunitas pancasilais sejati karena mereka telah memiliki modal sosial. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa mampu membuat keselarasan dan keseimbangan antara masyarakat sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan penuh keadilan.²¹

Berdasarkan review atas program sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat awam perkotaan dan pedesaan yang dilakukan MPR maka terlihat bahwa program-program yang dijalankan masih bersifat seremonial. Contohnya adalah kegiatan sosialisasi, dialog dan tatap muka dengan anggota masyarakat yang dilakukan oleh beberapa anggota MPR, kegiatan diskusi di TVRI dan RRI, dan beberapa program sejenis. Artinya program-program tersebut hanya sekadar menambah pengetahuan saja dan tidak berusaha mengubah sikap dan perilaku masyarakat awam perkotaan dan pedesaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sosialisasi di kalangan masyarakat awam perkotaan dan pedesaan memang tidak mudah karena

²⁰ Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014

²¹ Wawancara dengan Prof Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

memiliki kesulitan tersendiri seperti faktor budaya lokal yang sangat bervariasi dan persoalan figur teladan di tingkat bawah yang sangat minim. Karena itu peran serta tokoh, figur, dan aktor lokal sangat dibutuhkan. Terutama mereka yang dapat dijadikan panutan dalam rangka transformasi nilai-nilai Pancasila ini.²²

Untuk kalangan masyarakat awam perkotaan dan pedesaan, kiranya bisa diterapkan dua macam sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi paling dini atau pertama yang diterima individu. Lingkungan keluarga merupakan sosialisasi pertama yang dialami oleh individu pada masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.²³

Berdasarkan realitas di atas maka berikut ini beberapa usulan program dalam rangka sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat awam perkotaan dan pedesaan:

²² Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014

²³ Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, 22 November 2014.

Usulan Program Sosialisasi Pancasila Kepada Masyarakat Awam Perkotaan dan Pedesaan

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Indikator	Mitra Kerja	Target Group
1	Dialog Nilai-nilai Pancasila bersama masyarakat desa dan awam perkotaan	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dan awam perkotaan tentang nilai-nilai Pancasila Menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi masyarakat	Terlaksananya dialog nilai-nilai Pancasila dengan baik dan lancar Komunike dan deklarasi bersama	Aparat pemerintahan setingkat kelurahan	Petani Nelayan Pedagang Buruh Dsb
2	Training Dasar dan Advance "Nilai-nilai Pancasila"	Meningkatkan pengetahuan peserta akan nilai-nilai Pancasila Meningkatkan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila	Terlaksananya training dasar dan advance dengan lancar	Tokoh Masyarakat, Pimpinan Pesantren,	Karang Taruna Agamawan Masyarakat Biasa DII
3	Penulisan Modul "Nilai-nilai	Menambah khazanah penafsiran	Tersedianya Modul Publikasi	Perguruan Tinggi, Ormas	Akademisi, Tokoh masyarakat

	Pancasila dan Kearifan Lokal”	nilai-nilai Pancasila berperspektif kearifan lokal Menghilangkan misinterpretasi antara nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal	Modul	Keislaman, Kelompok Adat Lokal	
4	Program “Belajar Keteladanan dari Tokoh dan Anak Bangsa”	Menumbuhkan semangat keteladanan para tokoh dan anak bangsa Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air	Kumpulan Cerita Keteladanan dari tokoh dan anak bangsa Program SMS Keteladanan setiap hari	MPR, Perguruan Tinggi, Indosat, Telkomsel, dll	Seluruh masyarakat terutama pengguna nomor kartu Indosat, Telkomsel dll
5	Program “Cinta Tanah Air Via Facebook, Instagram Twitter”, dll.	Menumbuhkan semangat keteladanan para tokoh dan anak bangsa Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air	Website “Cinta Tanah Air” Program “Cinta Tanah Air”	Twitter, Instagram, Facebook, dll	Seluruh pengguna jasa internet (twitter, instagram dan facebook).
6	Program Kampung	Meningkatkan	Kampung Pancasila	Kabupaten, Kecamatan	Aparat Desa dan

	Pancasila	pengamalan nilai-nilai Pancasila secara langsung Menumbuhkan semangat kecintaan kepada Pancasila	Catatan Kegiatan dan Peristiwa yang Mencerminkan Nilai Pancasila	dan Desa	Masyarakat
--	-----------	--	--	----------	------------

F. PENUTUP

Strategi sosialisasi pendidikan Pancasila ke berbagai elemen masyarakat di atas diharapkan dapat terealisasi dengan baik sehingga konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaktualisasikan oleh setiap warganegara terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus memiliki komitmen yang kuat dan mau kerja keras dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, diperlukan kreativitas untuk melahirkan terobosan-terobosan baru dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila agar benar-benar menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masa depan yang cerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB VI

KESIMPULAN: APAKAH PANCASILA MASIH BISA MENYATUKAN?

A. PENDAHULUAN

Kajian akademik ini menguji seberapa besar Pancasila dapat diperankan untuk menjadi sumber nilai, moral dan spiritual bangsa Indonesia serta bagaimana agar posisinya dalam sistem ketatanegaraan yang sudah kuat itu dapat terus dipertahankan dengan menjaga agar nilai-nilai dan ajaran-ajarannya tetap aktual dalam kehidupan politik, sosial dan budaya warga negara Indonesia. Ini dimaksudkan agar Pancasila tetap menjadi sentral dan menyatukan seluruh warga negara yang majemuk serta mencegah terjadinya konflik sosial yang mengancam persatuan nasional. Sebagaimana lazimnya, sebuah bangsa yang besar dan multikultural seringkali harus berhadapan dengan konflik internal di antara mereka sendiri, yang timbul dari berbagai sebab struktural ataupun non-struktural. Diharapkan bahwa walaupun timbul konflik sosial semacam itu pihak-pihak yang terlibat konflik tetap dapat mengendalikan diri mereka dan sadar betul bahwa mereka adalah warga bangsa yang

bersatu dan berjiwa Pancasila. Kajian ini tidak berangkat dari asumsi yang simplistik bahwa dengan Pancasila segala bentuk konflik sosial-keagamaan bisa dicegah atau diatasi dengan mudah. Konflik adalah gejala alamiah, akibat dari terganggunya organisme sosial. Ketergangguan itu merupakan gejala sosial yang lumrah dan akan terus terjadi mengikuti perputaran kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika. Akan tetapi, diharapkan bahwa dengan pemahaman, penjiwaan dan pengamalan yang baik atas nilai-nilai Pancasila konflik apapun yang terjadi tidak akan memporakporandakan kita sebagai satu bangsa. Bahkan, dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara baik dalam masyarakat, konflik sosial keagamaan dapat dicegah.

Nah kajian ini telah mencermati korelasi antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran-ajaran luhur Pancasila. Ditemukan korelasi positif antara merosotnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila dengan merenggangnya ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Disimpulkan bahwa konflik terjadi akibat kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan sosial kita. Sebagaimana disebut di bab ketiga buku ini, masyarakat kita yang 'plural' berbenturan dengan tren kehidupan sosial kita yang cenderung 'monokultural'. Diduga dipengaruhi sejumlah faktor sosial-budaya dan politik yang kompleks, masyarakat

mulai tunduk pada egosentrisme kelompok, loyalitas monokulturalisme dan etnisisme, serta bangkitnya politik identitas berdasarkan agama dan etnisitas. Dalam realitas ini seharusnya Pancasila diperkuat sehingga kembali menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki kekuatan untuk menyatukan (*unifying power*). Dengan begitu diharapkan segenap warga bangsa sadar bahwa betapapun berbedanya mereka, *toch* mereka lahir dari kandung ibu pertiwi yang satu, dari sejarah yang satu, berbahasa dengan bahasa yang sama serta berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Mereka mengakui diversitas sosial dan berkomitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) betapapun kerasnya gejolak sosial-politik dan agama yang mereka hadapi. Guna mewujudkan kehidupan sosial yang sehat dan damai berdasarkan Pancasila diperlukan penerapan multi-strategi pendidikan Pancasila sesuai dengan kelompok-kelompok sosial yang ditargetkan.

B. PANCASILA DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL-KEAGAMAAN

Sebagaimana disebutkan dalam laporan ini, sebagian warga masyarakat Indonesia sempat tergelincir dalam konflik kekerasan akibat perubahan politik secara dramatis di bulan Mei 1998 dan berhasil membuat Soeharto, penguasa otoriter

rezim Orde Baru, tumbang. Perlu dicatat bahwa sekalipun konflik sosial keagamaan itu baru meledak dalam skala dan intensitas yang tinggi di masa Reformasi, sebenarnya tandatandanya sudah tampak sejak permulaan tahun 1990an. Di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera serta di Nusa Tenggara Timur (NTT), telah terjadi serangkaian kerusuhan sosial dengan motif dan sentimen etnis dan agama, juga dengan motif ekonomi-politik, meski intensitasnya masih terbilang rendah. Perkembangan ini tentu mengejutkan apalagi ketika intensitas konflik meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam situasi seperti itu, keresahan meluas sehingga pertanyaan soal eksistensi kita sebagai satu bangsa mengemuka. Disini kita tidak boleh berhenti berpikir apalagi menyerah. Sebaliknya, kita perlu bekerja keras untuk menemukan kembali identitas bersama, *common platform* atau *kalimatun sawa*, suatu kontrak sosial yang mengandung *gentleman agreement* yang bisa menyatukan kita kembali sebagai satu bangsa besar yang secara takdir terbentuk dari keragaman kultural yang unik dan kaya. Pancasila merupakan salah satu kekayaan itu serta modal sosial yang tak ternilai harganya. Diharapkan bahwa Pancasila bisa jadi tempat segenap anak bangsa bersandar atau pun berpegang saat diterpa goncangan.

Seperti disinggung di permulaan buku ini, di masa Reformasi konflik sosial terjadi dengan, motif, sifat, pola dan skala yang beragam termasuk konflik antar kampung sampai konflik dengan sentimen etnik, ras dan agama. Secara teoritikal konflik-konflik tersebut dipicu faktor-faktor struktural, semisal persaingan ekonomi politik, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, politik represif, persaingan dan benturan identitas, melemahnya kepemimpinan lokal, serta sentralisasi kekuasaan dst. Tentunya, tidak ada cara lain untuk mencegah berulangnya konflik-konflik tersebut kecuali dengan kritik, evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap akar masalahnya. Tapi perlu digarisbawahi disini bahwa akar konflik tidak terbatas pada faktor-faktor struktural. Konflik juga bisa berakar pada krisis identitas kebangsaan sebagai akibat dari merosotnya wibawa Pancasila. Warga masyarakat merasakan bahwa penyelenggaraan negara tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Mereka beranggapan bahwa Pancasila hanya ada dalam jargon kuasa dan tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyatnya. Oleh sebab itu muncul desakan agar Pancasila diperkuat dengan tujuan agar ia bisa kembali menjadi sandaran kehidupan berbangsa dan bernegara dan diharapkan dapat mencegah konflik dalam skala yang esktrrem yang bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Secara keseluruhan penguatan Pancasila bertujuan agar ia dapat berperan kembali secara efektif sebagai pemersatu

bangsa serta pelindung bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya.

Desakan dan harapan di atas bukan tanpa alasan. Ini berpijak pada pemikiran bahwa Pancasila merupakan doktrin dan acuan normatif yang cukup komprehensif untuk mengatur kehidupan kenegaraan serta menyatukan berbagai kelompok secara baik. Hal ini tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan mengamalkan kelima sila Pancasila secara konsisten. Artinya, sebagai dasar negara Pancasila tidak hanya digunakan sebagai acuan normatif, tetapi juga doktrinnya harus diterjemahkan agar bermanfaat secara praktikal. Dengan begitu, orang bisa menyaksikan dengan mata kepala suatu model ideal masyarakat Pancasila. Dari model tersebut bakal muncul hal-hal yang baik (*best practices*) untuk dicontoh. Bukan mustahil dari pengalaman-pengalaman masyarakat Pancasila akan lahir sistem etika yang bisa terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan harapan ini, negara dan segenap warganya tidak saja berkewajiban memromosikan dan merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berusaha menciptakan instrumen dan metode yang memadai tentang bagaimana menciptakan sistem sosial yang berkeadilan dan harmonis dengan seperangkat aturan hukum, kebijakan-kebijakan atau pelayanan-pelayanan sosial.

Kajian ini berkesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan melemahnya penghayatan dan pengamalan Pancasila di masyarakat. Artinya konflik-konflik tersebut diduga bisa dicegah seandainya Pancasila dihayati dan diamalkan secara baik. Contohnya, dari kajian ini muncul kesimpulan bahwa konflik sosial keagamaan terjadi karena 'Permusyawaratan', salah satu prinsip Pancasila, tampak kehilangan elan vitalnya. Prinsip ini merosot vitalitasnya sejalan dengan diterapkannya demokrasi liberal yang menggunakan prinsip elektoral yang liberal ketimbang prinsip 'Permusyawaratan' yang 'tradisional' dan feodalistik *a la* Orde Baru. Implementasi demokrasi elektoral tidak selalu ideal dalam arti bahwa tidak semua kepentingan kelompok minoritas bisa tersalurkan dengan baik. Ini bisa membuat mereka tidak selalu dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam situasi seperti itu mereka merasa eksistensi mereka kurang dihargai. Akibatnya mereka kemudian berusaha mencari perhatian dengan bersuara latang atau bahkan menentang pemerintah berkuasa dengan cara-cara yang radikal.

Kajian ini juga berkesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, negara tidak berhasil mengamalkan prinsip-prinsip 'Keadilan' Pancasila dengan sepenuhnya, terutama dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip ini dianggap tidak selalu

hadir dalam kehidupan bernegara. Ini tentu meresahkan dan membuat sebagian warga masyarakat terjerumus dalam aksi-aksi kekerasan dan konflik. Gagalnya perwujudan prinsip keadilan ekonomi mengganggu prinsip 'Persatuan' yang juga diadopsi sebagai salah satu prinsip Pancasila. Semangat 'Persatuan' dan toleransi yang diajarkan Pancasila tak tahan meredam amarah masyarakat yang frustrasi karena himpitan ekonomi. Sebagai contoh, beberapa kasus kekerasan sosial yang terjadi belakangan di Jakarta dan Jawa Barat diduga terjadi karena perubahan-perubahan ekonomi secara drastis.

Di beberapa tempat di Jabodetabek, penguasaan lahan secara besar-besaran oleh pengembang-pengembang raksasa menciptakan ketidak seimbangan sosial. Dalam beberapa kasus, seperti di Bekasi, agama kemudian digunakan untuk menyatakan kekecewaan dan protes. Dalam realitas tampak bahwa warga setempat memprotes keberadaan beberapa gereja yang dioperasikan warga Kristen dari etnis dan ras tertentu. Akan tetapi, sebenarnya keberadaan gereja bukan merupakan akar masalah. Inti masalahnya terletak pada perubahan landschape ekonomi secara besar-besaran dimana warga lokal merasa eksistensi mereka terancam. Dalam kasus ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan aspek sosial dan keseimbangan sehingga warga masyarakat merasa

resah. Disini tampak bagaimana negara tidak berhasil menginterpretasikan secara tepat prinsip Pancasila dan menerjemahkannya secara benar ke dalam kebijakan ekonominya. Akibatnya integrasi dna organisme sosial terganggu. Kehidupan masyarakat yang selama ini harmoni berubah menjadi tegang. Ini seharusnya bisa dicegah. Seharusnya negara tidak asal menjalankan kebijakan ekonomi secara liberal yang beresiko bagi kesatuan dan persatuan bangsa.

Diakui bahwa sebab-sebab konflik-konflik sosial di Indonesia sangat kompleks. Tapi melemahnya nilai-nilai Pancasila menyebabkan Kasus konflik sosial di Mesuji Lampung beberapa waktu yang lalu, misalnya, terkait dengan masalah tanah dan tata ruang. Tapi ini kemudian berubah menjadi isu identitas pendatang *versus* identitas warga setempat. Lagi-lagi disini masalah pengaturan ekonomi menjadi akar masalahnya. Hal ini biasanya terjadi akibat implementasi kebijakan publik yang tidak menggunakan prinsip-prinsip kebijakan yang adil dan seimbang sebagaimana yang dianjurkan nilai-nilai keadilan sosial seperti yang dipesankan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Konflik sosial keagamaan lainnya yang mengejutkan adalah konflik kekerasan bermotif agama dan etnis di Ambon di tahun 2000-2002. Di Amon dan Maluku pada umumnya, kelompok Kristiani sejak masa kolonial menguasai birokrasi,

kebijakan yang dibentuk pemerintah Belanda ketika itu. Setelah kemerdekaan, khususnya di masa Orde Baru, posisi yang relatif mapan ini bergeser secara perlahan-lahan. Hal ini mungkin terjadi akibat perubahan struktur dan ekonomi-politik dalam masyarakat. Akar konfliknya adalah distribusi kekuasaan politik dan ekonomi yang berubah akibat perubahan struktur sosial.

C. MENJAGA PANCASILA DARI DISTORSI SEJARAH

Selain perlu penginterpretasi Pancasila secara aktual, salah satu temuan penting dari kajian akademik ini adalah bagaimana menjaga agar Pancasila tidak terdistorsi dan dikorupsi rezim Penguasa yang cenderung suka mengklaim dasar Negara ini tapi bukan untuk menjadikannya sebagai basis moral tetapi menggunakannya sebagai alat kekuasaan kelompoknya. Dalam hal ini Pancasila harus menjadi milik bangsa dan tak dibolehkan bagi rezim manapun di republik ini untuk menggunakannya sebagai alat legitimasi kekuasaan yang otoriter dan tirani. Pancasila adalah milik semua dan karenanya tidak bisa diklaim oleh sekelompok orang, militer ataupun sipil. Apalagi disalahgunakannya. Organ-organ negara seperti pemerintah beserta birokrasinya, baik sipil maupun militer, serta lembaga-lembaga negara seperti Presiden tidak diperkenankan untuk memonopoli penafsiran terhadap Pancasila, apalagi memaksakan pengamalannya

secara tidak demokratis dan sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menghindari gejala penolakan terhadap Pancasila yang kerap terjadi semasa Orde Baru. Ketika itu, tidak sedikit anggota masyarakat yang belum bisa menempatkan dirinya sebagai warga negara (*citizen*) atau untuk menerima Pancasila sebagai dasar Negara, bukan saja dikarenakan mereka gagal mendialogkan nilai-nilai yang dikandung Pancasila dengan nilai-nilai budaya, bahasa, dan agama yang mereka anut, akan tetapi karena mereka kecewa dan kehilangan kepercayaan atas Pancasila akibat klaim rezim atasnya.

Akibatnya fatal. Gelombang penolakan terhadap Pancasila semakin mengemuka setelah tumbangny rezim Orde Baru yang disusul oleh lahirnya era reformasi. Sebagian warga masyarakat justru menggugatny dan bahkan menuding Pancasila sebagai kambing hitam atas krisis ekonomi, politik, keamanan dan kenegaraan yang menerpa bangsa Indonesia, setidaknya di fase-fase awal Reformasi. Kajian akademik ini menyimpulkan bahwa warga masyarakat mengalami 'trauma politik' akibat penyalahgunaan Pancasila oleh rezim Orde Baru. Apalagi rezim berkuasa tidak segan-segan membungkam kritik dan oposisi terhadapny dengan stigmatisasi bahwa segala bentuk tindakan kritik, pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan rezim adalah anti-Pancasila. Disini terlihat bagaimana Pancasila

digunakan sebagai alat kekuasaan guna menekan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional yang diadopsi rezim. Secara kenegaraan hal ini berakibat fatal. Pancasila menjadi statis dan tidak terbuka. Ia menjadi ideologi dan doktrin tertutup dan, sebagai akibatnya, ia tidak berhasil menetralsir atau mengimbangi arus keterbukaan politik yang datang bersama dengan arus demokratisasi. Dalam situasi ini Pancasila seolah-olah kehilangan daya tarik atau bahkan kesaktiannya di ruang publik. Sekalipun ia tidak ditolak sama sekali, Pancasila tidak lagi masuk dalam *mainstream* wacana kenegaraan dan kebangsaan saat itu.

Seperti ditekankan di dalam buku ini, pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila mempunyai dua kelemahan mendasar. *Pertama*, sikap politik rezim yang anti kritik dan suka meredam kebebasan berpendapat mengurangi mutu berbangsa dan bernegara. Tidak bisa disangkal bahwa rumusan-rumusan indoktrinasi Pancasila, seperti yang pernah dituangkan dalam buku modul-modul Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) cukup baik. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah rumusan-rumusan tersebut tidak bisa digunakan untuk mengkritik dan mengontrol pemerintah. Pancasila malah digunakan secara sewenang-wenang untuk melegitimasi kebijakan Orde Baru yang menguntungkan kelompoknya dan tidak selalu sejalan

dengan doktrin dan norma Pancasila. Atas nama Pancasila, rezim bertindak secara represif serta melanggar HAM. Banyak hak-hak sipil dan politik warga negara yang diabaikan guna meredam lawan-lawan politiknya. Ini membawa dampak buruk dan merusak nama Pancasila di mata warga masyarakat yang tidak mengerti persoalan. Ketika rezim Orde Baru tumbang, buku Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihilangkan dari kurikulum sekolah dan diganti dengan pendidikan kewarnegaraan.

Kedua, penyalahgunaan Pancasila berdampak serius di era demokrasi. Citra Pancasila sebagai dasar, filsafat dan ideologi Negara merosot sama sekali. Alhasil, warga masyarakat hilang rasa hormatnya pada Pancasila. Mereka beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi bisa dipercayai sebagai ideologi bernegara. Dalam kehampaan ideologi ini, banyak generasi muda yang mencari-cari ideologi alternatif selain Pancasila. Di sebagian kalangan Muslim, muncul segelintir anak muda yang berjuang menggantikan Pancasila dengan sistem politik Islam berdasarkan syariat. Mereka mengusung ide kekuasaan politik berbasis khilafah yang mereka klaim pernah mengantarkan dunia Islam ke masa keemasannya beberapa abad lampau. Dalam konteks ini konsep Negara bangsa (nation state) tidak diperlukan sehingga NKRI menjadi tidak relevan. Bagi mereka Negara

harus berdasarkan Islam, karenanya yang harus menjadi ikatan kebangsaan yang terutama adalah 'muslim brotherhood' atau persaudaraan atas dasar iman, bukan persaudaraan atas dasar ras, etnis atau kebangsaan. Ada juga sekelompok orang yang berjuang menggeser Pancasila sebagai dasar Negara dengan Islam. Dalam hal ini NKRI dan *nation state* masih relevan tetapi dasarnya syariat bukan norma-norma Konstitusional yang sekuler.

Ketiga, dampak lain akibat merosotnya citra Pancasila adalah adalah mulai menipisnya identitas keIndonesiaan dari sebagian warga masyarakat kita. Secara politik mereka cenderung pragmatis dan berpandangan bahwa ideologi negara tidak penting. Dalam berbangsa dan bernegara mereka lebih tertarik pada hal-hal pragmatis dan materialistik karenanya mereka tidak peduli pada ideologi bangsa yang dirancang dan dipikirkan secara mendalam oleh para *founding fathers* negara ini. Menipisnya identitas ke-Indonesiaan mereka diduga karena pengaruh globalisasi. Mereka lebih merasa sebagai warga negara global (*global citizen*) dan tidak terikat dengan identitas kebangsaan tertentu. Bagi mereka loyalitas kebangsaan tidak diperlukan.

Selanjutnya, Kelompok yang paling mengancam dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mereka yang menggunakan gerakan politik-keagamaan yang

sudah dirancang dengan sangat kuat secara sistematis dan terorganisir. Konflik kemudian muncul ke permukaan ketika mereka berusaha memperjuangkan apa yang mereka yakini bahkan dengan cara anarkis. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam rasa persaudaraan, kerukunan antarumat beragama dan NKRI, bahkan bisa dipastikan bahwa gerak bangsa ke depan menuju ke arah negara gagal (*failed state*).

D. PANCASILA SEBAGAI SUMBER MORAL & SPIRITUAL

Sebagaimana disebut di sela-sela pembahasan buku ini, bahwa rumusan Pancasila tidak saja mengandung makna-makna filosofis dan politik, tetapi ia juga bahwa rumusan tersebut merupakan hasil renungan dan pemahaman yang mendalam atas suara batin segenap Bangsa Indonesia ketika itu. Perumusan Pancasila dilakukan melalui proses-proses yang melelahkan namun penuh dengan kesungguhan, kebijaksanaan dan kecerdasan. Seperti disebut di awal buku ini, rumusan Pancasila yang ada dewasa ini merupakan hasil sungguh-sungguh dari usaha penggalian, konseptualisasi, pewacanaan, rasionalisasi dan kontekstualisasi atas situasi-situasi riil ketika itu guna memberi fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa yang multi-ethnik dan multi-kultural ini.

Secara historis, proses sejarah penggalian serta konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang dan kompleks sebelum akhirnya disahkan. Proses ini tidak selalu mudah mengingat dalam setiap perdebatan mengenai Pancasila, selalu saja bermunculan macam-macam ide tentang dasar negara dari tokoh-tokoh nasional yang berasal dari orientasi ideologi yang berbeda-beda pula. Sekalipun demikian, kandungan-kandungan Pancasila dibuatnya menjadi lebih kaya. Pemahaman yang benar terhadap Pancasila tidak bisa terlepas pada pengetahuan yang baik dan benar terhadap proses historis tersebut serta kemampuan menjaganya dari distorsi.

Salah satu tujuan dari proses perumusan itu adalah menjadikan Pancasila sebagai sumber moral berbangsa dan bernegara. Semangat ini tidaklah berlebihan mengingat Pancasila memiliki landasan etis, filosofis, dan historis yang kuat sehingga para tokoh nasional tidak ragu untuk menjadikan Pancasila sebagai rujukan moral.¹ Ini juga karena Pancasila mencerminkan ajaran yang khas dan otentik Indonesia. Presiden Soekarno sendiri menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia karenanya ia merupakan filsafat bernegara yang asli Indonesia. Karenanya adalah tugas segenap bangsa

¹Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.

Indonesia untuk mengenali, mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkannya dengan sepenuh hati. Hanya dengan begitulah keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dipertahankan.

Cara yang paling mudah untuk memahami Pancasila dengan baik adalah diantaranya dengan mengenali dan mempelajari kelima sila yang dikandungnya. Tapi harus diingat bahwa kelima sila tersebut merupakan kesatuan yang terkait satu dengan lainnya. Oleh sebab itu makna Pancasila hanya bisa dipahami dengan benar dengan melihatnya secara holistik. Misalnya, perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa hanya dimungkinkan dengan berusaha setia pada prinsip keadilan sosial. Pengamalan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab juga meniscayakan penghayatan yang sungguh-sungguh atas sila Ketuhanan yang Maha Esa, atau juga sebaliknya.

Ini berarti bahwa manusia Indonesia yang berketuhanan seharusnya memiliki kepribadian dan karakter khas. Kepribadian yang bisa juga disebut 'Pancasilais' memiliki ciri-ciri khas, seperti adanya rasa tanggungjawab yang kuat untuk menjaga kesatuan dan persatuan NRI, memiliki cinta tanah air yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat pada solidaritas sosial, serta memiliki penghargaan terhadap sesama warga bangsa apapun latar belakang suku-bangsa,

agama, ras, dan adat istiadatnya. Jadi kepribadian warga bangsa Indonesia yang berketuhanan harus peka pada manusia-manusia lain yang hidup bersamanya, mengingat bahwa semua umat manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara spiritual–Ketuhanan diyakini bahwa roh-roh mereka tercipta dari Tuhan yang sama, yaitu Allah SWT. Itu berarti manusia Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa (YME) memiliki asal dan fitrah yang sama. Secara sosial-historis mereka lahir dan hidup dalam konteks yang sama dan oleh karenanya diikat sejarah dan cita-cita yang sama. Dengan begitu, secara moral mereka berkewajiban bukan saja untuk saling menghormati satu dan lainnya, tetapi juga untuk saling melindungi dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Penguatan politik identitas harus dicegah agar tidak menjadi destruktif. Nilai-nilai Ketuhanan perlu diinterpretasikan secara arif, aktual dan kontekstual agar tidak mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Penghayatan dan pengamalan Pancasila hendanya diarahkan sehingga sejalan dengan nafas perkembangan masyarakat kita yang semakin demokratis dan multikultural di tengah *setting* ekonomi-politik nasional yang tak terpisahkan dari perkembangan global. Agama dihadirkan untuk menyejahterakan dan membahagiakan bukan untuk menyengsarakan. Semua agama membawa rahmat bagi alam semesta. Inilah jiwa dari

sila Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah jiwa terpenting dari Pancasila. Dengan jiwa seperti itu Pancasila tetap bisa menjadi sumber inspirasi bagi munculnya bermacam-macam kreatifitas-kreatifitas serta inovasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian di atas, kajian ini merasa perlu untuk merekomendasikan beberapa usulan rekomendasi.

Pertama, seperti disebut di atas, bahwa ada korelasi antara konflik sosial keagamaan dan merosotnya nilai-nilai Pancasila. Ditemukan kontradiksi dan inkonsistensi antara kebijakan pembangunan dan doktrin ataupun norma-norma Pancasila. Kontradiksi semacam itu telah memunculkan krisis identitas kebangsaan dan hilangnya kepercayaan rakyat tidak saja kepada rezim penguasa tetapi juga kepada Pancasila itu sendiri. Karena itu perlu ditemukan cara, strategi pas dan kemauan politik untuk menghilangkan kontradiksi-kontradiksi atau inkonsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan sosial ekonomi dan politik sehingga dan membuatnya sejalan dengan Pancasila. Tugas ini harus dimulai dari aspek konseptual. Artinya perlu diselenggarakannya kajian kebijakan secara terus menerus agar supaya kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah berkuasa tidak kontradiktif dengan falsafah, doktrin dan

norma-norma dasar Pancasila. Secara praktikal perlu segera diwujudkan 'Lembaga Pengkajian Pancasila' yang bertugas melakukan kritik dan mengawasi secara sungguh-sungguh apakah pembangunan nasional di segala bidang sudah cukup Pancasilais atau tidak.

Kedua, kajian ini juga menyimpulkan bahwa konflik-konflik sosial keagamaan terjadi secara simultan dengan menguatnya politik identitas dalam masyarakat dalam dua dasawarsa belakangan ini. Penguatan identitas agama dan etnis sering menimbulkan benturan-benturan antar kelompok warga masyarakat yang berbeda identitas. Penguatan identitas-identitas itu hasil dari perkembangan sosial yang ruwet sehingga hal itu tidak bisa dihentikan. Yang terpenting dan harus dilakuakn oleh Negara dan pemimpin-pemimpinnya adalah agar menemukan suatu konsensus untuk menjadikan Pancasila sebagai identitas bersama. Sehingga apabila terjadi benturan antara identitas dalam masyarakat maka semuanya harus berbesar hati untuk 'Kembali ke Pancasila' sebagai *common platform*. Nah, gerakan 'Kembali ke Pancasila' merupakan gerakan yang bertujuan menjadikan Pancasila sebagai doktrin dan norma utama segenap warga Negara Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Untuk menjadikan Pancasila sebagai *platform* bersama, maka diperlukan strategi aksi yang tepat. Kajian ini mengusulkan perlunya dikembangkan semacam 'Studi Pancasila Intensif.'

Aksi ini dapat dilakukan tidak saja melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi semacam 'Gerakan Nasional Mengaji Pancasila' yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan informal yang diprakarsai secara swadaya masyarakat.

Ketiga, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gerakan 'Kembali ke Pancasila' bisa dimulai dengan pemetaan terhadap perilaku ideologi (*ideological behavior*) warga masyarakat agar kita tahu persis tingkat loyalitas dan kecenderungan ideologis warga masyarakat paling mutakhir. Hal ini bisa dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif melalui observasi mendalam serta dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Mapping yang akan dibuat melalui studi ini akan berguna bagi perumusan konsep serta kebijakan guna mendukung gerakan 'Kembali ke Pancasila'.

Keempat, dalam konteks konflik kekerasan dan penguatan politik identitas, maka perlu aksi ekspansif untuk memperkuat 'Gerakan Indonesia Toleran'. Sekolah-sekolah pemerintah dan swasta perlu bahu-membahu untuk menyukseskan aksi ini demi mengembangkan generasi bangsa dengan 'Mentalitas Toleran' yang tinggi. Mengembangkan 'Mentalitas Toleran' ini bukanlah perkara mudah. Adalah tokoh-tokoh agama yang harus mengambil

inisiatif untuk mempromosikan sikap beragama yang 'Inklusif' dan 'Konfiden' serta memerangi mental beragama yang 'Eksklusif' dan 'Inferior' yang melihat kelompok lain sebagai 'Musuh yang Mengancam'. Para tokoh agama perlu menghimbau umatnya untuk melepaskan diri dari kesetiaan-kesetiaan sempit dan primordial. Toleransi seperti itu mencoba mencari secara bersama makna kemanusiaan dan martabat manusia serta membangun kepekaan yang lebih mendalam terhadap kemanusiaan yang merupakan usaha yang harus menyertai usaha perjuangan bersama. Pemerintah perlu membantu gerakan dakwah agar ikut mendukung agenda ini.

Kelima, Pancasila dan nilai-nilainya sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat namun belum digunakan dan dihayati secara batiniyah. Karenanya Pancasila harus dijiwai dan dibatinkan. Ini agar nilai-nilai Pancasila meresap secara mendalam ke dalam tiap-tiap individu. Untuk usaha ini diperlukan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai upaya pencegahan ataupun mengurangi konflik sosial keagamaan dengan cara merancang perubahan sosial secara terencana dimana para *stake holders* yang berkepentingan ikut terlibat secara aktif. Dengan demikian, agenda perubahan sosial yang lebih demokratis dan damai bisa terbentuk dimana nilai-nilai Pancasila berperan secara dominan kerana menjadi sumber inspirasi. Secara praktikal

ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan secara ekspansif dan masif dengan meminta bantuan media untuk mengkomunikasikan agenda tersebut kepada publik secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim dan Yudi Latif (penyunting), *Dalam Bayang-Bayang Fanatisme* (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007).
- Abidin Wakano, "Maluku dan Keindahan Sejarahnya, Harmoni Kehidupan Masyarakat Maluku yang Berbasis Kearifan Lokal", dalam Josep Antonius Ufi dan Hasbullah Assel, *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku* (Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng, 2012).
- Agnes Dwi R. et al., *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3Es, 1985).
- Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.
- Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.
- Anita Yossihara, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas 2010).
- Arianto Sangaji, "Aparat Keamanan dan Kekerasan Regional di Poso", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 342. Lihat juga di Hamdan Basyar (ed.), *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-pola Alternatif Penyelesaiannya* (Jakarta: P2P LIPI, 2003).
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009).
- Azyumardi Azra, "1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?", dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Brill, 2008), h. 9-20. Walau demikian, Azra juga menyebutkan bahwa tidak sedikit kalangan yang meragukan teori ini, salah satunya Naquib Al-Attas. Al-Attas menolak anggapan bahwa kompetisi antara

- Islam dan Kristen telah mengakselerasi penyebaran Islam.
- Azyumardi Azra, "Revisitasi Pancasila" dalam M.Karim (ed.) *Rindu Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Center for Religious & Cross-cultural Studies (SRCS), Yogyakarta, "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indoensia 2012.
- Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003).
- Diolah dari
<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>, diakses pada 5 Desember 2014.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj., (Jakarta Gramedia, 1986), Jilid I.
- F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013).
- Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4 Desember 2014.
- Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.
- Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.
- Franz Magnis-Suseno, "Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa," *Prisma* Vol. 28, No.2, Oktober 2009).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008).
- Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- H. A. W Wijaya, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

- Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*.
- ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan*, Laporan ICG Asia N°19, Jakarta-Brussels, 27 Juni 2001
- Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada(MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009)
- Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada(MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009).
- Imam Priyo Handoko, "Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah", *Kompas*, Rabu 15 Februari 2006.
- Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syahid, 2006).
- Iwan Gardono Sudjatmiko, "Communal Conflict , State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia".
- Jimly As-Siddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Paska Reformasi, Makalah pada Dialog Kebangsaan tentang "Toleransi Beragama", Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno*, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014.
- John Bamba, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina, dan Papua New Guinea*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Uin Jakarta dan European Center for Conflict Prevention (ECCP).
- John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

- Kata "membatinkan Pancasila" digunakan oleh Frans Magnis-Suseno pada wawancara di Jakarta, 26 November 2014.
- Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Kliping Brita Kementerian Agama, "Masih Banyak yang Tidak Hafal Pancasila" Suara Karya, 08 April 2014.
- Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan; Bunga Rampai Antropologi Terapan* (LP3ES: Jakarta, 1984).
- Laporan Akhir Survei Implementasi Empat Pilar dan Reformasi GBHN oleh CSRC UIN Jakarta dan MPR RI 2013.
- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: Routledge, 1956).
- Lorraine V. Aragon, "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Mohamad Miqdad, *Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan*,
http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=13, diakses pada 4 Desember 2014.
- Munawar M. Saad, *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*,
http://insankampus.blogspot.com/2008/12/sejarah-konflik-antar-suku-di-kabupaten_09.html, diakses pada 5 Desember 2014. Bahkan menurut Alqadrie sejak 1963 berdasarkan catatan resmi Kapolda Kalbar, kasus perselisihan, antagonisme, dan konflik antar kelompok anggota masyarakat telah terjadi setidaknya sampai 12 kali.
- Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Universitas Paramadina, 2004).
- Nurman. S, "Konflik antar Lembaga di Pedesaan: Penelitian di Kenegarian Pianggu, Sumatera Barat", *Demokrasi*, Vol. I, No. 1, Tahun 2002.

- R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis-Agama di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003).
- Retnowati, *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik)*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, tth).
- Reza A.A. Wattimina, "Memahami Seluk Beluk Konflik Antar Etnis Bersama Michael E.Brown", artikel diakses di <http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-bersama-michael-e-brown/> tanggal 23 November 2014. Lihat pula Michael E.Brown, "Causes and Implications of Ethnic Conflict" dalam *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (ed.), (Great Britain: Polity Press, 1997).
- Rikard Bagun, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Sastrapratedja, "Agama: Mampukah Mendorong Perubahan Sosial?," *Prisma*, (Jakarta; 9 September 1982).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi, (Jakarta: 2014)
- Setara Institute, "Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012.
- Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*.
- Sulaeman et al., "Penyusunan Model Resolusi Konflik Antar Desa Dan Antar Kampung Melalui Pembangunan Modal Sosial Pada Masyarakat Pedesaan Pantai Utara Jawa Barat", *Laporan Penelitian*, Universitas Padjadjaran, 2005,
<http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>, diakses pada 7 Desember 2014.

- Syarif Ibrahim Alqadrie, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat".
- The Wahid Institute, "Laporan Tahunan: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013'.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- William Chang, "Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003).
- Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Zainal Abidin Bagir et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta: CRCS, 2012).

Sumber Internet:

- <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/2009/05/rekayasa-sosial-social-engineering.html>.
- datuakrajotanjuang.wordpress.com/2011/04/14/kaum-dan-pesukuan/.
- http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html, diakses pada 6 Desember 2014.
- http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html.
- <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan--konflik-agama-muncul>, diakses pada 4 Desember 2014.

<http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>, diakses pada 6 Desember 2014.

<http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

<http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

<http://sosiopedia.wordpress.com/materi-2/kelas-xi/semester-i/konflik-sosial/>, diakses pada 4 Desember 2014.

http://www.academia.edu/7183266/Hubungan_nilai_budaya_individualismekolektivisme_dan_gaya_penyelesaian_konflik.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.shtml

<http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.

<http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.

<http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.

<http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.

http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_konflik-poso-sampit.html, diakses pada 5 Desember 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>, diakses pada 6 Desember 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/08/13/mrg174-jalan-rusak-picu-konflik-antar-kampung-di-sukabumi>, diakses pada 7 Desember 2011.

<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>.

Wawancara:

Wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 04 Desember 2014.

Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, Jakarta 22 November 2014.

Wawancara dengan Franz Magnis-Suseno, Jakarta, 26 November 2014.

wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 4 Desember 2014.

Wawancara dengan Ichsan Malik, 2 Desember 2014.

Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014

Wawancara dengan Prof Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.